



DR. MOCHTAR NAIM

MERANTAU

POLA MIGRASI

SUKU MINANGKABAU

GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

MERANTAU

POLA MIGRASI SUKU MINANGKABAU

PUSTAKA AL-HUSNA,

20, Flat P.K.N.S.
Jalan Raja Muda Musa,
KUALA LUMPUR,
Tel: 988824

DR. MOCHTAR NAIM

Direktur Pusat Latihan Penelitian
Ilmu-Ilmu Sosial,
Universitas Hasanuddin,
Ujung Pandang

GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS
1979

© 1979, GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS
P.O. Box 14, Bulaksumur, Yogyakarta.

Terjemahan dari:
"Merantau: Minangkabau Voluntary Migration,"
Ph.D. Dissertation, University of Singapore, 1973.

Dimungkinkan dengan bantuan dana dari Yayasan
Ford, Jakarta.

Diterjemahkan oleh Rustam St. R. Tinggi dan An-
sari dengan supervisi penulis.

*Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin
tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya
dalam bentuk apapun, baik cetak, photoprint,
microfilm dan sebagainya.*

Dicetak pada:
GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS
7703091—C2E.

*Karatau madang di hulu
Babuah babungo balun,
Marantau bujang dahulu
Di rumah baguno balun.*

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	xix
SEPATAH KATA	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Tujuan dan ruang lingkup studi	1
2. Definisi "Merantau"	2
3. Merantau dalam rangka studi migrasi: Suatu kerangka konsepsi	5
4. Struktur sosial di Minangkabau	13
5. Metodologi	21
6. Pengumpulan data	23
7. Kerangka analisa	26
BAB II BESARNYA JUMLAH PERANTAU	27
1. Jumlahnya	27
2. Perbandingan	34
3. Kesimpulan	51
BAB III PERSPEKTIF SEJARAH	57
1. Awal mula merantau	57
2. Rantau dan luhak	61
3. Ekspansi rantau	66
4. Rantau sebagai koloni	73
5. Rantau "politik"	75
6. Rantau kota	77
7. Perkembangan rantau	78
8. Kesimpulan	94
BAB IV ORANG MINANGKABAU DI RANTAU SEKARANG	96
1. Medan dan Sumatera Utara umumnya	96
2. Pekanbaru dan Riau umumnya	103
3. Palembang dan Sumatera Selatan umumnya	110
4. Jakarta	115
5. Jawa pada umumnya	131
6. Ujung Pandang dan Indonesia Timur umumnya	139
7. Malaysia dan Singapura	144

BAB V	POLA KEHIDUPAN DI RANTAU	154
	1. Tipe rantau	154
	2. Okupasi utama di rantau	157
	3. Latarbelakang pendidikan para perantau	164
	4. Kelompok umur	165
	5. Daerah asal di Sumatera Barat	169
	6. Bila pertama kali merantau	172
	7. Migrasi tahapan	175
	8. Pola bepergian dan proses penyesuaian diri mula-mula tiba di rantau	180
	9. Tipe kediaman di rantau	183
	10. Status perkawinan dan kehidupan keluarga di rantau	184
	11. Integrasi dan konflik serta penyesuaian sosial di rantau	195
	12. Hubungan dengan kampung	215
BAB VI	SEBAB-SEBAB MERANTAU	227
	1. Faktor-faktor fisik: ekologi dan lokasi	228
	2. Faktor ekonomi dan demografi	239
	3. Faktor pendidikan	256
	4. Daya tarik kota	261
	5. Keresahan politik	263
	6. Faktor-faktor sosial	266
	7. Arus baru	280
	8. Faktor sosial bagi migrasi di antara masyarakat-masyarakat lainnya	284
	9. Kesimpulan I: Faktor-faktor aggregatif bagi migrasi	288
	10. Kesimpulan II: Tipologi migrasi	295
BAB VII	EFEK DAN PROSPEK MERANTAU	300
	1. Efek merantau	300
	2. Prospek merantau	312
CATATAN	Bab I	315
	Bab II	320
	Bab III	321
	Bab IV	329
	Bab V	332

Halaman

Bab VI	335
Bab VII	340
BIBLIOGRAFI	342

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL II.1	Percentase orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut tempat dan tahun kelahiran	29
TABEL II.2	Percentase orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut usia meninggalkan daerah asal dan tahun kelahiran	29
TABEL II.3	Jumlah seluruh orang Minangkabau di tahun 1930 . . .	31
TABEL II.4	Proyeksi perkiraan jumlah orang Minangkabau pada tahun 1971 berdasarkan keseluruhan angka-angka tahun 1930 dengan r yang berbeda-beda	32
TABEL II.5	Tingkat kenaikan penduduk	33
TABEL II.6	Kenaikan penduduk tahun 1961 dan tahun 1971 dibandingkan dengan tahun 1930	34
TABEL II.7	Jumlah dan persentase orang Jawa yang terdapat di berbagai tempat di Sumatera, dan persentase mereka dalam hubungan dengan penduduk setempat pada tahun 1930	36
TABEL II.8	Jumlah dan persentase orang Jawa yang terdapat di beberapa tempat di Indonesia dan proporsi mereka dalam hubungan dengan para penduduk lokal pada tahun 1930	37
TABEL II.9	Distribusi penduduk kelahiran Jawa di Sumatera, tahun 1961 (Daerah-daerah pedesaan)	38
TABEL II.10	Distribusi orang-orang Ambon, Menado dan Timor di berbagai tempat di Indonesia, pada tahun 1930	41
TABEL II.11	Distribusi orang Bugis, Banjar dan Bawean di berbagai tempat di Indonesia dan Semenanjung Malaya, pada tahun 1930 . .	44
TABEL II.12	Jumlah dan persentase dari orang Aceh, orang Melayu Pesisir, orang Jambi, orang Palembang, orang Lampung dan orang Bangka-Belitung, di dalam dan di luar wilayah mereka masing-masing, pada tahun 1930	47
TABEL II.13	Perhitungan orang Batak Tapanuli dan Pesisir Timur tahun 1930	49
TABEL II.14	Proyeksi perkiraan seluruh jumlah orang Batak Toba pada tahun 1961, berdasarkan atas angka-angka keseluruhan tahun 1930	51

TABEL II.15	Intensitas migrasi dari sukubangsa-sukubangsa utama di Indonesia, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1930	52
TABEL II.16	Proyeksi perkiraan migrasi di antara kelompok-kelompok sukubangsa tertentu di Indonesia untuk tahun 1961	54
TABEL IV.1	Jumlah orang Minangkabau di kota-kota di Sumatera Utara (Sensus 1930)	98
TABEL IV.2	Pusat-pusat kaki-lima di Jakarta di mana pedagang Minangkabau banyak terdapat (Keadaan September 1970)	118
TABEL IV.3	Macam-macam barang yang dijual oleh pedagang kaki-lima Minangkabau di Senen (Keadaan September 1970)	120
TABEL IV.4	Dagang kaki-lima dan toko milik pedagang Minangkabau di Pusat Perbelanjaan Mayestik, Kebayoran (Keadaan September 1970)	122
TABEL IV.5	Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1950–1970, menurut kelompok etnis	125
TABEL IV.6	Jumlah orang Indonesia menurut kelompok etnis di Malaya, 1911–1947	146
TABEL IV.7	Penyebaran orang Sumatera di Malaya, 1931–1947	146
TABEL V.1	Tingkat pendidikan tertinggi orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut okupasi utamanya	164
TABEL V.2	Tingkat pendidikan orang Minangkabau yang disurvei di rantau dan yang di kota Padang	166
TABEL V.3	Kelompok umur orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut okupasi utamanya	166
TABEL V.4	Kelompok umur menurut tingkat sekolah tertinggi yang dicapai	167
TABEL V.5	Kelompok umur orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut jenis sekolah yang dimasuki	168
TABEL V.6	Kelompok umur orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut tempat pendidikan	168
TABEL V.7	Intensitas merantau dan daerah asal di Sumatera Barat dari orang Minangkabau yang disurvei di rantau	169
TABEL V.8	Tingkat sekolah tertinggi yang dicapai oleh orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut daerah asal di Sumatera Barat	170

TABEL V.9	Okupasi utama orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut daerah asal di Sumatera Barat	171
TABEL V.10	Kelompok umur orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut tempat kelahiran	173
TABEL V.11	Kelompok umur orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut masa pertama kali pergi merantau	174
TABEL V.12	Kelompok umur orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut usia pertama kali pergi merantau	174
TABEL V.13	Tahun pertama kali pergi merantau menurut daerah asal di Sumatera Barat	175
TABEL V.14	Usia pertama pergi merantau menurut daerah asal di Sumatera Barat	176
TABEL V.15	Alamat sekarang dari orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut tempat ke mana pertama kali merantau .	177
TABEL V.16	Daerah kelahiran orang-orang yang disurvei H.D.Evers di kota Padang tahun 1971.	178
TABEL V.17	Pertumbuhan penduduk kota-kota Sumatera Barat	179
TABEL V.18	Pola bepergian merantau	180
TABEL V.19	Orang-orang yang pertama dijadikan tempatan, yang membantu memberi tempat tinggal, dan membantu mencari kerja menurut hubungan kekeluarganya di rantau	181
TABEL V.20	Okupasi orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut tujuan merantau semula	182
TABEL V.21	Tingkat pendidikan tertinggi dari orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut tipe, lokasi dan pemilikan rumah di rantau	184
TABEL V.22	Tingkat pendidikan tertinggi orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut frekuensi pindah tempat kediaman di rantau	185
TABEL V.23	Status marital orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut status marital mula berangkat merantau	185
TABEL V.24	Isteri-isteri orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut tempat dilangsungkannya perkawinan	186

TABEL V.25	Status marital orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut anggota keluarga yang tinggal bersama	187
TABEL V.26	Jumlah anggota dalam rumah tangga orang Minangkabau yang disurvei di rantau	188
TABEL V.27	Jumlah anak dalam keluarga orang Minangkabau yang disurvei di rantau	188
TABEL V.28	Kepala keluarga orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut tingkat tertinggi pendidikan yang dicapai	189
TABEL V.29	Okupasi utama orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut kondisi hidup di rantau, dan menurut partisipasi isteri dan anak-anak dalam mencari kehidupan di rantau	191
TABEL V.30	Hubungan perkawinan laki-laki Minangkabau yang disurvei di rantau	192
TABEL V.31	Jumlah isteri sekarang, jumlah yang telah diceraikan dan jumlah semua isteri dari orang Minangkabau yang disurvei di rantau, maupun orang Minangkabau yang disurvei di Sumatera Barat dan ulama serta penghulu yang disurvei di Sumatera Barat	193
TABEL V.32	Asal dari isteri	195
TABEL V.33	Tahun kelahiran orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut asal isteri	198
TABEL V.34	Okupasi utama orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut kelompok etnis terhadap siapa mereka senang atau enggan bergaul	204
TABEL V.35	Umur dan jenis kelamin pasien jiwa suku Minangkabau di Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta	213
TABEL V.36	Okupasi dan jenis kelamin pasien jiwa orang Minangkabau di Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta	214
TABEL V.37	Jumlah dan nilai wesel pos yang diterima dan dikirim melalui Kantor Pos di Sumatera Barat, 1968–1970	217
TABEL V.38	Jumlah dan nilai wesel pos yang diterima dari rantau di Silungkang dan Kota Gedang tahun 1970	219

TABEL V.39	Frekuensi pengiriman dan penerimaan surat dari dan ke kampung dari orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut okupasi utama di rantau, kelompok umur dan masa pergi merantau	221
TABEL V.40	Frekuensi pengiriman dan penerimaan uang/pemberian ke dan dari kampung dari orang Minangkabau yang disurvei di rantau menurut okupasi utama mereka, kelompok umur dan masa mereka pergi merantau	222
TABEL V.41	Masa pergi merantau menurut tiga macam pertanyaan	223
TABEL VI.1	Tataguna tanah (land use) di Sumatera Barat (1971)	231
TABEL VI.2	Tekanan ekologis dan intensitas migrasi	234
TABEL VI.3	Hasil pertanian dan perikanan di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, 1967	235
TABEL VI.4	Produksi beras di Aceh tahun 1966 dan 1967 (dalam ton) . .	236
TABEL VI.5	Faktor lokasi dan intensitas migrasi	237
TABEL VI.6	Tekanan ekologi dan tekanan lokasi menurut intensitas migrasi	238
TABEL VI.7	Paradigma untuk faktor-faktor ekologi dan lokasi dari migrasi	239
TABEL VI.8	Kepadatan penduduk, ratio penduduk per hektare sawah dan intensitas migrasi	240
TABEL VI.9	Ratio penduduk per hektare sawah dan ratio kepadatan penduduk per KM ² menurut intensitas merantau	241
TABEL VI.10	Alasan untuk Merantau (respon berganda) untuk pertanyaan terbuka: "Apakah yang membuat Anda pergi merantau?" .	249
TABEL VI.11	Tekanan ekonomi menurut intensitas migrasi	253
TABEL VI.12	Tekanan kependudukan menurut intensitas migrasi	255
TABEL VI.13	Tekanan ekonomi dan tekanan kependudukan menurut intensitas migrasi	256
TABEL VI.14	Tekanan pendidikan menurut intensitas migrasi	260
TABEL VI.15	Daya tarik kota menurut intensitas migrasi	263
TABEL VI.16	Kegelisahan politik menurut intensitas migrasi	265
TABEL VI.17	Ratio Kelompok umur (Sensus 1961)	271

	Halaman
TABEL VI.18 Tempat untuk tidur setiap kali pulang ke kampung ibu	282
TABEL VI.19 Faktor pelembagaan sosial dari migrasi dan intensitas migrasi	288
TABEL VI.20 Intensitas migrasi dari antara 12 suku bangsa utama di Indonesia	289
TABEL VI.21 Faktor-faktor migrasi	290
TABEL VI.22 Faktor-faktor yang mendorong orang Minangkabau merantau dalam perspektif waktu	293
TABEL VI.23 Tipologi umum migrasi menurut William Petersen	296
TABEL VI.24 Tipologi migrasi di Indonesia sejak 1900	297
TABEL VII.1 Piramida penduduk asli Kota Gedang, 1967	302
TABEL VII.2 Tingkat perceraian dan poligami (sensus 1930)	307
TABEL VII.3 Ratio nikah, talak dan rujuk di Sumatera Barat (1960–1970)	308

DIAGRAM

Halaman

II.1	Kecenderungan migrasi dari beberapa suku bangsa di Indonesia, 1930–1961	56
IV.1	Peranan dan kekuatan orang Cina, Minangkabau dan Melayu Palembang dalam kegiatan perdagangan di Palembang	113
VI.1	Trend ekonomi dan populasi di Sumatera Barat	252
VI.2	Faktor-faktor yang mendorong orang Minangkabau merantau dalam perspektif waktu	296

PETA

1.	Peta Sumatera Barat	18
2.	Peta Minangkabau dan Rantau	65
3.	Peta daerah kakilima di Senen, Jakarta (Keadaan September 1970)	119

KATA PENGANTAR

Naskah asli dari buku ini yang berjudul: "Merantau: Minangkabau Voluntary Migration" semula adalah sebuah disertasi Ph.D. yang saya sampaikan pada Department of Sociology, University of Singapore, tahun 1973. Agar naskah ini dapat dibaca oleh kalangan yang lebih luas di Indonesia, naskah ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press. Hal ini dimungkinkan berkat bantuan dan dorongan dari Ford Foundation, Jakarta, terutama melalui jasa-jasa baik dari guru dan sahabat saya, Dr. Peter Weldon. Saya oleh karena itu merasa sangat berhutang budi atas kebaikan hati dari Ford Foundation, karena tanpa bantuan tersebut penterjemahannya maupun penerbitannya rasanya tidaklah akan mungkin terlaksana.

Penghargaan serta terima kasih yang tak terhingga juga saya tujukan kepada kedua sahabat saya, Sdr. Ansari dan Rustam St. Rumah Tinggi, yang telah bersusah payah memindahkannya ke dalam Bahasa Indonesia. Kecuali segi editing dan perbaikan bahasa di sana-sini, buku ini saya usahakan sama dengan aslinya. Saya berpikir, lebih baik menjaga keasliannya daripada merombak atau merubah isinya. Dengan demikian pembaca yang sekarang ini dapat pula turut mengemukakan kritik dan tegur sapanya. Lagi pula, menulis sesuatu yang baru lebih baik daripada merombak atau merubah isi yang telah ada.

Sebagaimana yang saya kemukakan pada Kata Pengantar dari naskah aslinya, dorongan untuk melakukan studi Merantau ini datang dari segala pihak, terutama sejak saya mulai mendirikan Center for Minangkabau Studies tahun 1968 di Padang. Sementara saya melakukan berbagai kegiatan penelitian dan turut mengelola kegiatan-kegiatan seminar, simposia, diskusi, dsb., di Sumatera Barat, perhatian saya makin lama makin tertarik akan fenomena merantau yang khas dari suku Minangkabau ini yang orang lain belum pernah merancang masalahnya secara serius. Sambil berjalan saya telah mulai mengumpulkan data dan informasi mengenai itu. Namun usaha yang benar-benar sistematis ke arah itu baru saya mulai setelah saya berhasil mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation, Bangkok, tahun 1970, untuk melakukan penelitian mengenai fenomena menarik ini. Dalam rangka kegiatan penelitian ini saya telah menjalani banyak daerah dan desa-desa di Sumatera Barat dan karena kegiatan ini pula saya telah sempat menjelajahi banyak rantau di Indonesia, sampai-sampai ke Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Pekalongan, Surabaya, Malang, Bali, Ampenan, Makassar (sekarang Ujung Pandang), dan juga ke berbagai rantau di Malaysia dan Singapura, di mana orang Minangkabau banyak ditemukan. Seolah-olah saya telah merantau pula dengan melakukan studi merantau ini.

Dalam rangka ini juga sebuah perjalanan studi juga saya lakukan ke Sulu dan Mindanao di Pilipina untuk menjelajahi sampai di mana jauhnya kemungkinan hubungan antara Minangkabau dan kepulauan Sulu dan Mindanao di masa dahulu melalui tradisi merantau ini. Hal ini dimungkinkan oleh sebuah *travel grant* dari Asia Foundation di Kuala Lumpur yang sebelumnya telah membawa saya pulang ke Canberra, Australia, untuk menghadiri Kongres Internasional para Orientalis (International Congress of Orientalists) yang ke 28, pada bulan Januari 1971, dan membacakan kertas kerja mengenai "Merantau," sebuah topik yang agaknya aneh di tengah-tengah studi keindonesiaaan yang selama ini berat ke Jawa.

Saya juga beruntung dan berterima kasih sekali dengan fellowship yang diberikan oleh Institute of Southeast Asian Studies di Singapura yang karenanya saya sempat selama sembilan bulan (Maret sampai Desember 1971) memproses data-data yang saya kumpulkan dan memanfaatkan IBM data processing system dari Universitas Singapura, di samping menikmati dan mengambil manfaat dari koleksi perpustakaan ISEAS yang luas itu.

Untuk menuliskan hasil-hasil penemuan penelitian ini dalam bentuk disertasi, Ford Foundation sekali lagi telah pula bermurah hati memberikan kepada saya post graduate fellowship yang karenanya memungkinkan saya untuk mendaftar sebagai kandidat Ph.D. dalam Sosiologi dan mempersembahkan hasil penelitian ini sebagai disertasi. Perlu saya tambahkan bahwa kuliah-kuliah Ph.D. dalam Sosiologi sebelumnya telah selesaikan di New York University, New York.

Rasanya tidaklah mungkin bagi saya untuk menyebutkan satu per satu bantuan-bantuan yang telah saya terima dari bermula sampai selesai, mengingat telah demikian banyaknya dan dari berbagai pihak. Namun kuranglah pada tempatnya jika saya tidak menyebutkan dengan sengaja beberapa nama yang tanpa mereka pastilah pekerjaan ini tidak akan mungkin jadi. Pertama-tama penghargaan dan rasa hormat saya, saya tujukan pada Bapak Prof.Drs.H.Harun Al Rasjid Zain, waktu itu Gubernur Sumatera Barat, yang sejak dari semula telah mendorong saya untuk melakukan pekerjaan ini dan membantu saya dengan moral maupun material dalam melakukan program-program kegiatan penelitian dan seminar dari Center for Minangkabau Studies sewaktu di Padang. Rasa terima kasih saya juga saya tujukan pada Ford Foundation, ISEAS dan Asia Foundation yang dengan bantuan lembaga-lembaga tersebut telah memungkinkan saya melakukan studi ini. Penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya saya tujukan kepada para advisor dan supervisor saya di Universitas Singapura: Professor Hans-Dieter Evers, Dr.Geoffrey Benjamin dan Dr.Peter Weldon, yang telah membimbing dan membantu saya sampai selesai. Kepada kawan-kawan dan para sahabat yang tak mungkin disebutkan satu per satu namanya, baik yang di Sumatera Barat mau-

pun yang di rantau, saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan dan kebaikan hati mereka.

Akhirnya mungkin akan terlalu bersifat pribadi jika saya sebutkan di sini bahwa tanpa dorongan semangat, kesabaran dan pengertian yang mendalam dari isteri saya sendiri, usaha ini kiranya tidak akan mungkin terlaksana. Saya persembahkan tanda mata ini kepadanya.

MOCHTAR NAIM

Ujung Pandang, Desember 1979.

SEPATAH KATA

Riwayat migrasi adalah setua riwayat manusia. Orang mungkin bermigrasi karena terpaksa, diatur atau tidak diatur, berkelompok atau secara perorangan. Sebagai pendorong mungkin keadaan alam (termasuk bencana alam), keadaan politik, keadaan ekonomi atau kelangkaan berbagai fasilitas. Walaupun dalam keputusan bermigrasi berbagai faktor mempengaruhi, secara umum kiranya faktor ekonomi dapat dianggap dominan.

Faktor psikologi sosial jelas mengambil bagian pula karena tindakan ini menyangkut suatu pengambilan keputusan yang penting bagi seorang atau keluarga yang bersangkutan. Bermigrasi sering merupakan keputusan yang begitu penting karena dapat merubah jalan hidup seseorang atau kelompok dan juga keturunan mereka secara fundamental.

Migrasi mempengaruhi daerah pengirim dan daerah penerima secara demografis -- jumlah, golongan umur dan komposisi seks. Mereka yang pergi cenderung pada usia kerja dan lebih banyak laki-laki. Kenyataan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi secara berarti, dilihat dari ketenaga-kerjaan dan arus uang yang terjadi. Secara sosiologis impaknya dapat dilihat pada kehidupan sosial di daerah pengirim dan di daerah penerima. Sejalan dengan itu terjadi arus informasi yang intensitasnya berkorelasi dengan arus migrasi tersebut.

Dimensinya demikian banyak, faktor-faktor yang mempengaruhi kait-mengait. Berbeda dengan kelahiran dan kematian, perulangan dapat terjadi pada individu yang bermigrasi. Karena itu studi migrasi menyajikan kesempatan yang tidak habis-habisnya bagi mereka yang berminat menggalinya.

Indonesia mengenal suatu bentuk migrasi antar pulau yang khas, yang dinamakan transmigrasi. Tentang ini telah terdapat literatur yang memadai.¹ Dapat diharapkan bahwa di masa mendatang studi tentang transmigrasi akan meningkat baik jumlah maupun mutunya, mengingat prioritasnya yang begitu tinggi pada Pelita III ini. Di samping itu perhatian cukup banyak diarahkan kepada masalah urbanisasi dan ini pun akan tetap merupakan topik yang hangat untuk masa-masa

1. Lihat P.A. Meyer, dan C. MacAndrews, *Transmigration in Indonesia; an annotated bibliography*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1978.

mendatang.² Topik yang lain yang perlu disebutkan di sini adalah migrasi sirkuler (*circular migration*), yaitu bentuk mobilitas penduduk yang tidak menetap di daerah tujuan. Menurut Dr. Mantra migrasi sirkuler ini dapat berbentuk *nglaju* (*commuting*) atau *mondok*, yakni menginap di daerah tujuan. Referensi yang penting mengenai topik tersebut untuk Indonesia adalah hasil penelitian Hugo di Jawa Barat dan Mantra di Daerah Istimewa Yogyakarta.³

Salah satu topik yang lainnya yang tidak begitu banyak disentuh tetapi secara mendalam dijamah oleh buku Dr. Mochtar Naim ini adalah pola migrasi dari suku bangsa tertentu, dikaitkan dengan organisasi sosial dan nilai-nilai sosial masyarakat yang bersangkutan. Beberapa studi utama yang telah dilakukan sebelumnya adalah oleh Dr. Vredenbregt tentang Bawean, Dr. Cunningham mengenai migrasi Batak Toba ke Sumatera Timur dan Dr. Bruner mengenai kelanggengan sistem sosial tradisional para migran Batak Toba di Medan dan selanjutnya ekspresi kesukubangsaan pada migran Batak, Jawa dan Minangkabau di Bandung.⁴

Di dalam buku ini Dr. Mochtar Naim menggunakan pendekatan dan metodologi yang khas, yang berbeda dengan studi yang diadakan sebelumnya. Dia berusaha sejauh mungkin mengukur volume migrasi Minangkabau dengan mengadakan proyeksi berlandaskan angka sensus 1930 dan intensitasnya dibandingkan dengan berbagai suku bangsa lainnya; tinjauan sejarah daripada rantaui mencakup jangka waktu lebih 13 abad dan untuk 7 dekade terakhir dibuat pentahapan yang jelas; perpindahan perantau di luar Minangkabau dan pola kehidupan mereka ditelaah secara terperinci; pelbagai faktor yang mempengaruhi dianalisa secara menarik, lalu diakhiri dengan bab tentang efek dan prospek merantau.

2. Lihat daftar literatur pada M. Singarimbun, *The population of Indonesia: a bibliography (1930–1972)*, Yogyakarta, Institute of Population Studies, 1974. Suharso, *Pola perpindahan penduduk dan urbanisasi di Jawa: faktor-faktor yang mempengaruhi dan proses kejadiannya*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada (disertasi), 1978. Suharso et al., *Rural-urban migration*, Jakarta, LEKNAS, LIPI, 1976. Lihat juga majalah *Widyapura* dan *Kotapraja*.
3. Grame J. Hugo, *Population mobility in West Java*, Gadjah Mada University Press, 1978. I.B. Mantra, *Population movement in wet rice communities: a case study of two dukuh in Yogyakarta Special Region*. Honolulu, University of Hawaii (disertasi), 1978.
4. J.G. Vredenbregt, *De Baweaners in hun moederland en in Singapore*. Leiden, University of Leiden (disertasi), 1968. C.E. Cunningham, *The postwar migration of the Toba-Bataks to East Sumatra*, New Haven, Yale University, 1958. E.M. Bruner, "Urbanization and ethnic identity in North Sumatra." *American Anthropologist*, 63 (3), hal. 508 – 521. E.M. Bruner, *The Expression of Ethnicity in Indonesia*, SEADAG Papers on Problems of Development in Southeast Asia, 1972.

Bab demi bab buku ini menyajikan berbagai hal yang menarik, sebagai hasil dari tinjauan migrasi khas Minangkabau, dikaitkan dengan struktur sosial, sejarah politik ekonomi regional dan nasional, malah juga di luar tapal batas Indonesia. Suatu hal yang dalam beberapa kesempatan diungkapkan oleh Dr. Mochtar Naim, yang kami ulangi di sini, adalah hubungan antara kecenderungan bermigrasi suku bangsa Minangkabau dengan struktur sosial mereka.⁵

Menurut dia ekologi, geografi, ekonomi, pendidikan dan aspirasi yang lebih tinggi, daya tarik dan keresahan politik adalah faktor-faktor penentu yang mempengaruhi intensitas migrasi pada suku bangsa Minangkabau, Batak, Menado dan Ambon; pada masyarakat Bugis faktor utama adalah geografi dan keresahan politik. Namun hanya pada masyarakat Minangkabau terdapat faktor pendorong tambahan untuk bermigrasi, sebagai akibat dari kedudukan laki-laki dalam struktur sosial. Laki-laki Minangkabau dirundung dilema. "Di rumah isterinya dia dianggap sebagai tamu (samando). Dia dihormati, tapi tanpa hak dan kekuasaan. Di rumah ibunya dia didudukkan sebagai mamak, sebagai pengawal dari keluarga, tapi tanpa hak untuk ikut menikmati hasil dari sawah ladang yang dapat dibawanya ke rumah isterinya."

Buku ini tidak hanya penting artinya dari sudut metodologi dan penemuan yang menarik, tetapi juga mengandung informasi yang amat kaya tentang masyarakat Minangkabau, di Minang dan di rantau, dahulu dan sekarang. Dengan terbitnya buku ini dalam bahasa Indonesia, Dr. Mochtar Naim memberikan sumbangsih yang amat berharga kepada kepustakaan Indonesia mengenai migrasi, yang masih begitu langka.

Dr. Masri Singarimbun

5. Lihat M. Naim, "Voluntary migration in Indonesia," A.H. Richmond dan D. Kant, (eds.), *Internal migration; the new world and the third world*, London, SAGE Publications, 1976, hal. 148–183. Karangannya yang lain, lihat dalam daftar publikasi buku ini.

1. Tujuan dan ruang lingkup studi

Masyarakat Indonesia modern sukar dapat dipahami tanpa menghubungkannya dengan gerakan perpindahan penduduk di Nusantara ini. Kebanyakan daerah-daerah di Indonesia sekarang mempunyai minoritas-minoritas etnis sebagai akibat dari mobilitas penduduk tersebut. Kota-kota besar khususnya mencerminkan perubahan pola-pola kependudukan dari masyarakat Indonesia yang berbilang suku ini. Orang Minangkabau terutama termasuk kelompok yang paling banyak bergerak. Kebiasaan 'merantau' dari orang Minangkabau kiranya bukan hanya sekarang saja, tapi telah melembaga, yang karenanya telah banyak menarik perhatian dari para ahli.¹ Namun anehnya, sebagaimana dinyatakan oleh Taufik Abdullah, "belum pernah ada studi yang seksama tentang aspek kehidupan Minangkabau ini, sekalipun tradisi merantau umum dikenal sebagai ciri penting dari masyarakat Minangkabau."² Seminar tentang sejarah dan kebudayaan Minangkabau yang dilaksanakan di Batu Sangkar (bekas pusat Kerajaan Pagaruyung) di tahun 1970 juga menyimpulkan bahwa pengkajian yang mendalam tentang merantau yang sifatnya lebih sistematik perlu diadakan untuk mencari sebab-akibat dari gejala sosial ini.³

Merantau juga mempunyai implikasi praktis bagi perkembangan sosial-ekonomi daerah ini. Pengaruh merantau terhadap kondisi ekonomi dan sosial Sumatera Barat sampai dewasa ini nampaknya bertambah besar, sebab yang merantau justru kaum muda yang punya potensi ekonomi dan potensi kerja lebih besar. Praktis seluruh kaum cendekiawan terbaik, pedagang dan pengusaha yang paling berhasil, meninggalkan kampung mencari 'arena tantangan yang lebih membuka banyak kemungkinan. Yang tinggal di kampung ialah anak-anak, kaum wanita dan mereka yang dianggap kurang berambisi. Oleh sebab itu merantau adalah masalah sosial yang mengancam daerah Minangkabau dewasa ini, terutama karena pembangunan daerah justru sekarang mendapat perhatian besar.

Dari sudut teori, para ahli sosiologi dan ilmu sosial lainnya yang menujukan minatnya kepada studi migrasi seolah-olah telah melalaikan kasus istimewa dari kebiasaan migrasi ini, suatu hal yang di Barat barangkali tidak banyak dikenal, namun di Asia merupakan gejala yang biasa terjadi. Referensi dalam buku-buku maupun karangan-karangan lainnya tentang migrasi dengan kemauan sendiri seperti ini jarang sekali ditemukan kalaupun tidak akan dikatakan tidak ada sama sekali.⁴ Sampai kini studi-studi tentang migrasi selalu ditekankan pada migrasi

internasional, baik yang dilakukan dengan kemauan sendiri, atau yang disebabkan oleh peperangan maupun oleh pergolakan politik, atau pada migrasi dalam mencari pekerjaan.⁵ Sebaliknya studi tentang migrasi di Indonesia selalu dipusatkan kepada dua hal pokok: migrasi orang Cina ke Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya di Asia Tenggara,⁶ dan 'transmigrasi' orang Jawa ke Luar Jawa.⁷

Studi tentang merantau -- yang akibatnya mempunyai jangkauan jauh terhadap kondisi sosial-ekonomi dan kebudayaan di Sumatera Barat selama ini-- telah diabaikan, pada hal studi semacam ini benar-benar diperlukan, baik untuk alasan-alasan praktis maupun teoretis. Studi ini adalah suatu usaha untuk mengisi kebutuhan tersebut dan berusaha menganalisa masalah merantau sebagai gejala sosial yang berakar jauh di dalam keseluruhan sistem sosial budaya dari masyarakat bersangkutan. Kita akan mencoba menggali sebab-akibat gejala ini dengan mempergunakan pendekatan banyak segi (*multi-faceted approach*) sambil mengemukakan empat masalah pokok: (a) Siapakah yang merantau ini; (b) Mengapa mereka merantau; (c) Kemana mereka merantau; dan (d) Apakah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan merantau itu.⁸ Lalu, untuk melebarkan pandangan kita tentang merantau, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) juga dilakukan. Studi ini di mana perlu melakukan perbandingan-perbandingan dengan migrasi yang dilakukan oleh golongan masyarakat lain di Indonesia, baik yang bersamaan atau berbeda dalam satu atau lain segi.⁹ Malahan sebenarnya jalan terbaik yang dapat ditempuh untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang kebiasaan merantau orang Minangkabau hanyalah dengan memperbandingkannya dengan tradisi-tradisi lain. Sebagai akibat dari cara pendekatan ini juga diusahakan untuk merumuskan sebuah typologi migrasi di Indonesia, baik sebagai persembahan kepada studi tentang migrasi di Indonesia, maupun sebagai batu loncatan untuk riset-riset selanjutnya.

2. Definisi "Merantau"

Adalah penting kiranya untuk pada saat ini memberikan definisi tentang istilah "merantau" yang justru merupakan masalah pokok dari studi kita ini. "Merantau," untuk jelasnya, berarti "migrasi," tetapi "merantau" adalah type khusus dari migrasi dengan konotasi budaya tersendiri yang tidak mudah dijemahkan ke dalam bahasa Inggeris atau bahasa barat manapun. "Merantau" adalah istilah Melayu, Indonesia dan Minangkabau yang sama arti dan pemakaianya dengan akar kata "rantau."¹⁰ "Rantau" menurut Winstedt,¹¹ Iskandar¹² dan Purwadarminta,¹³ ialah kata benda yang berarti dataran rendah atau daerah aliran sungai, jadi biasanya terletak dekat ke- atau bahagian dari daerah pesisir. "Merantau" ialah katakerja yang berawalan "me—" yang berarti "pergi ke rantau." Tetapi dari sudut sosiologi, istilah ini sedikitnya mengandung enam unsur pokok berikut:

- (1) Meninggalkan kampung halaman
- (2) dengan kemauan sendiri
- (3) untuk jangka waktu lama atau tidak
- (4) dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman
- (5) biasanya dengan maksud kembali pulang, dan
- (6) Merantau ialah lembaga sosial yang membudaya.

Kriteria pertama (yakni "meninggalkan kampung halaman pergi merantau") memberi ruang bergerak untuk menafsirkan pengertian "jarak" menurut perkembangan waktu, kendatipun konotasi pergi ke rantau pabila saja tetap ada. Oleh sebab itu, di masa dahulu ketika tanah air orang Minangkabau masih terbatas kepada Luhak yang Tiga, pergi ke pantai timur atau ke pantai barat sudah dipandang "merantau." Namun, sekalipun wilayah Minangkabau kemudian bertambah luas dan mencakup seluruh pantai barat dan bahagian terbesar pantai timur Sumatera bagian tengah, istilah "merantau" tetap dapat dipakai bila orang pergi ke tempat yang disebutkan tadi. Jadi seseorang dari Bukittinggi atau tempat lain di pedalaman sudah menganggap dirinya merantau, sekalipun dia hanya pergi ke Padang. Malah dalam percakapan sehari-hari pergi hanya ke kota yang dekat saja dengan tujuan yang dimaksudkan di atas sampai akhir-akhir ini masih dianggap sebagai merantau.¹⁴

Tetapi dewasa ini, karena Sumatera Barat dari sudut politik dan budaya telah menjadi satu wilayah, dan penduduk Sumatera Barat tidak lagi menganggap dirinya terbagi-bagi ke dalam berbagai sub-kelompok, mereka jadi terbiasa menggunakan kata merantau hanya untuk bepergian ke luar Sumatera Barat. Pengertian yang inilah dari istilah "merantau" yang kita pakai sebagai definisi kerja dalam studi ini. Barulah apabila seseorang pergi ke luar daerah budayanya dengan kemauan sendiri dapat dipandang sebagai perbuatan merantau, dan ini selanjutnya mengandung makna bahwa orang yang merantau tersebut bukan lagi berkomunikasi dan berinteraksi hanya dengan kaum kerabatnya atau anggota kelompok etnisnya, melainkan juga dengan orang yang latar belakang etnis dan kulturnya berbeda-beda.

Dari segi sosiologi migrasi, belum pernah ada satupun definisi tentang "migrasi" yang secara universal diterima atau disepakati sekalipun ukuran yang dipakai oleh berbagai penulis secara umum bertumpang-tindih. Salah satu kriteria yang demikian ialah yang dipakai oleh Mangalam yang menekankan pada "*relatively moving away from one geographical location to another*" (secara relatif berpindah dari sebuah lokasi geografis yang satu kepada yang lain)¹⁵ —hal. mana tidak sejalan dengan butir 3 dan 5 dari kriteria yang kita pakai tentang merantau— sekalipun hal ini memberi pengecualian pada "*seasonal migration*" (migrasi mu-

siman) yang sekarang terkenal di Eropah Barat dan berbagai bagian di Afrika.¹⁶ Dalam definisi ini tidak ada dibuat pembatasan apakah migrasi dilakukan dengan kemauan sendiri atau tidak --sebab ia mungkin salah satu ataupun keduanya-- sedangkan dengan merantau justru kemauan sendiri itulah yang membuatnya berbeda dari migrasi jenis lain. Ciri "kemauan sendiri" dari merantau harus ditekankan di sini, oleh sebab inilah yang membedakannya dari jenis migrasi yang "non-voluntair" yang secara umum diasosiasikan dengan transmigrasi orang Jawa ke Luar Jawa. Orang Jawa (sekalipun, sebagaimana akan kita lihat pada bab berikut, mereka secara luas tersebar di seluruh Indonesia) tidak punya tradisi yang mendorong mereka untuk merantau kendatipun keadaan lingkungan internnya sebenarnya memaksa mereka berbuat demikian. Transmigrasi ialah perpindahan penduduk yang direncanakan dan dirangsang dari pulau Jawa yang padat itu (di mana terdapat tiga per lima dari seluruh penduduk Indonesia) ke pulau-pulau di luar Jawa yang jarang penduduknya, dan diatur oleh pemerintah. Sebab itulah di sini kita tidak memasukkan transmigrasi ke dalam konteks merantau.

Beberapa penulis, bagaimanapun, menggarisbawahi perlunya unsur "*volition*" (kemauan sendiri) dan memasukkannya ke dalam definisi migrasi mereka. Umpamanya, oleh Brinley Thomas, migrasi dipandang sebagai "gerakan perpindahan (termasuk perubahan tempat tinggal tetap) dari satu negeri ke negeri lain yang terjadi disebabkan kemauan sendiri dari yang bersangkutan, baik secara perorangan atau per kelompok."¹⁷ Namun begitu, tidak ada disebutkan perbedaan apakah perorangan atau kelompok yang pindah itu merencanakan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakannya di tempat tinggal yang baru (sebagaimana kita tunjukkan pada butir 4 kriteria merantau kita).

Dalam kebanyakan literatur tentang migrasi tidak ditemukan kesepakatan mengenai lamanya menetap yang membedakan migrasi dari kunjungan biasa, sekalipun biasanya ada diberikan beda antara migrasi sementara dengan migrasi permanen. Bagaimanapun, saran dari Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai istilah migrasi internasional ialah: kepergian sejama setahun atau lebih harus dipandang sebagai migrasi, sedangkan menetap untuk jangka waktu yang lebih pendek harus digolongkan sebagai kunjungan.¹⁸ Mengenai merantau, bukanlah lama menetap di rantau itu sendiri (butir 3) yang membedakannya dari kunjungan biasa, melainkan adanya tujuan (butir 4) dan pengertian bahwa merantau pada dasarnya ialah migrasi temporer (butir 5), sekalipun ia mungkin berakhir dengan menetap buat selamanya.

Disebabkan pokok-pokok diataslah bahwa pengertian Eisenstadt tentang "meninggalkan susunan sosial tertentu dan memasuki yang lain dan berbeda"¹⁹ tidak begitu tepat untuk studi tentang merantau. Dengan merantau, setidak-

tidaknya dalam konsepsi idealnya, identifikasi maupun pengasosiasian dengan budaya yang lama adalah merupakan ciri tetap, sedangkan bermukim di rantau hanyalah cara untuk mencapai tujuan (merantau). Tidak dapat dimungkiri adanya kenyataan bahwa "salang-budaya" (*cultural borrowings*) dan penyesuaian sosial akan terjadi dengan merantau, akan tetapi pengertian dasar tetap bahwa merantau bukan perpindahan permanen dan bukan pula meninggalkan susunan sosial tertentu. Studi seperti yang dilakukan Cunningham,²⁰ Brunner²¹ dan Liddle²² tentang migrasi orang Batak ke Sumatera Timur dan Jawa, dan banyak lagi studi tentang migrasi mencari pekerjaan (*labor migration*) di Afrika²³ dan Amerika Latin²⁴ dengan jelas mengungkapkan bahwa migrasi tidak perlu terjadi dengan meninggalkan susunan sosial dan kultural yang lama, terutama kalau jenis migrasi itu digolongkan sebagai internal, sementara, ataupun musiman. Dalam banyak hal mereka yang bermigrasi itu justeru baru menemukan identitasnya yang sesungguhnya setelah mereka pindah ke tempat lain, berinteraksi dengan orang yang berlatarbelakang etnis dan kultural yang berlainan, dan menjadi minoritas di tengah-tengah suku bangsa lain.

Kriteria keenam yang harus ditambahkan sebagai hal yang pokok kepada tradisi merantau orang Minangkabau --tapi tidak mutlak perlu bagi pola migrasi pada golongan masyarakat lain-- ialah bahwa merantau melembaga secara sosial dan budaya, sedangkan hal ini tidak harus terdapat pada migrasi pada umumnya. Di bagian berikut akan kita bicarakan segi ini dengan agak mendalam.

Ringkasnya: mengingat banyaknya aneka ragam konsepsi dan definisi tentang migrasi, kita cenderung mempunyai asumsi bahwa "migrasi" lebih merupakan istilah umum, atau *common denomination*, untuk segala jenis perpindahan tempat tinggal, dekat atau jauh, dengan kemauan sendiri atau tidak, untuk sementara atau untuk selamanya, dengan atau tanpa tujuan yang pasti, dengan atau tanpa maksud untuk kembali pulang, melembaga secara sosial dan kultural atau tidak. Akan tetapi "merantau," sebagaimana telah kita lihat di bagian ini, adalah suatu jenis migrasi yang dibatasi oleh keenam kriteria yang disebutkan di atas.

3. Merantau dalam rangka studi migrasi: Suatu kerangka konsepsi

Migrasi dalam bentuknya yang manapun juga, sebagaimana ditegaskan oleh Ronald B. Dixon,²⁵ selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia semenjak permulaan sejarah manusia. "Sebab-sebab umumnya yang dapat diperhatikan pada migrasi primitif," katanya, "terus berlaku sampai sekarang, sekalipun dengan tekanan pengertian yang telah berubah dan dalam bentuk

yang sedikit berlainan.”²⁶ Dixon mengelompokkan penyebab-penyebab itu ke dalam dua golongan besar: golongan fisik, seumpama bencana alam yang tiba-tiba dan perobahan iklim; dan golongan sosial-ekonomis, seumpama pengusiran besar-besaran, kalah perang oleh pendatang yang menyerang dan motivasi-motivasi yang lebih sukarela, seperti keinginan untuk mengeksploitasi kemungkinan ekonomi baru atau menaklukkan negeri baru.²⁷ Sebab itu migrasi sebagai bagian dari tabiat manusia secara definitif ditentukan atau diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Migrasi itu sendiri, dalam bentuk apapun juga, bukanlah jenis satu-satunya dari gerakan manusia sepanjang perjalanan sejarah, sebagaimana dikemukakan oleh Julius Isaac secara tepat. Dalam studinya, yang berjudul *Economics of Migration*,²⁸ Julius Isaac mengelompokkan gerakan perpindahan manusia ke dalam empat klasifikasi: *invasi*, *penaklukan*, *kolonisasi* dan *migrasi*. Ia memberi definisi *invasi* sebagai gerakan pembidasan atas penduduk primitif dalam wilayahnya sendiri dan merubah wilayah tersebut menjadi negara yang lebih maju.²⁹ Invasi orang Hun dan orang Magyar ke Eropah serta bangsa Tartar ke Asia Kecil di Abad Pertengahan merupakan contoh semacam ini. Gerakan itu mungkin berlangsung terus selama beberapa generasi sebelum kelompok-kelompok itu menetap untuk selamanya. *Penaklukan* adalah kebalikannya: “sebuah negara yang maju menyerang rakyat lain yang kurang maju lalu mencaplok wilayah taklukan tersebut ke dalam sistem politik mereka.”³⁰ Penaklukan itu, bagaimanapun, bisa saja tidak melibatkan jumlah penduduk yang besar dari negara penakluk, tetapi dapat berakibat gerakan perpindahan penduduk secara massal dari wilayah yang ditaklukkan.

Isaac membagi *kolonisasi* ke dalam dua jenis utama: *koloni eksplorasi* dan *koloni pemukiman*. Yang pertama biasanya hanya melibatkan sejumlah kecil kaum pedagang, pejabat pemerintah dan tentara yang dipindahkan dari negara ibu, sedangkan budak atau buruh kontrak dikumpulkan untuk penyediaan tenaga kerja yang diperlukan. Kolonisasi dari jenis yang kedua terjadi --seperti dikatakan oleh Fairchild-- ”bila negara yang telah kokoh berdiri, progresif dan berhasrat besar mengirim rombongan warganegaranya keluar negerinya, biasanya secara resmi, untuk bermukim di suatu lokasi tertentu. Daerah-daerah yang dipilih itu adalah daerah yang baru ditemukan atau negeri-negeri yang jarang penghuninya, di mana penduduk aslinya begitu kecil jumlahnya, atau tingkat budayanya begitu rendah, sehingga mereka memberikan perlawanan yang hampir tidak berarti terhadap masuknya para kolonis tersebut.”³¹ Koloni-koloni eksplorasi secara luas diasosiasikan dengan sejarah lama kolonisasi Eropah di Asia dan Afrika, sedangkan contoh koloni pemukiman dimisalkan oleh penemuan dan pemukiman di Dunia Baru (Amerika) dan Oceania.

Isaac kemudian membagi jenis keempat gerakan perpindahan migrasi tersebut ke dalam: *migrasi paksa* dan *migrasi bebas*. Kepada migrasi paksa dimasukkannya perdagangan budak, penjualan kawula, pembuangan orang asing atau bangsa sendiri yang tidak dikehendaki dan pembuangan orang hukuman. Di tahun-tahun belakangan ini juga termasuk gerakan perpindahan secara besar-besaran dari orang-orang preman dalam bentuk pelarian perang dan orang-orang tersingkir (*displaced persons*), pekerja paksa yang diciptakan oleh Perang Dunia Kedua (di mana jutaan orang sipil dari semua bagian di Eropah yang diduduki Nazi ditransfer ke Jerman lalu dipaksa bekerja untuk industri perang dan pertanian di Jerman) dan perpindahan penduduk yang terjadi di pelbagai bagian di Eropah dan di anak-benua India dengan terjadinya pemisahan India dan Pakistan. Di segi lain, migrasi bebas adalah "gerakan perpindahan dari perorangan yang merdeka dengan tujuan menukar tempat tinggal untuk selamanya."³²

Definisi "migrasi bebas" tersebut di atas yang justeru umumnya menjadi tumpuan studi kita ini secara konseptual agak bersifat restriktif. Sebagaimana halnya dalam banyak studi-studi lain tentang migrasi yang sering memberikan tekanan kepada sifat permanennya gerakan perpindahan itu, definisi demikian, walaupun mengecualikan orang yang bekerja pulang-balik (*commuters*), kaum pedagang keliling dan turis sebagai pendatang, tidak menyediakan cukup ruangan untuk kerangka konseptual yang menyeluruh dari merantau, di mana "kesemtaraan" dalam gerakan perpindahan merupakan bagian pokok. Tekanan secara implisit yang diberikan terhadap "perorangan" bebas juga tidak membantu kita memahami pelembagaan merantau sebagai tingkahlaku sosial yang terpolia.

Dalam bagian ini kita dapat memanfaatkan beberapa tulisan tentang migrasi untuk membangun sebuah kerangka konseptual tentang merantau, kearah mana semua informasi yang telah dikumpulkan dapat disusun. Sebelum ini, yakni dalam menguraikan kriteria utama merantau, kita telah memajukan sejumlah sifat-sifat (*properties*) atau bagian-bagian (*components*) yang berkenaan dengan lembaga ini. Pada saat ini penting kiranya kita meneliti beberapa dari antara sifat-sifat tadi dari segi tinjauan yang lebih struktural-fungsional lalu merumuskannya kembali ke dalam kerangka konseptual yang lebih umum.

(a) Merantau sebagai mobilitas regional

Pokok pemikiran dalam semua definisi tentang migrasi ialah bahwa ia berhubungan dengan peralihan tempat tinggal. "Memang," sebagaimana ditekankan oleh A.L. Mabogunje, "semua studi tentang migrasi berfokus pada aspek perpindahan tempat tinggal ini dan, secara sepintas ataupun mendetail, menyoroti

apa yang dilakukan oleh perantau di tempat tinggalnya yang baru.”³³ *The Encyclopaedia of the Social Sciences*, umpamanya, memberikan definisi migrasi sebagai “the movements of people over considerable distance and on a large scale with the intention of abandoning their former homes for some more or less permanent new domicile”³⁴ (gerakan perpindahan penduduk melintasi jarak yang cukup jauh dengan ukuran besar dengan maksud meninggalkan tempat tinggal semula menuju tempat tinggal yang baru yang kira-kira permanen). Eisenstadt berbicara tentang ”perpindahan fisik seseorang atau sekelompok orang dari suatu masyarakat tertentu ke masyarakat yang lain dengan meninggalkan bentuk sosial tertentu memasuki bentuk sosial yang lain.”³⁵ Hagerstrand berbicara tentang ”perubahan tempat tinggal dari suatu komune ke komune yang lain,”³⁶ Petersen tentang ”gerakan yang relatif permanen dari orang-orang melintasi jarak yang cukup jauh,”³⁷ dan Weinberg tentang ”perubahan tempat kediaman untuk selama-lamanya.”³⁸ Kita tahu bahwa definisi-definisi demikian tidak cukup memberi peluang dan wadah bagi maksud-maksud merantau, sebab bukanlah suatu keharusan bahwa tujuan merantau adalah untuk pindah secara permanen atau meninggalkan kampung asal untuk selamanya. Malah sebenarnya, dengan memakai ucapan Mabogunje, maksud merantau ialah ”mem-buat kampung halaman yang semula sebagai tempat yang lebih baik untuk kembali.”³⁹

Jelaslah konsep ini kira-kira sejajar dengan pengertian yang dipakai oleh A.L. Mabogunje dalam studinya tentang migrasi lokal di berbagai bahagian Afrika Barat.⁴⁰ ”Mobilitas regional” ini mencakup gerakan perorangan dan kelompok-kelompok individu melintasi batas-batas etnis atau batas nasional. Sekaligus konsep ini juga memberikan wadah kepada pengertian ”*step migration*” (migrasi bertahap) dan ”*repeated migration*” (migrasi berulang), yang keduanya adalah bagian dari pola merantau; dan oleh karena arahnya adalah ke pusat-pusat perkotaan, konsep ini juga mengandung pengertian gerakan ke kota.

(b) Merantau sebagai mobilitas ekonomi dan sosial

Dimensi yang disebutkan di atas yang pada dasarnya menekankan pada aspek mobilitas geografi juga membuka jalan pada timbulnya konsep merantau sebagai mobilitas ekonomi dan sosial, baik secara horizontal maupun vertikal. Sebagaimana dengan migrasi pada umumnya, terdapat motivasi ekonomi yang intrinsik melekat pada pengertian merantau.⁴¹ Biasanya kecenderungan untuk berpindah menjadi lebih terasa apabila keadaan ekonomi di kampung tidak lagi sanggup menahan mereka disebabkan oleh efek Malthus (yaitu, pertambahan penduduk yang terus menerus dengan ekonomi subsistensi pertanian yang statis), sedangkan dari luar, faktor-faktor penarik yang diakibatkan oleh pembangunan dan pemusatan kegiatan ekonomi di pusat-pusat perkotaan juga ber-

tambah kuat. Salah satu ciri dari determinasi ekonomi yang harus ditekankan di sini ialah bahwa mobilitas merantau dewasa ini sifatnya adalah innovatif. Sekalipun kebanyakan dari mereka berasal dari kampung, di mana keluarga-keluarga di kampung bekerja di bidang pertanian, namun praktis tidak ada di antara mereka yang mengulangi pekerjaan yang serupa itu di rantau. Sebagai hadap-hidup baru mereka berdagang, memberikan jasa-jasa dan melakukan pekerjaan otak yang dari sudut hasil finansial juga dapat dipandang sebagai mobilitas ekonomi yang menaik. Namun, sistem ekonomi lama dalam bentuk pertanian subsistensi selalu tersedia untuk menerima mereka kembali bila mereka gagal di rantau atau mengalami nasib kurang baik.

Dimensi merantau yang lebih kompleks tampak apabila orang juga memandangnya sebagai ekspresi mobilitas sosial. Seperti migrasi pada umumnya, merantau bukanlah tingkah laku yang acak sifatnya yang hanya dimiliki oleh individu tertentu atau bahkan strata sosial tertentu saja.⁴² Merantau merupakan bentuk tingkah laku sosial yang sifatnya kolektif dan berulang, yang dapat diramalkan dan melembaga. Selaku bagian dari sistem sosial ia umumnya timbul dari dalam (sekalipun sebagian juga dirangsang dari luar), dan sebab itu sebahagian dari motivasinya harus dicari dalam sistem sosial itu sendiri.

Untuk mengikuti pendekatan konseptual-struktural dari studi migrasi sebagaimana yang dibentangkan oleh J.J. Mangalam,⁴³ setidak-tidaknya ada tiga kriteria dari aspek sosial merantau ini yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Pertama terdapat "*collectivity of action*" (kolektivitas aksi); kedua "*the criterion of decision-making on the basis of a hierarchically ordered act of values or valued ends*" (kriteria bagi pembuatan keputusan atas dasar sekelompok nilai atau tujuan-tujuan yang mengandung makna nilai yang tersusun secara hirarkis; dan ketiga "*changes in the inter-actional system of the migrants*" (perubahan-perubahan dalam sistem interaksi dari para migran).

Kolektivitas, sejauh yang bertalian dengan merantau, menampik anggapan bahwa ia bersifat insidental, unik dan tidak dapat diramalkan. Sebagai akibatnya, setiap gerakan yang memperlihatkan salah satu dari ciri-ciri tersebut tidak dapat dipandang sebagai merantau. Kolektivitas sebagai suatu dimensi organisasi sosial merupakan hal pokok dalam studi sosiologis tentang merantau. Maksudnya, seperti Durkheim,⁴⁴ sementara alasan merantau bagi perorangan biasa berbeda-beda, perpindahan penduduk adalah kenyataan sosial yang hanya dapat diungkap dengan jelas dengan analisa sosiologis.

Kriteria untuk "membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai atau tujuan yang mengandung makna nilai yang tersusun secara hirarkis," seperti yang disarankan oleh Mangalam, sangat penting artinya jika kita ingin hendak me-

mahami dinamika proses migrasi. Mangalam berkata:

A more or less stable and on-going social organization implies a group of people living with a minimum satisfaction of their needs according to their values. When these minimum needs are not met by the existing conditions within a society or a sector of it, certain members entertain the thought of moving out of it and going to another society altogether or to a different sector of the same society where they perceive conditions more adequate to meet satisfactorily their unmet needs or relative deprivations.....⁴⁵

It is important to ask what deprivations at a given time a particular collectivity is willing to endure. It is assumed that the criteria used, whether the members articulate them fully and explicitly or not, are their values, expressed in terms of valued ends. Values are abstract in nature, but they have overt behavioral expressions, such as, for example, children's education, greater income, wanting to live close to friends, and freedom to worship. These valued ends might represent such values as family life, material comfort, friendship, and religious freedom. These values or the corresponding valued ends are ascribed differential importance in the minds of the collectivity -- which results in a hierarchy. The deprivations in the more highly valued ends are more important in the study of migrations.⁴⁶

(Suatu organisasi sosial yang lebih-kurang stabil dan sedang berlanjut terus mempunyai arti bahwa sekelompok manusia hidup dengan pemuasan minimal atas kebutuhannya sesuai dengan nilai-nilai yang mereka punyai. Apabila kebutuhan minimum ini tidak terpenuhi oleh kondisi yang ada di dalam masyarakat atau bagian dari masyarakat itu, segolongan anggota-anggota tertentu akan berfikir untuk meninggalkan masyarakat itu dan pergi ke masyarakat yang lain sama sekali atau ke suatu bagian yang berlainan dari masyarakat itu di mana mereka melihat kondisi yang lebih memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi itu, atau deprivasi yang mereka alami, dengan lebih memuaskan.

Adalah penting untuk menanyakan deprivasi apa -- pada suatu waktu tertentu-- yang sanggup diderita oleh kolektivitas tertentu. Dapat diduga bahwa kriteria yang dipakai (apakah anggota-anggota dari masyarakat itu menekankan kriteria itu sepenuhnya atau secara eksplisit atau tidak) adalah nilai-nilai mereka, yang dinyatakan dalam bentuk tujuan yang mengandung nilai. Nilai-nilai pada hakikatnya bersifat abstrak, tetapi nilai-nilai itu dapat dilihat dari ekspresi tingkahlaku yang dapat diamati, umpan-

manya saja, pendidikan anak-anak, pendapatan yang lebih besar, keinginan untuk hidup berdekatan dengan handai-taulan, dan kebebasan untuk memilih agama yang dianut. Ekspresi yang dapat diamati ini disebut tujuan yang mengandung nilai (valued ends). Tujuan yang mengandung nilai ini mungkin menggambarkan nilai-nilai seperti kehidupan keluarga, kelengkapan materi, persahabatan serta kebebasan beragama. Nilai-nilai ini, atau tujuan yang mengandung nilai seumpamanya adalah kepentingan yang digambarkan secara diferensial dalam fikiran para anggota dari kolektivitas itu --- yang berakibat akan suatu urutan kebutuhan yang disusun secara hirarkis. Deprivasi dari pemenuhan tujuan yang mengandung nilai yang lebih tinggi adalah lebih penting artinya dalam studi tentang migrasi).

Oleh sebab itu, faktor-faktor berikut ini haruslah dipertimbangkan dalam proses mengambil keputusan sebelum bermigrasi.⁴⁷

- (a) Deprivasi yang cukup gawat dirasakan dalam beberapa nilai penting tertentu;
- (b) kesadaran akan tidak mampunya menanggulangi kekurangan (deprivasi) ini di tempat asal;
- (c) kemampuan untuk melihat cara-cara yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi itu di tempat-tempat lain; dan
- (d) memilih dari antara tempat-tempat yang ada tempat di mana terdapatnya organisasi sosial yang paling sesuai agar kebutuhan kolektivitas itu dapat ditemukan.

Kriteria ketiga ialah perubahan-perubahan dalam sistem interaksi. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam bagian yang terdahulu, kriteria ini adalah esensial bagi konsep merantau. Untuk pemberian definisi yang jelas dari studi kita sekarang ini maka perubahan dalam sistem interaksi harus terjadi di luar batas-batas budaya Minangkabau, sekalipun sebelumnya telah kita kemukakan bahwa, bahkan untuk berpindah ke kota terdekat saja dengan tujuan tertentu dalam fikirannya pernah dulu-dulu dipandang sebagai merantau. Sekalipun terdapat adanya perubahan secara berangsur-angsur dalam perluasan geografis dari suatu sistem sosial, ada kesan tetap bahwa merantau harus berarti perubahan dari satu sistem interaksi ke sistem interaksi yang lain, walaupun tidak sampai harus diartikan sebagai "meninggalkan buat selama-lamanya suatu bentuk sosial tertentu dan masuk ke bentuk sosial yang lain" sebagaimana yang dimaksud oleh Eisenstadt. Ini terutama disebabkan oleh sifat kesementaraan dan orientasi akan keterikatan kepada kampung halaman yang terdapat pada merantauanya orang Minangkabau. Jadi merantau difikirkan di sini sebagai suatu proses yang mengaitkan dua buah sistem atau sub-sistem sosial: yaitu sistem sosial yang ada di rantau dengan yang ada di tempat asal (Minangkabau). Pemahaman terhadap

kedua sistem sosial yang dijembatani oleh para perantau akan meningkatkan pengertian kita tentang proses merantau.

(c) Merantau sebagai 'agent of cultural transmission'

Studi klasik tentang *The Polish Peasant* (Petani Polandia) oleh W.I.Thomas dan Florian Znaniecki (1927) dengan jelas memperlihatkan fungsi migrasi sebagai 'cultural transmitter' (penyalur arus budaya). Sekalipun sebagian besar komunikasi yang dilakukan oleh para migran dengan keluarganya di kampung halaman adalah melalui surat-surat, hal tersebut dengan jelas membuktikan pengaruh yang kuat sekali yang dibawakan oleh migrasi, teristimewa dari sudut pandangan sosial-psikologi. Dalam hal merantau, pengaruh ini terasa lebih kuat lagi, oleh karena ia bukanlah perpindahan secara permanen, tetapi suatu gejala sementara yang tujuannya ialah untuk membuat tempat asal menjadi tempat yang lebih baik untuk kembali. Selain suplai-suplai materi yang lebih nyata, nilai-nilai budaya juga ditransmit melalui saluran ini. Tetapi transmisi budaya jelas bekerja secara dua arah: melalui perbuatan merantau maka budaya tempat asal disuplai, diperkuat dan ditantang oleh budaya baru; dan melalui merantau pula setiap perantau sedikit banyaknya juga bertindak sebagai penyalur budaya dari budaya asal, sambil menyesuaikan dirinya dan berorientasi dengan budaya yang ada di rantau. Oleh sebab itu pemahaman tentang peranan budaya dari merantau ini, sebaring dengan fungsi-fungsi lainnya yang telah kita uraikan di atas, adalah penting dalam kita menyusun teori yang memuaskan tentang merantau.

(d) Pelembagaan merantau

Aspek lain yang tidak kurang pentingnya dari tradisi merantau yang tidak terdapat pada berbagai tradisi migrasi lainnya, dan yang di sini harus dikonseptualisasikan ialah melembaganya tradisi merantau ini dalam sistem sosial Minangkabau. Sebagai yang akan kita lihat pada bagian berikut dan pada bab-bab belakangan nanti, laki-laki Minangkabau biasanya tidak punya peranan yang akan dimainkan baik di rumah ibunya maupun di rumah isterinya. Posisinya rada lemah: di rumah ibunya (yakni di rumah di mana sebetulnya ia tergolong) tidak disediakan ruangan atau bilik untuknya yang dapat digunakannya untuk pribadinya, sebagaimana halnya dengan semua anggota wanita; sedangkan di rumah isterinya dia hanya mengunjungi isterinya di malam hari. Biasanya dia tidak mewarisi bagian dari harta milik dari salah satu dari kedua garis keturunan tadi. Sebagai anggota keluarga laki-laki dalam garis ibu, di rumah ibunya dia berfungsi sebagai pelindung dan wali (*mamak rumah*), dan dengan demikian adalah menjadi tugasnya untuk juga memperbesar dan memperbanyak harta benda kaum dari ibunya.

Disebabkan posisinya yang tidak mapan ini, dia cenderung untuk bepergian kemana saja dikehendakinya. Sebelum kawin ia bahkan didorong untuk pergi merantau dan untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia sanggup mencari uang dan berdiri di kaki sendiri. Jadi merantau juga dapat dilihat sebagai suatu inisiasi menuju kedewasaan dan sebagai kewajiban sosial yang dipikulkan ke bahu laki-laki untuk meninggalkan kampung halamannya mencari harta kekayaan, melanjutkan ilmu dan mencari pengalaman hidup.

Untuk menyimpulkan, dalam studi tentang merantau sebagaimana juga dalam studi tentang migrasi pada umumnya, diperlukan konseptualisasi dari sebuah kerangka teori agar unsur-unsur pokok dari fenomena ini dapat dijelaskan dan informasi yang cukup banyak yang telah kita kumpulkan dapat pula diakomodasikan. Sebagaimana telah kita kemukakan, kita memperlakukan fenomena merantau sebagai sebuah gerak ruang (*spatial movement*) yang bersifat sementara dan berorientasi ke kampung asal. Dari sudut gerak ruang ia berciri sebagai suatu bentuk mobilitas regional yang mencakup gerakan-gerakan perpindahan dari individu dan kelompok individu melintasi batas-batas etnis atau batas-batas nasional. Pendekatan kita juga mewadahi akan konsep-konsep migrasi bertahap (*step migration*) dan migrasi berulang (*repeated migration*), dan juga kepada ciri merantau yang berorientasi kota dan bersifat inovatif. Lagipula, merantau juga memperlihatkan diri sebagai sebuah bentuk mobilitas ekonomi dan sosial yang penampilannya bertingkah laku sosial dan kolektif yang mengikuti ketentuan-ketentuan dan norma-norma tertentu yang sebagian besar dapat diramalkan. Kolektivitas, pembuatan keputusan berdasarkan nilai-nilai atau tujuan-tujuan mengandung makna yang tersusun secara hirarkis, serta perobahan-perobahan dalam sistem interaksi, adalah beberapa dari kriteria sosiologis pokok yang dipakai dalam studi ini, di samping juga pengakuan merantau sebagai penyulur transmisi budaya. Merantau, akhirnya, beroleh bobot sosial dengan sebab pelembagaannya dan telah merupakan bahagian dari sistem sosial dari masyarakat yang menghayatinya.

Sebelum kita membicarakan metoda-metoda yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisa data, perlu sekali terlebih dahulu kita perkenalkan masyarakat yang kita bicarakan ini. Hal ini terutama penting oleh karena sebelumnya kita telah menekankan bahwa masyarakat inilah yang mengemban para perantau dan yang sebaliknya dipengaruhi pula oleh fenomena merantau itu sendiri.

4. Struktur sosial di Minangkabau

Orang Minangkabau yang merupakan satu dari antara kelompok etnis utama bangsa Indonesia menempati bagian tengah pulau Sumatera sebagai kampung halamannya, yang bahagian besarnya sekarang merupakan Propinsi Sumatera

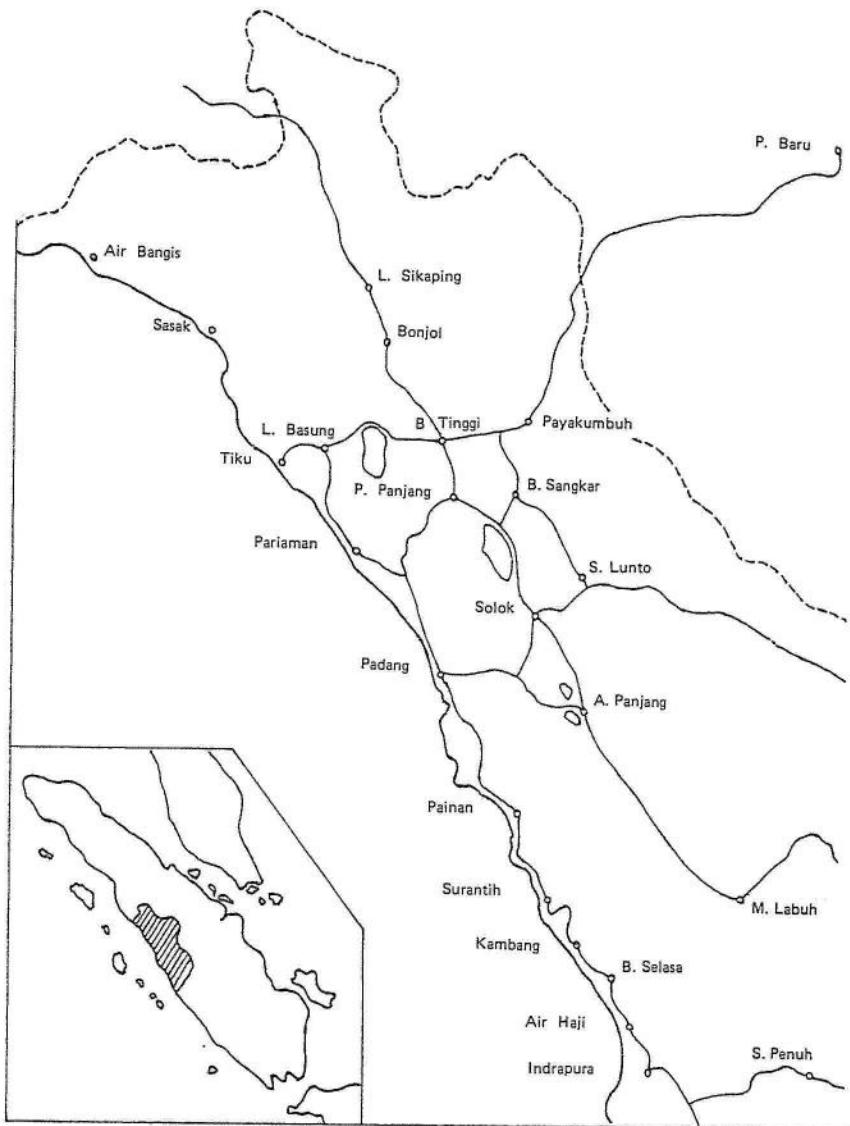
Barat. Sekalipun secara statistik orang Minangkabau hanya berupa kira-kira 3% dari seluruh penduduk Indonesia, mereka adalah kelompok etnis utama yang keempat sesudah orang Jawa, Sunda dan Madura; sedangkan di pulau Sumatera sendiri mereka merupakan kelompok etnis yang terbesar dengan jumlah penduduk seperempat dari seluruh penduduk pulau Sumatera.⁴⁸

Penduduk Sumatera Barat sekarang berjumlah sekitar 3 juta jiwa, yang diantaranya hanya 5% yang bukan orang Minangkabau. Disebabkan oleh tradisi merantau yang telah berjalan panjang itu, jumlah orang Minangkabau yang cukup besar juga ditemukan di bahagian-bahagian lain di Indonesia dan di Semenanjung Tanah Melayu. Di Bab yang berikut kita akan berusaha menge-mukakan perkiraan jumlah orang Minangkabau yang pindah dari negeri asalnya. Cukup jika kita sebutkan di sini bahwa jumlah orang Minangkabau seluruhnya berkisar sekitar 5 sampai 6 juta orang di mana kira-kira separohnya terdapat di luar daerah asalnya.

Dari segi topografi, negeri Minangkabau dilintasi oleh Bukit Barisan yang merupakan tulang punggung bagi pulau ini dan memanjang dari ujung utara sampai ke ujung selatan. Luas daerahnnya kira-kira 42.000 km persegi, dibagi atas tanah dataran tinggi dan jalur dataran rendah pantai yang sempit yang menghadap ke Samudera Hindia.

Dataran tingginya bergunung-gunung dengan tujuh buah puncak gunung berapi berjejer dari utara ke selatan, yang kebanyakannya masih aktif. Daerah ini sebagian besar ditutupi oleh rimbahujan (*torrential rain forest*) dengan lembah dan ngarainya yang curam dan elevasi yang menanjak. Di sana-sini terhampar dataran-dataran tinggi yang subur yang cocok untuk persawahan dan bertanam sajur-sayuran . Inilah yang merupakan jantung tanah Minangkabau. Daerah ini secara tradisional terbagi ke dalam tiga luhak: Luhak Agam (sekeliling Bukit-tinggi), Luhak Tanah Datar (selingkar Batu Sangkar) dan Luhak Lima Puluh Kota (sekitar Payakumbuh). Sebelum perluasan tanah Minangkabau ke daerah dataran rendah, setiap Luhak mempunyai tanah rantau yang bersebelahan. Jadi Luhak Agam beroleh Rantau Pasaman di sebelah utaranya, Luhak Tanah Datar beroleh Rantau Solok arah ke selatan, dan Luhak Lima Puluh Kota beroleh Rantau Kampar arah ke timur. Luhak dan rantau itu sekarang masing-masingnya telah berbentuk menjadi Kabupaten. Kabupaten Kampar yang dahulu bahagian dari Sumatera Barat sekarang masuk Propinsi Riau, sekalipun rakyatnya tetap memakai adat Minangkabau dan secara etnis tetap menganggap dirinya sebagai orang Minangkabau.⁴⁹

Dataran rendah sebelah pantai (yang juga disebut rantau) adalah sambungan selanjutnya dari tanah air orang Minangkabau, dan terbentang dari Air Bangis



PETA SUMATERA BARAT
(Skala: 1.500.000)

di utara sampai ke Sasak, Tiku, Pariaman, Padang, Painan, Balai Selasa, Air Haji, dan Indrapura di selatan. Air Bangis dan Sasak sekarang termasuk Kabupaten Pasaman, Tiku termasuk Kabupaten Agam, Pariaman dan Padang termasuk Kabupaten Padang-Pariaman, dan Painan, Balai Selasa, Air Haji serta Indrapura termasuk Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan tambahan Kabupaten Sawah Lunto-Sijunjung (yang dulunya merupakan bagian Tanah Datar dan Solok), Propinsi Sumatera Barat sekarang punya delapan Kabupaten dan enam Kotamadya serta 543 buah Nagari. (Lihat peta).

Daerah-dataran rendah, sekalipun tidak begitu subur dan di tempat tertentu juga berawa-rawa, pada umumnya juga cocok untuk ditanami padi sawah dan sayur-sayuran. Selain dari tanaman keras seperti kopi, getah, kulit manis, cengkeh dan hasil hutan seperti yang didapat di pedalaman, rakyat dataran rendah juga bertanam kelapa dan nipah dalam jumlah besar dan menangkap ikan di laut.

Orang Minangkabau karenanya sebahagian besar adalah petani. Hasil pertanian dan hasil hutan sampai sekarang masih merupakan sumber ekonomi utama daerah ini. Disebabkan oleh situasi topografi dan ekologi di mana dua-per-tiga dari daerah ini ditutupi hutan belantara, ada batas yang menghalangi perluasan pertanian. Duabelas persen dari daerah yang secara potensial dapat ditanami telah dipakai: 8% untuk tanaman keras perdagangan (*perennial cash crops*), terutama di lereng-lereng gunung dan bukit, dan 4% untuk menanam padi sawah serta sayur-sayuran di dataran-dataran tinggi dan tanah-tanah datar. Lebih kurang 5% dari tanahnya mandul dan tidak cocok untuk ditanami.⁵⁰ Terkecuali tanah-tanah di Kabupaten Pasaman dan di Sawah Lunto-Sijunjung, perluasan pertanian tidak mungkin lagi di Kabupaten lain, oleh karena tanah yang dapat ditanami praktis sudah terolah semuanya. Adalah penting untuk diingat ciri lingkungan alam ini bila kita nanti mencoba menjelaskan motif-pendorong untuk merantau.

Orang Minangkabau menamai negerinya *Alam Minangkabau*. Mereka memahamkannya jauh lebih luas daripada batas-batas Sumatera Barat dewasa ini, oleh karena mereka juga memasukkan berbagai rantau dari sungai-sungai besar di sebelah timur, yakni Rokan, Tapung, Siak, Kampar, Kuantan atau Inderagiri dan juga Batang Hari. Rantau Minangkabau ini juga merupakan bagian Kerajaan Minangkabau di zaman dahulu. Kita tidak akan menghibur diri dengan legenda-legenda bagaimana tanah ini sampai bernama Minangkabau. Beraneka ragam etimologi penamaan ada dikemukakan orang, yang antara lain dapat ditemukan dalam *Encyclopaedia van Nederlandsch-Indie*.⁵¹ Kita juga tidak akan memperbincangkan sejarah Minangkabau pada tahap ini oleh karena kita akan sampai ke masalah ini nanti di Bab III. Yang penting ditunjukkan di sini sambil lalu ialah bahwa dengan tambahan *Alam* kepada kata *Minangkabau* maka konsep perjalinan antara luhak (kampung asal) dan rantau yang tak dapat dipisahkan dapat di-

gambarkan; bahwa luhak tidak mungkin ada tanpa adanya rantau, dan demikian sebaliknya.⁵²

Sekalipun *Alam* ini selama beberapa abad lamanya --setidak-tidaknya semenjak abad ke empatbelas sampai awal abad yang lampau-- merupakan Kerajaan yang besar pengaruhnya atas sebagian besar pulau Sumatera, di Luhak-asli (Luhak nan Tiga) sang Raja hampir-hampir tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Raja pada masa itu hanyalah lambang persatuan, dan di rantaualah ia mempunyai kekuasaan, yang itupun dilimpahkannya pula kepada raja-raja muda atau penghulu rantau. Raja (*kingship*) berbentuk kuasa tiga-serangkai (*triumvirate*), yang disebut Rajo nan Tigo Šelo, yaitu terdiri dari Rajo Alam, Rajo Adat dan Rajo Ibadat. Ketiga-tiganya bersemayam di Pagarruyung di luhak Tanah Datar, sekalipun Rajo Adat dan Rajo Ibadat punya daerah dan berkedudukan masing-masing di Buo dan di Sumpur Kudus.⁵³ Rajo Alam yang juga diberi gelar Yang Dipatuan Basa dipandang sebagai *primus inter pares* dari kuasa tiga-serangkai dan gelar serta fungsinya dipusatkan turun-temurun secara patrilineal dari ayah ke anak, suatu hal yang merupakan kontras menyolok dengan sistem keturunan Minangkabau yang umum, yaitu matrilineal.⁵⁴ Kekuasaan tiga-serangkai diperkuat dengan sebuah dewan menteri, yang disebut Basa Ampek Balai, yang berkedudukan di Pagarruyung. Beliau-beliau ini adalah: Bandaharo dari Sungai Tarab, Tuan Kadi dari Padang Ganting, Mangkudum dari Suruaso dan Indomo dari Sumanik. Kemudian ditambahkan yang kelima, Tuan Gadang dari Batipuh, yang dipercayakan dengan urusan pertahanan. Para menteri ini bukanlah anggota keluarga raja melainkan orang-orang terpandang dan terkemuka di nagari mereka masing-masing. Dengan runtuhan Kerajaan tadi yang anggota kerajaannya dimusnahkan oleh kaum Padri di tahun-tahun 1820-an⁵⁵ berakhirlah sistem politik ini.

Luhak itu sendiri strukturnya amorfik, dan tidak pernah merupakan unit politik dalam pengertian tradisional. Ia hanya mempunyai arti dalam makna keturunan bahwa masing-masing secara mitologis berasal dari moyang yang sama.⁵⁶ Organisasi politik dan sosial tertinggi sebelum masuknya sistem kolonial Belanda ke tanah Minangkabau adalah *nagari*, yang terdiri dari beberapa kampung yang berdekat-dekatan. Nagari diperintah oleh sebuah lembaga kepala-kepala kampung, di mana seorang di antaranya diangkat sebagai kepala (yang biasanya adalah *primus inter pares*). Tidak ada terdapat kaitan struktural secara formal antara nagari dengan nagari oleh karena setiap nagari berdiri sendiri di mana nagari yang satu lepas dari nagari yang lain.⁵⁷ Dengan demikian orang dapat menyebutnya sebagai *republik nagari*. Andaikata di masa itu terdapat nagari sebanyak yang ada sekarang, tentu ada lebih dari 500 buah republik nagari di seluruh tanah Minangkabau di waktu itu. Kepala-kepala dari *kampuang*, yang disebut *panghulu kampuang*, sebaliknya adalah kepala-kepala dari masing-masing suku. Biasanya

ada beberapa buah suku yang termasuk ke dalam sebuah kampung, dan yang dipilih menjadi penghulu kampung biasanya ialah yang tertua dari antara kepala-kepala suku. Kepala-kepala suku ini disebut *panghulu suku*, dan dimuliakan dengan gelar datuk yang dipusakai.

Asal mulanya terdapat ada empat suku pokok di Minangkabau, berpasang-pasangan menjadi dua *kelarasan* (*moiety*): suku Koto dan suku Piliang termasuk kelarasan Koto-Piliang, sedangkan suku Bodi dan Caniago termasuk kelarasan Bodi-Caniago. Dewasa ini empat suku asal ini, menurut L.C. Westenenk, telah bercabang-cabang menjadi kira-kira 96 suku yang berbeda-beda yang tersebar di seluruh nagari di Minangkabau.⁵⁸ Unsur-unsur suku Koto-Piliang dan Bodi-Caniago kedua-duanya mungkin ditemukan dalam nagari yang sama, sekalipun nagari itu biasanya ditandai oleh suku yang lebih dominan. Oleh sebab itu orang dapat mengatakan, umpamanya, bahwa nagari di Luhak Agam lebih banyak dikuasai oleh suku Bodi-Caniago, nagari di Luhak Lima Puluh Kota oleh Koto-Piliang dan nagari di Tanah Datar oleh suku campuran. Pengelompokan kedalam Koto Piliang dan Bodi Caniago tidak lagi dirasakan pentingnya di masa sekarang ini oleh karena beda yang tinggal dari keduanya cuma sedikit. Dari sudut sejarah, bagaimanapun, keduanya menggambarkan dua buah sistem sosial yang menurut legenda yang termukil di dalam *Tambo*⁵⁹ berasal dari dua orang moyang yang bersaudara-tiri yang bersengketa. Keduanya dilahirkan dari satu ibu tetapi lain ayah: Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang.⁶⁰ Yang pertama berciri lebih aristokratis, sedang yang kedua lebih demokratis. Jadi di nagari Koto-Piliang, kepala-kepala suku dipilih menurut sistem keturunan langsung, sedangkan di nagari Bodi-Caniago mereka dipilih dengan cara yang lebih demokratis. Nagari .Koto-Piliang dikepalai oleh seorang *panghulu pucuak* dengan kekuasaan yang lebih mendiri, nagari Bodi-Caniago oleh *panghulu andiko* yang dipilih dari antara anggota lembaga tanpa hak istimewa. Beda demikian dapat juga dilihat dari susunan cara duduk dalam balai adat (*balairung*): balai adat Koto-Piliang mempunyai anjung yang ditinggikan, hal mana menggambarkan hirarki dari kepala-kepala adat, sedangkan balai-adat dari Bodi Caniago lantainya sama datar, yang menunjukkan bahwa semua kepala adat itu sederajat.

Suku, atau *matriclan*, ialah unit utama dari struktur sosial Minangkabau, dan seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau kalau dia tidak mempunyai suku. Suku sifatnya exogamis, kecuali bila tidak dapat diselusuri lagi hubungan keluarga antara dua buah suku yang senama tetapi terdapat di kampung yang berlainan. Oleh karena orang dari suku yang sama biasanya menempati lokasi yang sama, suku bisa berarti genealogis maupun territorial, sedangkan kampuang tanpa dikaitkan ke salah satu suku tertentu hanyalah mengandung arti territorial semata-mata.⁶¹

Tiap suku biasanya terdiri dari beberapa *paruik* dan dikepalai oleh *kapalo paruik* atau *tunganai*. *Paruik* dapat dibagi lagi ke dalam *jurai* dan *jurai* terbagi pula ke dalam *samande* (artinya "satu ibu").⁶² (Lihat bagan). Cara pembagian suku seperti demikian ke dalam berbagai tingkat garis keturunan (*lineage*), bagaimanapun, bisa berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Sebagaimana diakui oleh de Jong, *jurai* adalah istilah yang kabur yang mungkin menunjukkan persamaan consanguinealitas saja atau pertalian kelompok di bawah atau di atas tingkatan *paruik*. *Samande*, sebaliknya, sukar dipandang sebagai unit yang berdiri sendiri oleh karena dua atau tiga *samande* bisa sama mendiami rumah yang satu dan sama memiliki harta benda tidak bergerak lainnya; sedangkan segala hal-ihwal yang penting dalam lingkaran hidup (*life cycle*) tidak dapat diselesaikan oleh anggota-anggota dari *samande* yang sama (yang biasanya berpusat sekeliling seorang nenek) saja, tetapi harus disampaikan kepada *paruik*. Anggota dari *paruik* yang sama biasanya memiliki harta bersama (*harato pusako*), seperti tanah bersama, termasuk sawah-ladang, rumah gadang dan pandam pekuburan bersama. Oleh karena 'paruik' berkembang, ia mungkin memecah diri menjadi dua *paruik* atau lebih, sekalipun masih dalam suku yang satu. Dan dengan berkembangnya suku ia mungkin pula terbagi ke dalam dua atau lebih suku baru yang bertalian.⁶³

Dalam sistem keturunan matrilineal ini, ayah bukanlah anggota dari garis-keturunan anak-anaknya. Dia dipandang tamu dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga, yang tujuannya terutama untuk memberi keturunan. Dia disebut *samando* atau *urang samando*. Tempatnya yang sah adalah dalam garis-keturunan ibunya di mana dia berfungsi sebagai anggota keluarga laki-laki dalam garis-keturunan itu. Secara tradisi, setidak-tidaknya, tanggung-jawabnya berada di situ. Dia adalah wali dari garis-keturunannya dan pelindung atas harta benda garis-keturunan itu sekalipun dia harus menahan dirinya dari menikmati hasil tanah kaumnya oleh karena dia tidak dapat menuntut bagian apa-apa untuk dirinya. Tidak pula dia diberi tempat di rumah orangtuanya (garis ibu) oleh karena semua bilik hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga yang perempuan, yakni untuk menerima suami-suami mereka di malam hari. Posisi kaum laki-laki yang goyah ini adalah krusial sekali sifatnya, sebagaimana akan kita lihat selanjutnya nanti waktu membicarakan motivasi sosial untuk merantau.

Orang laki-laki biasanya mencari nafkah dengan cara pergi ke pasar menjadi pedagang, atau bekerja sebagai tukang kayu, tukang bajak di sawah, penjahit, pemilik kedai, pegawai kantor, dan sebagainya. Dia bekerja di sawah ladang milik garis-keturunannya atau milik garis-keturunan isterinya hanyalah sambil lalu, jika tidak ada yang lain yang akan dikerjakannya. Kalau dia memutuskan hendak mengolah tanah dari garis keturunan ibunya untuk mendapatkan sebagian hasilnya dia biasanya berbuat begitu sebagai seorang penyedua (pekerja bagi

Diagram A

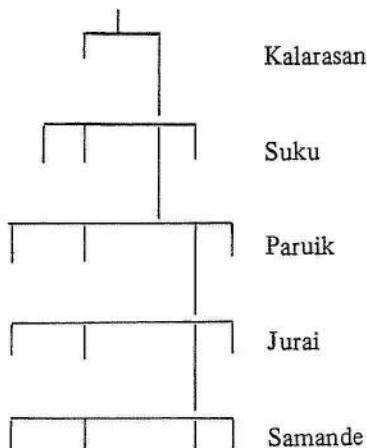
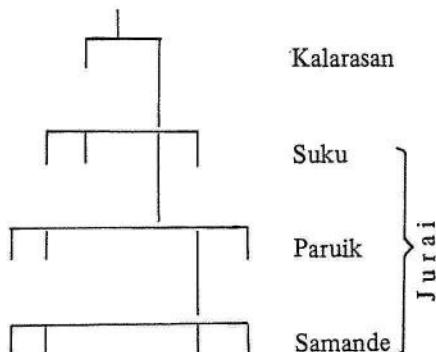


Diagram B



Catatan:

Kalarasan	: <i>Moiety</i>	- etnisitas mitologis
Suku	: <i>Matriclan</i>	- teritorialitas, organisasi politik, eksogami
Paruik	: <i>Major lineage</i>	- penguasaan harta kaum yang tak dapat dilimpahkan
Samande	: <i>Minor lineage</i>	- otoritas domestik tanpa melibatkan harta kaum
Jurai	: <i>Lineage</i>	- istilah umum yang tidak begitu tegas yang kadang-kadang ditujukan untuk menjelaskan 'konsanguinealitas', bukan 'hak'.

hasil), di mana dia menerima hanya sebagian dari hasil, sedangkan bagian yang lain diperuntukkan kepada anggota garis-keturunan wanita yang sebenarnya menjadi pemilik dari tanah tersebut.⁶⁴

Perkawinan, oleh karena itu, tidaklah menciptakan keluarga inti (*nuclear family*) yang baru, sebab suami atau isteri masing-masingnya tetap menjadi anggota dari garis-keturunan mereka masing-masing. Sebab itu pengertian tentang keluarga inti yang terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak sebagai suatu unit tersendiri tidak terdapat dalam struktur sosial Minangkabau oleh karena dia selalu termaung oleh sistem garis-keturunan ibu yang lebih kuat. Sebagai akibatnya, anak-anak dihitung sebagai anggota garis-keturunan ibu dan selalu lebih banyak melekatkan diri kepada sang ibu serta anggota-anggota lainnya dalam garis-keturunan itu. Ikatan yang lemah terhadap si ayah ini bahkan lebih jelas terlihat apabila si lelaki berpoligami, di mana dia bergilir mengunjungi isterinya, dan lebih jarang bertemu dengan anak-anaknya. Ikatan itu tambah berkurang lagi bila perceraian terjadi, dalam keadaan mana dia jarang sekali bertemu dengan anak-anaknya.

Oleh karena si suami hanya pada malam hari mengunjungi isterinya dan tidak benar-benar hidup dengannya, tidak ada istilah-istilah yang telah dituang untuk menyatakan tempat tinggal oleh para ahli antropologi, seperti "*matrilocal residence*" oleh N.W. Thomas (1906), "*uxorilocal residence*" oleh Firth (1936), atau "*duolocal residence*" oleh Murdock (1957), yang betul-betul dapat dipakai bagi struktur sosial Minangkabau.⁶⁵ Tempat tinggal yang demikian barangkali lebih tepat disebut "*natolocal residence*," oleh karena masing-masing, suami atau isteri, tetap tinggal dan punya domisili yang sah di dalam kelompok tempat tinggal kelahirannya di garis-keturunannya masing-masing.

Pelukisan tentang struktur sosial Minangkabau di atas dalam bentuk idealnya yang tradisional adalah penting untuk dimengerti betul dari awal mula ini, oleh karena ia akan dapat membantu kita nanti dalam memahami perobahan-perobahan yang terjadi sebagai akibat dari merantau dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya.

5. Metodologi

Sebagai telah dikemukakan pada awal Bab ini, studi ini mempunyai tujuan utama sebagai berikut: *Pertama*, untuk memahami "merantau" sebagai sebuah fenomena sosial yang jauh berakar di dalam sistem sosial orang Minangkabau; *Kedua*, untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dasar berikut:

- (a) Siapa-siapa perantau itu,
- (b) Mengapa mereka pergi merantau,

- (c) Kemana mereka merantau, dan
- (d) Apa-apakah konsekwensi dari tindakan merantau itu;

dan *Ketiga*, untuk memperbandingkan merantau dengan migrasi dari kelompok-kelompok etnis lain di Indonesia guna menyingskapkan persamaan dan perlainannya dalam fungsi dan struktur. Adalah merupakan tujuan dari studi ini juga untuk menyusun suatu tipologi migrasi yang dapat dipakaikan kepada studi-studi selanjutnya tentang migrasi di Indonesia. Scope perbandingan kita, bagaimanapun, dibatasi kepada kelompok-kelompok etnis yang utama saja di Indonesia dengan tidak mengikutsertakan kelompok non-asli seperti orang Cina, Arab, India dan Indo lainnya, agar kita mendapatkan fokus yang lebih terang dan menghindari terlalu banyaknya intervensi dari faktor-faktor penyela (*intervening variables*) lainnya.

Salah satu masalah metodologi yang harus dihadapi dalam studi ini ialah tidak adanya jalan yang mudah untuk mengetahui jumlah perantau yang sesungguhnya yang telah meninggalkan kampung halamannya di Sumatera Barat dan yang terpencar di seluruh Indonesia dan Semenanjung Tanah Melayu. Tugas kita tambah dipersekutkan lagi oleh kenyataan bahwa merantau bukanlah bentuk permanen dari migrasi, dan oleh sebab itu lebih sulit lagi menghitung perantau-perantau itu oleh karena mereka pergi dan kembali lagi. Walaupun di Bab yang berikut ini kita mencoba menetapkan estimasi dari jumlah migrasi untuk orang Minangkabau dan kelompok lain di Indonesia, namun penaksiran ini sekali-kali tidaklah dapat dipakai sebagai dasar untuk analisa kwantitatif. Secara statistik, hanya sensus 1930 yang memberikan angka-angka untuk migrasi etnis di Indonesia, sedangkan sensus 1961 dan 1971 tidak lagi menyediakannya.

Sekalipun kita ingin sekali menangani masalah ini dari sudut pendekatan kwantitatif yang dapat dijabarkan secara statistik, dan menganalisa datanya menurut sesuatu model matematik tertentu, namun kita dibatasi oleh hambatan yang tidak teratas seperti tersebut di atas. Membatasi studi kita dengan memakai-kan pendekatan case-study kwantitatif akan menampilkan sejumlah masalah, di mana yang terpenting di antaranya ialah untuk menentukan representatif-tidaknya hasil penemuan kita untuk fenomena ini sebagai keseluruhan. Sebuah case-study tentang satu atau dua buah negeri di Sumatera Barat, atau satu atau dua kota rantau di luar Sumatera Barat, umpamanya, tidak akan membantu kita mendapatkan gambaran menyeluruh tentang merantau, sekalipun diakui bahwa pendekatan yang demikian akan memberi kita kedalamian pandangan secara psikologis terhadap masalah ini.

Pendekatan yang kita pakai di sini, oleh sebab itu, ialah pendekatan "*verstehende*" dari tradisi sosiologi Eropah. Dengan menyadari bahwa tidak mungkin kita mengumpulkan semua data statistik yang diperlukan untuk analisa yang kwan-

titatif dan terukur, kita oleh karena itu akan lebih memusatkan perhatian kita kepada pemahaman fenomena ini secara rasional dan mempergunakan akal sehat (*common sense*). Kita mendasarkan informasi kita atas berbagai sumber, yang akan kita jelaskan di bawah ini. Sebagai akibatnya, tidak ada hipotesa yang dibuktikan ataupun ditolak dalam studi ini. Melainkan kita diarahkan oleh kerangka konseptual yang telah kita kemukakan sebelumnya sebagai sumber asumsi-asumsi teoretis yang sebaliknya akan harus diuji secara kritis pada saat kita menganalisa data.

6. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan bersumber dari berbagai sumber: (i) sumber-sumber tertulis bersifat sekunder yang langsung atau tak langsung berhubungan dengan masalah yang kita bicarakan ini; (ii) data tangan-pertama yang dikumpulkan melalui survai-survai kwesisioner, interview langsung, observasi-observasi pribadi; dan (iii) memahami materinya selaku seorang peninjau peserta (*participant observer*). Oleh karena saya sendiri orang Minangkabau dan telah mengalami sendiri merantau, maka penghayatan secara pribadi yang demikian saya rasakan sangat bermanfaat dan bernilai dalam memahami liku-liku masalahnya dan secara positif dapat dipakai untuk memperluas pemahaman atas fenomena ini.

Sumber-sumber sekunder yang tersedia untuk studi merantau itu sendiri, sebagaimana telah kita kemukakan pada bagian permulaan, adalah minim. Sekalipun sering disebut-sebut, namun topik ini belum pernah secara sungguh-sungguh dan secara sistematis dianalisa. Orang, bagaimanapun, dapat mengetahui banyak hal dari membaca novel-novel sebelum perang --yang kebanyakan ditulis oleh penulis-penulis Minangkabau-- yang menggambarkan konflik-konflik sosial di Minangkabau. Informasi umum tentang penduduk, struktur budaya dan sosial Minangkabau kebanyakannya bersua dalam bentuk-bentuk artikel dalam majalah dan surat-surat kabar. Sedikit sekali buku yang ditulis tentang Minangkabau kendatipun diakui kenyataan bahwa Minangkabau terkenal sebagai sebuah masyarakat matrilineal terbesar di dunia dewasa ini.⁶⁶ Sumber-sumber sekunder lainnya yang dipakai sebagai referensi untuk studi ini didaftarkan dalam bab Bibliografi.

Untuk memperoleh pengetahuan tangan-pertama tentang topik ini saya melakukan survai kerja-lapangan yang luas, baik di Sumatera Barat maupun di berbagai kota rantau di Indonesia antara bulan Juni 1970 dan bulan Februari 1971. Sambil mengolah data pada ISEAS di Singapura mulai bulan Maret tahun 1971, saya mempergunakan kesempatan juga untuk melawat ke berbagai tempat di Malaysia Semenanjung, lebih-lebih ke Negeri Sembilan, Malaka, Kuala Lumpur, Pahang dan Johor, yaitu tempat-tempat di mana ditemukan orang-orang perantau

dari Minangkabau yang baru maupun yang telah menjadi orang Melayu. Saya juga menggunakan kesempatan untuk mengobservasi perantau Minangkabau di Singapura secara intensif, dengan berusaha mengenal mereka, bergaul dengan mereka dalam lingkungannya dan dengan cara memasuki klub-klub sosial mereka dengan berbagai kegiatannya.

Di Sumatera Barat, survei-survei dilakukan di nagari-nagari Koto Gadang, Sianok, Koto Tuo, Banuhampu-Sungai Puar (kesemuanya sekitar kota Bukit Tinggi); nagari Batipuh, Pariangan, Rao-Rao, Kumango, Koto Baru, Sungai Tarab, Gurun, Batu Sangkar (semuanya dalam Kabupaten Tanah Datar); nagari-nagari di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan; dan nagari-nagari Sulit Air (Kabupaten Solok) dan Silungkang, Muaro Kalaban dan Padang Sibusuk (Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung).

Pada setiap nagari, di samping survei-survei umum tentang kondisi sosial, ekonomi dan kebudayaan, saya memusatkan perhatian kepada tema-tema utama berikut: jumlah perantau (siapa yang melakukan apa dan di mana di rantau), alasan mereka merantau, pengaruh merantau, hubungan dengan orang yang ada di rantau dan sikap mereka terhadap merantau. Sekalipun ada usaha dilakukan untuk mengedarkan kwesisioner yang diisi sendiri (*self-administered questionnaires*) sebagai tambahan kepada interview-interview langsung itu, hasilnya tidak cukup memuaskan; hal ini barangkali disebabkan oleh karena orang-orang kampung belum mengenalnya dan bahkan banyak di antara mereka berprasangka bahwa ini adalah pertanyaan dari pemerintah untuk keperluan pemungutan pajak-pajak.

Di rantau, beberapa kota besar dipilih di mana dilaksanakan survei-survei lapangan: Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Pekalongan, Surabaya, Malang, Ampenan dan Makassar (sekarang Ujung Pandang). Kecuali Ampenan, semua kota ini adalah kota rantau utama di mana orang Minangkabau ditemukan dalam jumlah besar. Maksud saya untuk mengunjungi Ambon, Ternate, Menado dan bahkan Irian Barat untuk mengikuti arus baru merantau ke tempat-tempat tersebut tidak berhasil disebabkan oleh kesukaran transport.

Interview-interview di kampung-kampung di Sumatera Barat dan di rantau semua direkam dengan tape recorder. Tetapi, berbeda dengan di Sumatera Barat, survei-survei di daerah-daerah rantau jauh lebih berhasil, oleh karena mereka di rantau mengetahui lebih baik, dan mereka umumnya tahu tujuan dari survei kwesisioner. Ada yang begitu bergairah mengisi kwesisioner oleh sebab mereka yakin bahwa dengan berbuat demikian mereka membantu pemerintah setempat di Sumatera Barat menolong memecahkan persoalan-persoalan merantau. Dari 522

kwesisioner yang diisi sendiri yang terkumpul, 427 adalah dari rantau dan 95 dari Sumatera Barat. Oleh karena usaha yang lebih intensif dalam menyebarkan kwesisioner itu adalah di Jakarta, kebanyakan kwesisioner dikumpulkan dari sana dan lebihnya dari Bandung, Ujung Pandang dan Medan.

Tidak ada usaha dilakukan untuk menyebarkan kwesisioner menurut suatu sistem sampling secara random yang diseleksi terlebih dahulu (*preselected random sampling system*). Adalah sia-sia untuk berusaha memakaikan metoda sampling formal di kota sebesar Jakarta yang berpenduduk 4,5 juta orang dan dengan 10% dari penduduknya yang ditaksir terdiri dari turunan Minangkabau (atau lebih kurang 450.000), dan yang tempat kediamannya tersebar luas di seluruh daerah metropolitan ini. Akan gantinya, cara yang dipakai adalah dengan membagi-bagikan kwesisioner kepada sebanyak mungkin lapisan orang: pertama, menurut macam pekerjaannya (sehingga segala macam pekerjaan dapat dimasukkan); kedua, menurut latar belakang pendidikan (sehingga segala tingkat pendidikan dapat dicakupi); ketiga, menurut kelompok umur (sehingga generasi muda dan tua termasuk); dan keempat, menurut daerah asal mereka (hingga semua daerah asal di Sumatera Barat dapat diikutsertakan). Betapapun, tidak ada usaha khusus dilakukan untuk mengikutsertakan kaum wanita dalam survei survei kwesener tersebut, sekalipun mereka termasuk yang diwawancara secara intensif. Alasan untuk tidak memasukkan mereka dalam survei kwesisioner adalah karena secara konseptual merantau dulunya merupakan "tradisi kaum laki-laki", dan tidak dimasukkannya wanita ke dalamnya akan memperkecil komplikasi teknis. Kwesisioner sebagian besar dibagi-bagikan melalui bantuan mahasiswa-mahasiswa Minangkabau yang ada di kota-kota bersangkutan.

Harus diingat bahwa hasil penemuan kwesisioner tersebut sama sekali tidak dapat dianggap mewakili situasi yang sesungguhnya. Tujuan kita pada pokoknya adalah untuk memperoleh informasi tambahan yang kiranya sukar didapat melalui observasi langsung dan melalui wawancara. Data yang didapat melalui survai kwesisioner, bagaimanapun, dapat distratifikasikan, sehingga gambaran yang cukup terpercaya dapat diperoleh mengenai masing-masing strata. Maksudnya, kalau data itu distratifikasikan menurut pekerjaan, umpamanya, maka data yang terkumpul dari masing-masing strata dapat dipandang sebagai cukup representatif menggambarkan strata yang berkenaan. Lagipula, masalah reliabilitas dapat diimbangi dengan pendekatan banyak segi (*multi-faceted approach*) yang kita pakai dalam studi ini.

Selain kwesisioner "merantau," saya juga memanfaatkan dua set kwesisioner lain yang telah saya garap sebelumnya. Yang satu adalah studi tentang Ulama di Sumatera Barat dan Riau dengan 134 kwesisioner yang diisi sendiri, dan satu lagi mengenai studi tentang *Penghulu* (kepala-kepala adat) di Sumatera Barat

dengan 179 kewesener⁶⁷ yang diisi sendiri. Pada kedua kasus tersebut, selain ditanyakan soal-soal yang berkenaan dengan latarbelakang sosial-budaya dan peranan elite tradisional ini dalam masyarakat, juga ditanyakan soal-soal yang berkaitan dengan merantau.

7. Kerangka analisa

Analisa studi ini dibagi kepada tujuh bab. Bab I, berupa Pendahuluan, memberi kita garis-besar secara umum tentang studi ini. Bab II memusatkan perhatian pada *magnitude*, yakni pada besarnya jumlah yang merantau. Di sini diusahakan menguji secara statistik pentingnya arti merantau orang Minangkabau dibandingkan dengan migrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain di Indonesia. Bab III menjelaki tradisi merantau melalui sejarah dengan menyusuri pegangan tertulis dari tradisi merantau dan ekspansinya, lalu merangkaikannya kembali dalam suatu urutan kronologis. Hal ini membawa kita kembali kepada situasi yang sekarang yang dalam Bab IV digambarkan dengan cukup terperinci, yang didasarkan kepada serangkaian observasi dari setiap daerah rantau utama yang dikunjungi.

Bab V menganalisa pola kehidupan orang Minangkabau di rantau. Perhatian khusus diberikan pada berbagai type rantau, orientasi dan stratifikasi okupasi di rantau, variasi dan korelasi pendidikan dengan variabel-variabel lainnya, status perkawinan dan kehidupan keluarga di rantau, integrasi dan konflik di rantau dan hubungan dengan kampung-halaman.

Bab VI berusaha mencari alasan dan sebab-sebab merantau dengan memeriksa berbagai macam faktor penyebab, baik fisik maupun sosio-kultural. Perbandingan-perbandingan secara ekstensif dengan masyarakat-masyarakat lain juga dilakukan untuk memahami lebih baik institusi merantau ini dan untuk menyusun suatu typologi tentang migrasi. Akhirnya, Bab VII meneliti pengaruh-pengaruh merantau dan mencoba menarik garis kecenderungan masa depan tentang merantau berdasarkan apa yang telah kita ketahui sejauh ini.

CATATAN

BAB I: PENDAHULUAN

1. Uraian yang cukup mendalam mengenai merantau sampai sejauh ini, tapi ditulis secara intuitif dan populer, adalah oleh Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, terutama bab-bab akhir dari edisi ke dua (Jakarta, Firma Tekad, 1963). Penulis-penulis lain kebanyakan menyinggung masalah merantau hanya secara sepintas lalu, seperti tulisan-tulisan mengenai Minangkabau yang ditulis oleh penulis-penulis seperti Schrieke, de Josselin de Jong, Taufik Abdullah, Swift, Istutiah Mitchell, Teeuw dan Umar Yunus (lihat karya-karya mereka pada Bibliografi dan pada Catatan dari bab-bab). Perlu juga dicatat di sini peranan dari novel-novel Indonesia modern yang keluar sebelum perang yang kebanyakan ditulis oleh cendekia-cendekia muda asal Minangkabau yang keluar di Jakarta dan Medan yang umumnya menyorot konflik-konflik sosial-budaya di Minangkabau di tahun-tahun dua-puluhan dan tiga-puluhan. Lihat uraian yang jitu mengenai ini dalam Teeuw, *Modern Indonesian Literature*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1967, terutama fasil mengenai "Minangkabau Society and the Indonesian Novel," hlm. 54-78.
2. Taufik Abdullah, "Minangkabau 1900-1927: Preliminary Studies in Social Development," M.A. Thesis, Cornell U., 1967; hlm. 65.
3. Lihat, kumpulan hasil-hasil Seminar, *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerdja Seminar Sedjarah dan Kebudajaan*, 5 jilid, disusun oleh Panitia Seminar Sedjarah dan Kebudajaan Minangkabau, Padang, 1970.
4. Rujukan (referensi) mengenai migrasi pada umumnya dan beberapa ciri khas migrasi lainnya yang terdapat pada AJS (American Journal of Sociology) dan AA (American Anthropologists) relatif sedikit, dan tidak satupun, sampai sejauh ini, yang pernah membicarakan tipe migrasi yang sejalan dengan 'merantau' (lihat lampiran-lampiran Index dari kedua jurnal tersebut). Buku-buku dan artikel-artikel mengenai migrasi sebaliknya cukup banyak, seperti yang diungkapkan oleh Mangalam, "... We found that the vast amount of existing literature, empirical and otherwise, was scattered widely in a variety of sources such as scientific journal, dissertations, books and reports." Lihat, J.J. Mangalam, *Human Migration, A Guide to Migration Literature in English, 1955-1962*, Lexington, U. of Kentucky Press, 1968; hlm. 1. Tapi sekali lagi, kebanyakan tulisan-tulisan tersebut adalah mengenai migrasi di Amerika dan Eropa, dan menukukkan perhatian lebih banyak pada migrasi internasional, internal dan perburuhan. Lihat juga daftar bibliografi mengenai "Migration" dalam *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, vol. 10, ed. 1968; hlm. 286-300; dan dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences*, vol. 9, ed. 1951; hlm. 420-445. Sepanjang yang telah penulis ketahui, belum ada karya utama dari studi-studi migrasi tersebut yang secara khusus membicarakan tipe migrasi spontan (voluntary migration) seperti yang dilakukan dengan studi merantau ini.
5. C.J. Jansen (ed.) dalam bab Pendahuluan dari *Readings in the Sociology of Migration* (Oxford, Pergamon Press, 1970) menyebutkan bahwa di waktu yang lalu masalah migrasi internasional lebih mendapat perhatian daripada migrasi internal. Dan akhir-akhir ini, oleh karena proses yang terus berlanjut dari industrialisasi dan urbanisasi, perhatian telah lebih banyak diberikan kepada migrasi perburuhan (*labor migration*).
6. Lihat, mis., Tan Giok-Lan, *The Chinese of Sukabumi, A Study in Social and Cultural Accommodation*, Modern Indonesia Project, Cornell U., 1963; D.E. Wilmott, *The Chinese of Semarang: A Changing Minority Community in Indonesia*, Ithaca, Cornell U. Press, 1960;

E.J. Ryan, "The Value System of a Chinese Community in Java," unpubl. Ph.D. Thesis, Harvard U., Cambridge, Mass., 1961; G.W. Skinner, *Report on the Chinese in Southeast Asia*, Ithaca, N.Y. Southeast Asia Program, Cornell U., 1951; G.P. Jan, "Nationality and Treatment of Overseas Chinese in Southeast Asia," unpubl. Ph.D. Thesis, New York U., 1960; L.E. Williams, *The Future of the Overseas Chinese on Southeast Asia*, New York, McGraw-Hill Book Co., 1966.

7. Kebanyakan tulisan mengenai transmigrasi orang Jawa ke Luar Jawa tertumpu pada transmigrasi ke Lampung dan Sumatera Timur. Uraian yang cemerlang mengenai ini lihat, Karl J. Pelzer, *Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics* (New York, 1948). Juga, Widjojo Nitissastro, "Migration, Population Growth, and Economic Development in Indonesia: A Study of the Economic Consequence of Alternative Patterns of Interisland Migration," Ph.D. Diss., U. of California, Berkeley, 1961; dan J.N. Bhatta, *Regarding Internal Migration in Indonesia*, Jakarta, Balai Geografi, 1957.
8. Sebagai yang disarankan oleh J.J. Mangalam, *op.cit.*, hlm. 15.
9. Sayangnya, kita masih saja tergantung kepada sumber-sumber umum tersedia untuk mempelajari migrasi dari kelompok-kelompok etnis lainnya. Beberapa kekecualian adalah studi-studi migrasi dari suku Batak (Cunningham, 1958; Bruner, 1970, 1972), suku Bawean (Vredenbregt, 1968), suku Jawa (lih. Catatan no. 7).
10. Menarik bahwa istilah "merantau" atau istilah lain dengan konotasi yang serupa dengan itu tidak ditemukan dalam bahasa Jawa, Sunda dan Madura, maupun Bali. Istilah "lelana" atau "kelana" (Jawa) lebih berarti sebagai "petualangan", sama dengan istilah "marjajo" dalam bahasa Batak.
11. R.O. Winstedt, *Kamus Bahasa Melayu*, Singapore, 1960; di bawah kata "rantau".
12. Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1970; hlm. 931.
13. W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1966; Bhg. II, hlm. 125.
14. Orang-orang di Rao-Rao, Batu Sangkar, sewaktu diwawancara mengemukakan bahwa pergi ke Payakumbuh yang letaknya tidak begitu jauh dari kampung tersebut, sampai belum lama ini masih dianggap sebagai pergi merantau. Kebetulan bahwa banyak dari penduduk kampung tersebut yang pergi merantau ke Payakumbuh, terutama sebelum perang. Bahkan bagi penduduk kampung Kota Gedang, yang letaknya berseberangan ngarai dengan kota Bukittinggi, dulunya pernah menganggap "merantau" untuk berpindah ke Bukittinggi.
15. Mangalam memberikan definisi berikut untuk 'migration':

"Migration is a relatively permanent moving away of a collectivity, called migrants, from one geographical location to another, preceded by decision-making on the part of the migrants on the basis of a hierarchically ordered set of values or valued ends and resulting in changes in the interactional system of migrants."

Op. cit., hlm. 8.
16. Dengan kurangnya tenaga buruh seperti yang dialami oleh negara-negara industri di Eropa di tahun-tahun belakangan ini kaum pekerja migran telah berdatangan dari berbagai negara di sekitar Lautan Tengah, yang banyak di antaranya tergolong ke dalam kualifikasi ini. Fenomena yang sama juga terjadi di banyak bagian Afrika Barat di mana penduduk dari daerah pedesaan pindah ke kota-kota untuk bekerja sebagai buruh. Kebanyakan mereka juga tergolong ke dalam kategori ini. Lihat, mis., Hilda Kuper, ed., *Urbanization and Migration in West Africa*, Berkeley, U. of California Press, 1965; Aidan Southall, ed., *Social Change in Modern Africa*, Oxford U. Press, 1961; dan Elizabeth Colson, "Migration in Africa: Report of a Seminar Held at Boston U.," ed. by Frank B. Lorimer and Mark Carp, Boston, Boston U. Press, 1960.

17. Lihat, Brinley Thomas, "International Migration," dalam *The Study of Population*, ed. by Philip M. Hauser and Otis D. Duncan, Chicago, U. of Chicago Press, 1959; hlm. 510-543.
18. United Nations, Department of Social Affairs, *Problems of Migration Statistics*, Population Studies, No. 5, 1949.
19. S.N. Eisenstadt, *The Absorption of Immigrants: A Comparative Study Based Mainly on the Jewish Community in Palestine and the State of Israel*, Free Press of Glencoe, Ill., 1955; hlm. 1.
20. Lihat, C.E. Cunningham, *The Postwar Migration of the Toba Bataks to East Sumatra*, Cultural Report Series, Southeast Asia Studies, Yale U., New Haven, 1958.
21. Lihat, E.M. Bruner, "The Expression of Ethnicity in Indonesia," SEADAG Papers on Problems of Development in Southeast Asia, 1972. Juga oleh penulis yang sama, "Kin and Non-Kin," dalam A. Southall, ed., *Urban Anthropology*, London, Oxford U. Press, 1972; "Medan: The Role of Kinship in an Indonesian City," dalam A. Spoehr, ed., *Pacific Port Towns and Cities*, Honolulu, 1963; dan "Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatra," dalam *American Anthropologist*, vol. 63 (3), hlm. 508-521.
22. Lihat, R.W. Liddle, *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study*, New Haven, Yale U. Press, 1970.
23. Studi-studi mengenai migrasi tenaga kerja di tahun-tahun terakhir ini di Afrika Barat makin bertambah jumlahnya, seperti terlihat dari lembaran Bibliografi dari Hilda Kuper, ed., *Urbanization and Migration in West Africa*, op. cit., hlm. 203-214.
24. Lihat, mis., P.M. Hauser, ed., *Urbanization in Latin America*, Proceedings of a Seminar jointly sponsored by the Bureau of Social Affairs of the U.N. & The Economic Commission for Latin America, UNESCO, Paris, 1961; *Urbanization Series on Latin American Countries*, Working Papers of the International Urbanization Survey, Ford Foundation, N.Y.; G.H. Be-yer, ed., *The Urban Explosion in Latin America*, Ithaca, N.Y., Cornell U. Press, 1967.
25. Artikel mengenai "Primitive Migrations," dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences*, op. cit., hlm. 420.
26. *Ibid.*
27. *Ibid.*
28. Julius Isaac, *Economics of Migration*, London, Kegan Paul, 1947.
29. *Ibid.*, hlm. 1-3.
30. *Ibid.*
31. H.P. Fairchild, *Immigration*, New York, 1933; hlm. 19.
32. Isaac, op. cit., hlm. 3.
33. A.L. Mabogunje, *Regional Mobility and Resource Development in West Africa*, Montreal, McGill-Queen's U. Press, 1972; hlm. 15.
34. Ronald B. Dixon, "Migration," *Encyclopaedia of the Social Sciences*, op. cit., hlm. 420. Lihat juga, P.A. Sorokin, "Mobility," *ibid.*, hlm. 554.
35. Eisenstadt, op. cit., hlm. 1.
36. Torsten Hagerstrand, David Hannerberg and Bruno Odeving, eds., *Migration in Sweden: A Symposium*, Lund Studies in Geography, Series B, Human Geography, No. 13, Lund, The Royal U. of Lund, 1957; hlm. 28.
37. William Petersen, "Migration: Social Aspects," *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, op. cit., hlm. 286.

38. Abraham A. Weinberg, *Migration and Belonging: A Study of Mental Health and Personal Adjustment in Israel*, Studies in Social Life, V, The Hague, Martinus Nijhoff, 1961; hlm. 265-266.
39. Mabogunje, *op. cit.*, hlm. 15-16.
40. *Ibid.*
41. Penekanan yang terlalu menonjol dari pendekatan ekonomi terhadap masalah migrasi sangat dirasakan dalam literatur-literatur yang ada. Baru belakangan ini penulis-penulis seperti Donald J. Bogue, W. Petersen dan J.D. Taver mulai memberikan perhatian pada pentingnya faktor-faktor non-ekonomi dalam usaha memahami motivasi-motivasi dari migrasi. Lihat, mis., D.J. Bogue, "Internal Migration," dalam *The Study of Population*, *op. cit.*, hlm. 486-509; W. Petersen, *Planned Migration: The Social Determinants of the Dutch-Canadian Movement*, Berkeley, U. of California Press, 1955; J.D. Taver, "Predicting Migration," dalam *Social Forces*, 39:207-14.
42. Mangalam, *op.cit.*, hlm. 8-9.
43. *Ibid.*, terutama hlm. 8-11.
44. Cf., Emile Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology*, Free Press of Glencoe, Ill., 1951.
45. Mangalam, *loc. cit.*, hlm. 9.
46. *Ibid.*
47. *Ibid.*, hlm. 10.
48. Data Sensus tahun 1930 memperlihatkan bahwa orang Minangkabau merupakan 3,36% dari seluruh penduduk Indonesia; orang Jawa 47,02%; orang Sunda 14,53% dan orang Madura 7,28%. Orang Batak muncul sesudah orang Minangkabau dengan 2,04%. Lihat, *Volkstelling 1930*, IV, hlm. 179-180. Proporsi dari kelompok-kelompok etnis utama di Sumatera menurut Sensus tahun 1930 adalah sbb.:
- | | | | |
|-------------|-------|-----------|-------|
| Minangkabau | 25,6% | Aceh | 10,7% |
| Batak | 15,6% | Palembang | 9,9% |
| Jawa | 11,4% | Melayu | 7,9% |
- Lihat, *Volkstelling 1930*, IV, hlm. 19.
49. Utusan-utusan pemangku adat dari Kampar yang datang menghadiri Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batu Sangkar tahun 1970 dan Musyawarah Besar LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) di Padang tahun 1970 menekankan bahwa walaupun secara administratif daerah mereka sekarang merupakan bagian dari provinsi Riau, secara adat mereka tetap orang Minangkabau dan mengikuti adat Minangkabau. Hal ini secara tak langsung telah menjawab keraguan yang dikemukakan oleh de Josselin de Jong, dalam mempertanyakan apakah mereka menganggap diri mereka orang Melayu atau orang Minangkabau. Lihat, de Josselin de Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan*, hlm. 7.
50. Angka-angka ini berdasarkan informasi statistik dari Kantor Gubernur. Lihat, *Sumatera Barat dalam Angka 1972*, Tabel A.13, hlm. 12.
51. Dikutip dari de Josselin de Jong, *op. cit.*, hlm. 7. Lihat, *Encyclopaedia van Nederlandsch Indie*, s.v. Minangkabau,*** hlm. 740.
52. Diskusi panjang-lebar mengenai ini lihat Taufik Abdullah, "Modernization in the Minangkabau World," dalam Claire Holt, ed., *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca & London, Cornell U. Press, 1972, hlm. 179-245.
53. Cf., de Josselin de Jong, *op. cit.*, hlm. 103.

54. *Ibid.*, hlm. 101.
55. Lihat M.D. Mansoer *et al.*, *Sedjarah Minangkabau*, Jakarta, Bhratara, 1970, hlm. 67.
56. Legenda rakyat Minangkabau menghubungkan nenek-moyang mereka kepada binatang-binatang totem, seperti harimau bagi nenek-moyang dari Agam, kucing atau kambing bagi Lima Puluh Kota, kucing bagi Tanah Datar dan anjing bagi Solok. Lihat, de Josselin de Jong, *op. cit.*, hlm. 101.
57. Nagari yang bersebelahan-sebelahan malah sering tidak berbaikan antara satu sama lainnya, walaupun ini mungkin adalah ekspressi dari "*phratry-antagonism*" seperti yang diungkapkan oleh de Josselin de Jong dalam bukunya, *Ibid.*, hlm. 73-84.
58. L.C. Westenenk, "Het Soekoe-wezen," MS in the library of the National Museum of Ethnology, Leiden. Cf., de Josselin de Jong, *ibid.*, hlm. 68-69.
59. Lihat, mis., Dt. Batuah Sango, *Tambo Alam Minangkabau*, Payakumbuh, Pertjetakan Lemba-ga, 1954.
60. Legenda dari kedua primogenitor ini dinukilkan dalam *tambo* dan ditanggapi dalam berbagai tulisan mengenai Minangkabau.
61. Perbedaan-perbedaan pendapat antara para penulis mengenai konsep *suku* dan *kampuang* diuraikan oleh de Josselin de Jong, *op. cit.*, bab V, hlm. 45-96.
62. De Josselin de Jong, *ibid.*, hlm. 10-11.
63. *Ibid.*, bab V, hlm. 45-96.
64. Kebiasaan ini juga dilaporkan oleh Amilijoes Sa'danoer dalam hasil penelitiannya: *Socio-cultural Problems of Agricultural Development in West Sumatra* (Singapore, RIHED, 1974).
65. Lihat, David M. Schneider and Kathleen Gough, eds., *Matrilineal Kinship*, Berkeley & Los Angeles, U. California Press, 1961; hlm. X dan bab mengenai "Variation in Residence," oleh Kathleen Gough, hlm. 545-576.
66. Bibliografi dari sumber-sumber tertulis yang komprehensif dan up-to-date mengenai Minangkabau, lihat, Asma M. Naim & Mochtar Naim, *Bibliografi Minangkabau*, Singapore, U. of Singapore Press, 1975, 253 hlm.
67. Survai kwasener mengenai ulama Sumatera Barat dilakukan pada bulan September 1969. Kwasener diedarkan di antara ulama yang menghadiri penataran di Padang yang disponsori oleh pemerintah daerah. Dari sekitar 110 ulama yang hadir, 79 orang mengisi kwasener tersebut. Kwasener yang sama juga diedarkan di antara ulama Riau yang menghadiri penataran serupa di Pekanbaru beberapa bulan sesudah itu, di mana 55 orang di antaranya mengisi kwasener tersebut. Survai kwasener mengenai *penghulu* pemangku adat di Sumatera Barat dilakukan pada bulan Juli 1970. Dari sekitar 300 penghulu pemangku adat yang menghadiri Musyawarah Besar LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) di Padang pada waktu itu, 179 orang mengisi kwasener tersebut. Lihat kesimpulan statistik dari kwasener penghulu tersebut dalam, Mochtar Naim, *Penghulu di Minangkabau (Penghulu as Traditional Elite in Minangkabau)*, Working Papers No. 14, Dept. of Sociology, U. of Singapore, 1973.

BAB II:
BESARNYA JUMLAH PERANTAU

1. Pernyataan ini disokong dengan wawancara dengan Saudara Suharso dari Laknas LIPI, yang sebagai seorang ahli demografi duduk dalam Panitia Sensus. Mengetahui pentingnya data seperti itu bagi studi demografi, ia mengajukan saran untuk memasukkan unsur-unsur suku-bangsa, namun gagasannya ditolak oleh wakil-wakil pemerintah yang tak bersedia memasukkan unsur-unsur semacam itu.
2. Widjojo Nitisastro, *Population Trends in Indonesia*, Cornell University Press, 1970, Ithaca, hlm. 86.
3. *Ibid.*, hlm. 86.
4. Hanya 6,6 juta orang di antara seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 60,7 juta jiwa pada tahun 1930 dihitung di luar daerah kelahiran mereka. Periksalah Widjojo, *ibid.*, hlm. 89.
5. Kalimat-kalimat semacam itu lazim terdengar pada wawancara dengan pemimpin-pemimpin desa di Sumatera Barat.
6. Angka ini dikeluarkan oleh Biro Sensus dan Statistik di Padang, pada awal tahun 1972.
7. Lihat, J. Vredenbregt, *De Baweaners in hun Moederland en in Singapore*, Ph.D. diss., Leiden, 1968; publ. by Luctor et Emergo, Leiden, 1968.
8. Widjojo Nitisastro, *op.cit.*, hlm. 69-71 (Tabel 14 dan 15) dan hlm. 125.
9. Lihat, Geoffrey McNicoll "Internal Migration in Indonesia: Descriptive Notes", *Indonesia*, 1968, No. 5 (April).
10. Widjojo, *op.cit.*, hlm. 89. Jika migrasi internal didefinisikan menurut definisi "merantau" kita, persentasinya dengan sendirinya akan jadi lebih rendah dari itu.
11. Semenata hal itu dapat menjadi perbandingan dengan yang terdapat di negara-negara lain di bawah pemerintah kolonial, mobilitas semacam itu pasti akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara yang telah maju. Mobilitas geografis dari penduduk bukan asli Indonesia dengan sendirinya lebih tinggi pula.
12. Lihat, Shamsul Bahrin, "The Indonesians in Malaya", M.A. Thesis 1964, University of Sheffield; Tabel: "Indonesian Population by Community, 1911-1947".
13. Lihat, Karl J. Pelzer, *Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics*, New York, 1948, hlm. 189, juga Tabel XXXIII.
14. *Ibid.*, hlm. 191.
15. *Volkstelling 1930*, Dept. van Ekon. Zaken, Batavia, 1936, vol. 5, hlm. 25.
16. *Malayan Census Reports, 1911-1947*. Periksalah juga Shamsul Bahrin, *op. cit.*, hlm. 148.
17. McNicoll, *op. cit.*, hlm. 55.
18. *Ibid.*, Tabel 7.
19. *Ibid.*
20. Periksalah artikel penulis, "Perkembangan Kota-kota di Sumatera Barat, *Prisma II*, No. 3, Juni 1973.
21. Lihat, Lance Castles, "The Ethnic Profile of Djakarta", *Indonesia*, I, April 1967, Tabel V dan VI.

22. Berbagai publikasi dapat diperoleh mengenai Bali. Buku A.H. Swellingrebel yang berjudul *Bali, Studies in Life, Thought and Ritual*, The Hague—Bandung, 1960, merupakan buku bacaan yang baik mengenai hal ini. Periksalah juga I Gusti Ngurah Bagus, "Kebudayaan Bali", dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, red. Koentjaraningrat, Djambatan, 1971, hlm. 284-304, C; Geertz, *Peddlers and Princes, Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns*, Chicago—London, 1963.
23. Penulis mendapat keterangan dari Saudara Suharso dari Panitia Sensus bahwa data tentang tempat kelahiran, dst. untuk luar Jawa tidak diperoleh, mungkin sekali karena perbuatan yang merugikan daripada pegawai-pegawai kantor Sensus yang menjual kertas-kertas data tersebut sebagai kertas-kertas bekas yang tak terpakai.
24. Lance Castles, *op. cit.*
25. Mattulada, "Kebudayaan Bugis—Makassar", di dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, *op. cit.* hlm. 264-283.
26. Berdasarkan atas wawancara dengan sejumlah kaum elite Bugis Makassar di Ujung Pandang. Menurut data sensus penduduk tahun 1930, 24,1% dari penduduk di Makassar adalah orang Bugis dan 57,1% adalah orang Makassar. Periksalah *Volkstelling* 1930, V, hlm. 20.
27. Lance Castles, *op. cit.*
28. Periksalah Shamsul Bahrin, *op. cit.*
29. Mc Nicoll *op. cit.*, hlm. 74, catatan kaki 84.
30. Shamsul Bahrin, *op. cit.*
31. Vredenbregt, *op. cit.*
32. *Ibid.* Juga Ramsay, A., "Indonesians in Malaya", *JMBRAS*, 29, 1956.
33. Karl D. Pelzer, *op. cit.*
34. *Volkstelling*, vol. 5.
35. J.T. Siegel, *The Rope of God*. University of California Press, 1969, hlm. 54.
36. Clark L. Cunningham, *The Postwar Migration of the Toba-Bataks to East Sumatera*, Yale University Southeast Asian Studies Cultural Report Series, 1958, hlm. 85.
37. Mc Nicoll, *op. cit.*
38. Cunningham, *op. cit.*, Bab III.
39. *Propinsi Sumatera Utara*, Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sumatera Utara, 1970.

BAB III: PERSPEKTIF SEJARAH

1. Diskusi tentang "teori gelombang" ini dapat dipelajari lebih jauh di Bab pendahuluan dari Kuntjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1971; hlm. 1-36.
2. I. Dyen, *Lexico Statistical Classification of the Austronesian Languages*, New Haven, 1965. Alasan Dyen disokong oleh Murdock dengan menyarankan lebih lanjut bahwa teori-teori yang selama ini mengkleim bahasa-bahasa Austronesia sebagai berasal dari daratan Asia harus dibalik. Lihat, G.P. Murdock, "Genetic Classification of the Austronesian Languages," *Ethnology*, III, 1964; hlm. 117-126.
3. C.S. Coon, *The Living Races of Man*, 1965, seperti yang dikutip dari Kuntjaraningrat, *op. cit.*, hlm. 7.
4. Koentjaraningrat, *op. cit.*

5. *Ibid.* Lihat juga, T. Jacob, "Some Problems pertaining to the Racial History of the Indonesian Region; a Study of Human Skeletal and Dental Remains from Several Prehistoric Sites in Indonesia and Malaysia," Ph.D. Diss., 1967, Utrecht.
6. Koentjaraningrat, *op. cit.*
7. Lihat, W. Solheim, "The 'new look' of Southeast Asian prehistory," dalam *Journal of the Siam Society*, 60:1, 1972; dan "Northern Thailand, Southeast Asia, and World Prehistory," dalam *Asian Perspectives*, 13, 1970; hlm. 145-162.
8. Lihat, P. Benedict, "Austro-Thai and Austroasiatic: The 'Austro' linkage," dalam *Austroasiatic Studies*, U. of Hawaii Press, 1974; dan "Austro-Thai studies: 3, Austro-Thai and Chinese," dalam *Behaviour Science Notes*, 2, 1967; hlm. 275-336.
9. Lihat, G. Benjamin, "Prehistory and Ethnology in Southeast Asia: Some New Ideas," *Working Paper* No. 25, Dept. of Sociology, U. of Singapore, 1974; dan "Indigenous Religious Systems of the Malay Peninsula," *Working Paper* no. 28, Dept. of Sociology, U. of Singapore, 1974.
10. Lihat misalnya, C.F. Gorman, "The Hoabinhian and After: Subsistence Patterns in Southeast Asia during the Late Pleistocene and Early Recent Periods," dalam *World Archaeology*, 2, 1971; hlm. 300-320. Juga, B. Peacock, "Early Cultural Developments in Southeast Asia with Special Reference to the Malay Peninsula," dalam *Archaeology and Physical Anthropology in Oceania*, 6, 1971; hlm. 107-123.
11. G. Benjamin, "Prehistory . . .", *op. cit.*
12. *Ibid.* Juga, hasil wawancara dengan yang bersangkutan.
13. *Ibid.*
14. Cf., Ronald B. Nixon, "Primitive Migrations," dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences*, IX, 1951 ed.; hlm. 420.
15. Pertanyaan-pertanyaan tersebut pernah ditanyakan dalam sebuah survei kwasener kepada lk 150 kepala-kepala suku yang menghadiri simposium "Tambo sebagai sebuah sumber sejarah Minangkabau" (1970), Batusangkar. Ternyata hasilnya bahwa jawaban-jawaban yang diberikan adalah petikan dari cerita-cerita *Tambo* yang hampir semua dari mereka mengenal dengan baik pokok-pokok isinya, atau, di antara yang bersekolah, memetik teori-teori etnologi yang ditulis oleh ahli-ahli Belanda yang mereka baca melalui buku-buku. Lihat analisa dari hasil survai tersebut dalam "Laporan Hasil Pengumpulan Data-data Sedjarah Minangkabau/Pagarruyung," dalam *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sedjarah dan Kebudayaan Minangkabau*, 1-8 Agustus 1970, Batu Sangkar; jilid II.
16. Lihat penjelasan tentang *Tambo* dan *Kaba* dalam A.H. Johns, *Rantjak Dilabueh: A Specimen of the Traditional Literature of Central Sumatra*, Cornell U. Southeast Asia Program Data Paper, 1958.
17. T. Iskandar, *De Hikajat Atjeh*, Verh. van het Kon. Inst. van T.L.V., XXVI, 's-Gravenhage, 1938.
18. R.O. Winstedt, ed., *The Malay Annals or Sejarah Melayu*, *JMBRAS*, vol. XVI, bhg. III, 1938.
19. Lihat, P.E. de Josselin de Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*, Jakarta, Bhratara, 1960; hlm. 99, Cf., "Tambo Pagarrujung," dalam *Himpunan Prasaran*, *op. cit.*, jilid II. Uraian khusus mengenai roman Alexander dalam sastra Melayu, lihat, P.J. van Leeuwen, *De Maleische Alexanderroman*, Meppel, 1937. Tidak mungkin dileakukan bahwa masuknya unsur Iskandar Zulkarnain ke dalam Tambo sebagai neneh-moyang orang Minangkabau adalah pengaruh dari Islamisasi. Untuk mengutip Kathirithambay-Wells: "... G.D. Willink barangkali benar dalam asumsinya bahwa legenda Alexander, yang telah memberi kesan kuat terhadap dunia Timur di bawah pengaruh Islam, hanya dapat dibayang-

kan melalui pengaruh Islam di Indonesia. Pandangan yang sama dianut oleh L.C. Westenenk yang menekankan bahwa legenda Aleksander Agung masuk ke Minangkabau sebagai Tambo Islam . . ." dalam "Ahmad Shah bin Iskandar and the Holy War," *JMBRAS*, vol. 43, bhg. 1, 1970; hlm. 54 *fn.*

20. Cf., M.D. Mansoer *et al.*, *Sedjarah Minangkabau*, Jakarta, Bhratara, 1970, terutama Bab III : "Periode Minangkabau Timur," hlm. 37-49.
21. Hamka, "Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya," dalam Mochtar Naim, ed., *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, CMS, 1968, hlm. 28. Dalam menggambarkan batas-batas wilayah Minangkabau, Marsden menyebutkan:

"At a period not very remote its limits were included between the river of Palembang and that of Siak, on the eastern side of the island, and on the western side between those of Manjuta (near Indrapura) and Singkel, where (as well as at Siak) it borders on the independent country of the Battas."

W. Marsden, *The History of Sumatra*, Kuala Lumpur, Oxford U. Press, 1966, ed. ke tiga reprint, hlm. 333.

22. Gambaran yang cukup terperinci dari batas-batas wilayah Minangkabau diberikan oleh M.Rasjid Manggis Dt. Radjo Pangoeloe dalam bukunya, *Minangkabau: Sedjarah Ringkas dan Adatnya*, Padang, Sri Dharma, 1971; hlm. 44-49.
23. Mansoer, *et al.*, *loc. cit.*
24. M.A.P. Meilink-Roelofsz, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1962.
25. Tome Pires, *Summa Oriental*, terj. dan ed. oleh Armando Cortesso, London, Hakluyt Society 1944.
26. Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 19.
27. Cf., Tome Pires, *op. cit.*, hlm. 161. -
28. Keterangan dari Tambo tidak menjelaskan apakah Basa Ampek Balai berupa lembaga pemerintahan yang orangnya berganti terus menerus, ataukah hanya ditujukan kepada figur sejarah tersebut pada suatu masa tertentu.
29. Nama Adityawarman yang merupakan raja pertama Minangkabau(1347–1375) anehnya tidak pernah disebut dalam tambo. Rujukan (reference) terhadap Adityawarman mungkin tersirat dari ungkapan berikut:

"Datanglah Anggang dari lauik ditembak Datuek nan batigo, badie sadatak tigo dan tamnjo. Mambebek kambieng lari kahutan, manjalak andjieng lari kakoto, bakotek ajam dalam talue. Djatuehlah talue Anggang nantun, karumah Niniek Suri Di Radjo di Pariangan Padang Pandjang, barisi kudo Samburani, bapalanano ameh kandirinjo." (M. Rasjid Manggis, *op. cit.*, hlm. 29; dan interpretasi ungkapan tersebut pada hal. 30).

Cf., diskusi tentang Tambo dalam "Laporan Hasil Pengumpulan Data-data Sedjarah Minangkabau/Pagarrujung," *op. cit.*, hlm. 78 ff.

- 30; Bagaimanapun perlu ditekankan akan adanya perbedaan yang cukup jelas antara sistem pengangkatan menurut aturan Bodi Caniago dan menurut aturan Koto Piliang. Pengangkatan menurut aturan Bodi Caniago lebih didasarkan kepada kwalifikasi-kwalifikasi objektif berdasarkan prestasi dan kemampuan, sedang pada Koto Piliang menurut garis keturunan, yakni dari *mamak ke kemenakan*. Namun dalam kenyataan, bukan hanya pada Koto Piliang, tapi dalam Bodi Caniago pun, sistem Koto Piliang lebih terpakai. Ini terbukti dari penemuan-penemuan dari survei *Penghulu* yang penulis lakukan pada tahun 1970, di mana ditemukan bahwa dari 179 penghulu kepala suku yang ditanya, 92% menerima gelar pusaka lang-

sung dari *mamak* sendiri, dan hanya 8% yang tidak; sedangkan jika dilihat dari segi latar belakang suku, suku-suku yang termasuk ke dalam kelarasan Bodri Caniago juga terwakili. Lihat, Mochtar Naim, "Penghulu di Minangkabau (Penghulu as Traditional Elite in Minangkabau)", *Working Paper No. 14*, Dept. of Sociology, U. Of Singapore, 1973.

31. Taufik Abdullah, "Minangkabau 1900–1927, Preliminary Studies in Social Development," M.A. Thesis, Cornell U., 1967; hlm. 10.
32. *Ibid.*
33. Mansoer, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 65. Cf., Rasjid Manggis, *op. cit.*, hlm. 67.
34. *Ibid.*, hlm. 37-49.
35. *Ibid.*, hlm. 51-52.
36. *Ibid.*, hlm. 124.
37. Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra*, Oxford U. Press, 1969; terutama hlm. 5, 18-19, 33, 91-92.
38. *Ibid.*, hlm. 5.
39. W. Marsden, *op. cit.*
40. O.W. Wolters, *The Fall of Srivijaya in Malay History*, Ithaca, Cornell U. Press, 1970.
41. *Ibid.*, hlm. 2.
42. De Josselin de Jong, *op. cit.*, hlm. 123. Lihat juga, R.J. Wilkinson, *Papers on Malay Subjects*, Kuala Lumpur, Oxford U. Press, 1971; hlm. 7. Marsden, *op. cit.*, hlm. 332.
43. Lihat, Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, Bab 2, 3, 5 & 7.
44. Tome Pires, *op. cit.*, vol. I, hlm. 268.
45. *Ibid.*, hlm. 164.
46. *Ibid.*
47. Lihat, Marsden, *op. cit.*, hlm. 334.
48. *Ibid.*
49. *Ibid.*
50. *Ibid.*
51. *Ibid.*
52. De Josselin de Jong, *op. cit.*, p. 334.
53. Tome Pires, *op. cit.*
54. De Josselin de Jong, *loc. cit.*
55. Kelang, Segamat dan Jelai kemudianya tidak lagi menjadi bahagian dari Negeri Sembilan.
56. Uraian panjang lebar tentang pembentukan Negeri Sembilan dapat dilihat pada Wilkinson, *Papers on Malay Subjects*, *op. cit.*, terutama Bahagian III, "Negeri Sembilan," hlm. 277-468.
57. Wilkinson, *ibid.*, hlm. 295.
58. De Josselin de Jong dalam karangannya mengenai "The Dynastic Myth of Negeri Sembilan" (1971, belum diterbitkan) menyangkal adanya figur historis Raja Malewar.
59. Abdul Samad bin Idris, *Hubungan Minangkabau dengan Negeri Sembilan dari Segi Sejarah dan Kebudayaan*, Seremban, Pustaka Asas Negeri, 1970; hlm. 29.
60. M.D. Mansoer *et al.*, *op. cit.*, hlm. 76.

61. *Ibid.*
62. Dalam Seminar "Islam di Minangkabau" (Padang, 1969) dikemukakan sebagai sebuah argumentasi bahwa masuknya Islam ke Minangkabau telah mulai jauh sebelum periode Aceh. Lihat kertas-karya M.D. Mansoer, "Masuk dan Berkembang Agama Islam di Minangkabau." Lihat juga, M.D. Mansoer *et al.*, *Sedjarah Minangkabau*, op. cit., Bab III; dan Mahmud Junus, *Sedjarah Islam di Minangkabau*, Jakarta, Al Hidayah, 1971. Dikemukakan bahwa Islam telah masuk ke Minangkabau dari rantau timur (Kampar) dari abad pertama Islam (Abad ke 7 Masehi) oleh karena pedagang-pedagang Arab diketahui telah mengunjungi daerah ini sebelum lahirnya Islam dalam perjalanan mereka ke Cina. Pedagang-pedagang Arab inilah yang memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat.
63. Lihat Hamka, *Ajahu: Riwajat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, Jakarta, Djajamurni, 1967; hlm. 18.
64. Seperti yang dikemukakan sebelumnya pada Bab II, jumlah *Anak Jameu* (keturunan Minangkabau) di Aceh menurut Teuku Sjamsuddin adalah kira-kira 20% (atau sekitar 350.000) dari jumlah penduduk Aceh.
65. Berdasarkan pula pada penjelasan yang pernah diberikan oleh Prof. Ismail Suny, yang dia sendiri adalah *anak jameu*. Malah di rumahnya sendiri, katanya, dia berbahasa Minang dengan isteri dan keluarganya.
66. Hamka, "Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya," op. cit., hlm. 38.
67. Tome Pires, op. cit., *passim*.
68. "Het Goud van Ophir," *Indische Gids*, I, hlm. 695-696.
69. Marsden, op. cit., hlm. 335.
70. E.M. Loeb & R. Heine-Geldern, *Sumatra: Its History and People*, Vienna, 1935, *passim*. Marsden, umpamanya, mengemukakan hal berikut yang memungkinkan kita mengambil kesimpulan bahwa kontak antara Minangkabau dan Batak telah lama ada:
- "Notwithstanding the independent spirit of the Battas, and their contempt of all power that would affect a superiority over their little societies, they have a superstitious veneration for the sultan of Menangkabau, and shew blind submission to his relations and emissaries, real or pretended, when such appear among them for the purpose of levying contribution: even when insulted and put in fear of their lives, they make no attempt at resistance: they think that their affairs would never prosper; that their buffaloes die; that they would remain under a kind of spell, for offending those sacred messengers."* (Marsden, *ibid.*, hlm. 376-377).
71. M.O. Parlindungan, *Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao; Terror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak, 1816-1833*, Jakarta, Tandjung Pengharapan, 1964.
72. *Ibid.*, *passim*.
73. Biasanya penduduk rantau memelihara tradisi memudiki silsilah keturunan mereka ke pedalaman (Luhak Nan Tigo) seperti yang penulis perhatikan di Batang Kapas, rantau Pesisir Selatan. Di Pariaman mereka membedakan orang-orang yang berasal dari *darek* dan yang bukan. Hal yang sama juga diceritakan oleh Prof. St. Kerajaan, bekas Rektor P.T.P.G. Batu Sangkar, tentang orang Minangkabau di Sumatera Timur yang masih menyadari akan asal-usulnya walaupun tidak lagi mengikuti adat matrilineal.
74. Pembagian wilayah administratif menurut propinsi umumnya sejalan dengan pembagian menurut residensi dulu.
75. De Josselin de Jong, *Op. cit.*, hlm. 7.

76. C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Ned. Indie*, 3 jilid, Leiden, 1918–1933. Mengenai adat Minangkabau, lihat jilid 1, hlm. 246-272. Van Vollenhoven memasukkan rantau-rantau berikut kedalam wilayah hukum (*Rechtskring*) Minangkabau: (1) Siak, (2) Kampar, (3) Kuantan/Indragiri, (4) Tembesi Ulu/Jambi, (5) Muko-muko, (6) Kerinci, (7) Natal, (8) Barus, (9) Singkel, (10) Tapak Tuan, (11) Meulaboh, (12) Naning (Melaka), (13) Negeri Sembilan (14) sebagian Kedah, dan juga (15) Madagascar.
77. Van Vollenhoven, *Ibid.*
78. J.C. van Leur, *Indonesian Trade and Society*, The Hague, W. van Hoeve, 1955; hlm. 101.
79. Menurut Hamka yang mengunjungi makam ini di tahun 1960, inskripsi pada batu nisannya bertuliskan a.l.:

"Maka Sri Sulthan Muhammad Tajuddin menitahkan kepada Tuan Haji Khatib Abdullatif supaya menerangkan silsilah ini agar diketahui anak cucu, raja yang mempunyai takhta kerajaan di negeri Brunei Darussalam turun temurun yang mengambil pusaka nobat negara dan genta alamat dari negeri Johor Kamalul Maqam, yang mengambil pusaka nobat negara genta alamat dari Minangkabau negeri Andalas..." (Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Jakarta, Tekad, 1963; hlm. 66-67).

80. Tom Harrison dalam *The Malays of South-west Serawak before Malaysia: A Socio-ecological Survey* (McMillan, 1970) juga menghubungkan genealogi bangsawan Serawak ke Minangkabau. Katanya,

"It is not surprising, therefore, that the oldest recorded genealogy in Sarawak Malay hands today traces thirty generations back to Minangkabau in Sumatra. It will be salutary to print this genealogy here, in simplified form, and try to bear it in mind by way of background."

Abang Gudam, like many before him, came as a trader from Sumatra. He rescued a Brunei lady who had been seized by the Sultan without her father's consent, married her and settled in the Saribas district to found the Malay aristocracy of that area. The descendants of Rajah Swan were not Moslems (they were possibly 'hindus') until well on in this journey." (hlm. 25-27).

Hamka dalam hubungan ini juga mengungkapkan,

"Bangsawan-bangsawan Serawak yang memakai gelar-gelar Datuk itu [maksudnya sama dengan yang di Minangkabau], seketika saya temui di bulan Oktober 1960 itu juga, dalam persinggahan saya di Kuching dengan bangga menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Minangkabau." (*Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, op. cit., hlm., 67).

81. Menurut Najeeb Saleeby, naskah aslinya berada di tangan Haji Butu Abdul Baqi, perdana menteri dari Sultan Sulu, yang mengaku bahwa nenek moyangnya berasal dari Mantiri Asip, salah seorang menteri dari Raja Baginda. Lihat, *The History of Sulu*, Manila, Bureau of Printing, 1908; jil. IV, Bhg. II, hlm. 147.
82. *The History of Sulu*, *ibid.*, hlm. 159-160.
83. Van Vollenhoven, *op. cit.*, hlm. 433. Tanggapan kita terhadap hubungan tersebut adalah bahwa kasus matrilinealitas dari Indonesia bhg Timur tidak sama dengan kasus Minangkabau; kasus Indonesia Timur lebih mirip kepada sistem double-descent dari Irian dan Australia.
84. M.J. Adams, "Myths and Self-image among the Kapunduk People of Sumba," *Indonesia*, No. 10 (Oct), 1970; hlm. 81 sqq.
85. Van Vollenhoven, *op. cit.*
86. Jacques Dournes, "The Cultural Triangle," unpubl. MS., 1970.
87. Lihat Muhammad Radjab, *Perang Paderi*, Jakarta, Balai Pustaka, 1954, *passim*.

88. Kelihatannya Kelang telah dipergunakan sebagai pelabuhan masuk oleh perantau Minangkabau, terutama setelah mundurnya Melaka. Cf., A. Samad bin Idris, *op. cit.*, hlm. 18.
89. T. Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda movement in West Sumatra (1927-1933)*, Ithaca, N.Y., Monograph Series, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Cornell U., 1971; hlm. 10.
90. *Ibid.*
91. Hans-Dieter Evers & Sjofjan Thalib, *Penduduk Kota Madya Padang*, Padang, CMS, 1970; hlm. 6.
92. Mengenai *Cultuurstelsel* (Tanaman Paksa) lihat a.l., J.S. Furnival, *The Netherlands India: A Study in Plural Economy*, New York, 1944. Juga, J.J. van Klaveren, *The Dutch Colonial System in the East Indies*, Rotterdam, 1953.
93. *Gedenkboek der Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers, 1873-1908*, Arnhem, 1908.
94. Lihat, Bernhard Dahm, *History of Indonesia in the Twentieth Century*, London, Pall Mall Press, 1971; hlm. 12 sqq.
95. Uraian terbaik mengenai kehidupan dan peranan dari Syeikh Ahmad Khatib diberikan oleh Hamka dalam kertas-kerja yang disampaikannya pada Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau (Batu Sangkar, 1970). Lihat, *Himpunan Prasaran, op. cit.* Lihat juga, "Sjech Ahmad Chatib," dalam Tamar Djaja, *Pusaka Indonesia, Riwayat Hidup Orang2 Besar Tanah Air*, Jakarta, Bulan Bintang, 1966, jil. 2; hlm. 565-571. Mengenai peranan dari ulama-ulama modernis di Sumatera Barat, lihat a.l., Deliar Noer, "The Rise and Development of the Modernist Movement in Indonesia during the Colonial Dutch Period," Ph.D. diss., Cornell U., 1962. Juga, Hamka, *Ajahku, op. cit.*
96. Lihat, Mahmud Junus, *Sedjarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Mahmudijah, 1960.
97. Lihat, C. Snouck Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of the Nineteenth Century*, London, 1951.
98. *Ibid.*
99. Lihat, B. Schrieke, "The Causes and Effects of Communism on the West Coast of Sumatra." dalam *Indonesian Sociological Studies*, Bhg. I, The Hague, W. van Hoeve, 1955; terutama Bab I.
100. M.D. Mansoer *et al.*, *op. cit.*, hlm. 160.
101. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 97.
102. *Ibid.*, hlm. 102-104.
103. M.D. Mansoer *et al.*, *op. cit.*, hlm. 159.
104. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 199.
105. B.H.M. Vlekke, *Nusantara: A History of Indonesia*, The Hague, W. van Hoeve, 1959; hlm. 308-319.
106. *Ibid.*, hlm. 309-310.
107. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 108. sqq.
108. *Ibid.*, hlm. 100.
109. *Ibid.*
110. *Ibid.*
111. *Ibid.*

112. *Ibid.*, hlm. 102.
113. *Ibid.*
114. *Ibid.*, hlm. 103.
115. *Ibid.*
116. *Ibid.*, hlm. 105.
117. Lihat, Jahja, "Hukum Waris dan Tanah dan Praktek-praktek Peradilan," dalam Mochtar Naim, ed., *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, *op. cit.*, hlm. 83-84.
118. Schrieke, *op. cit.*
119. Vlekke, *op.cit.*, hlm. 386.
120. T. Abdullah, "Minangkabau 1900-1927", *op. cit.*, hlm. 63.
121. *Ibid.*, hlm. 60.
122. Di tahun 1925 murid-murid perempuan telah merupakan 40% dari seluruh anak didik di sekolah-sekolah pemerintah di Sumatera Barat. Lihat, T. Abdullah, *Schools and Politics*, *op. cit.*, hlm. 57.
123. *Ibid.*, hlm. 61.
124. *Hollands Inlandsche School*, sekolah dasar untuk bumiputera dengan mempergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.
125. Berdasarkan wawancara dengan Prof. Bahder Djohan dan Prof. Ali Akbar yang kedua-duanya mendapatkan didikan kedokteran pada masa itu. Minangkabau merupakan 8% dari seluruh lulusan, sedang persentase orang Minangkabau hanyalah 3% dari seluruh penduduk Indonesia. Lihat, Tabel IV.4, Bab IV berikut.
126. Lihat analisa mengenai perantau di kota-kota tersebut pada Bab IV berikut.
127. T. Abdullah, *Schools and Politics*, *op. cit.*, terutama diskusi mengenai "The New Madrasah and the Kaum Muda Educated Group," hlm. 54-69.
128. Diskusi mengenai peranan dari kaum elite ini, lihat, R. van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, The Hague, W. van Hoeve, 1960.
129. A. Teeuw, *Modern Indonesian Literature*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1967; terutama fasil mengenai "Minangkabau Society and the Indonesian Novel," hlm. 54-78.
130. *Ibid.*, hlm. 54.
131. *Ibid.*, hlm. 54-55.
132. Wawancara dengan perantau-perantau Minangkabau di Singapura dan Johor Baru.
133. Lihat, Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca, Cornell U. Press, 1962.
134. *Djakarta dalam Angka 1968*, Pemr. D.C.I. Djakarta, 1968; Tabel 1.15, hlm. 14.
135. Hans-Dieter Evers, *op. cit.*, Tabel 1.
136. Pauline D. Milone, *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts*, Berkeley, U. of California Inst. of International Studies, 1966; Tabel 5.
137. H. Feith, *op. cit.*
138. Lihat, B. Dahm, *op. cit.*, Bab VII. Juga penting, Daniel Lev dan H. Feith, "The End of the Indonesian Rebellion," *Pacific Affairs*, 36, No. 1, Spring 1963.

BAB IV: ORANG MINANGKABAU DI RANTAU SEKARANG

1. Lihat Tabel II.3, Bab II.
2. Berdasarkan wawancara dengan Walikota Medan (Drs. Sjurkani), Prof. A. Mahdi dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan lain-lain di Medan, Februari, 1971.
3. Sebahagian besar dari mereka telah merantau ke sana semenjak sebelum perang.
4. Dari wawancara dengan beberapa mereka dan juga wawancara dengan ketua-ketua masyarakat Minangkabau diketahui bahwa mereka terdiri dari lebih 50% penarik becak di Medan.
5. Wawancara dengan Prof. A. Mahdi.
6. Wawancara dengan H.M.Arbie, Pemilik perusahaan penerbitan dan percetakan offset (Famadju) yang juga pemilik sebuah hotel baru bertingkat tiga (asal Maninjau), dan H.Nurbi St.R.Tinggi, pemilik Toko Buku Nasional (asal Bukittinggi).
7. Drs. Sjurkani (asal Solok).
8. Wawancara dengan sejumlah dosen Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).
9. Posisi mereka cocok dengan pola umum okupasi perantau di tempat lain.
10. Istilah "*kumango*" sebelumnya berasal dari nama kampung yang disebut Kumango di Batu Sangkar. Barang dagangan yang mereka jual kemudianya disebut pula "*kumango*", disebabkan kebanyakan dari mereka yang menjual barang yang sama pada suatu masa ternyata berasal dari kampung tersebut.
11. Wawancara dengan Hasan Basri, pedagang grosir yang berpengaruh dan makelar rumah di Medan.
12. Kebiasaan ini nampaknya juga menjalar pada kantor-kantor pemerintah.
13. Kepemimpinan Muhammadiyah di Sumatera Utara, khususnya di Medan, selalu dalam tangan perantau Minangkabau semenjak tahun-tahun sebelum-perang.
14. Perusahaan tekstil Pardede di Medan dewasa ini diperkirakan sebagai perusahaan tekstil yang terbesar di Sumatera.
15. Perkiraan yang dikenakan oleh St.Balia, pegawai tinggi senior pada Kantor Gubernur Riau, dan ketua masyarakat Minangkabau di Pekanbaru.
16. Wawancara dengan beberapa dosen dan pimpinan universitas UNRI, Pekanbaru.
17. Wawancara dengan beberapa pemborong dan anggota staf Caltex.
18. Insiden-insiden seperti itu jelas tidak terjadi di Medan di mana jumlah orang Batak dan orang Minangkabau kira-kira bersamaan banyaknya.
19. Bandingkan dengan orang Batak di Sumatera Timur yang juga memiliki posisi geografis yang bersamaan. Cf., E.M. Bruner, "Medan: The Role of Kinship in an Indonesian City," dalam A. Spoehr (ed.), *Pacific Port Towns and Cities*, Honolulu, 1963.
20. Berdasarkan wawancara dengan banyak orang Minangkabau yang pergi merantau ke Tanjung Pinang.
21. Wawancara dengan seorang dosen UNRI yang berasal dari Taluk Kuantan.
22. Wawancara dengan Amrah Halim dari UNRI, Palembang, dan beberapa pemimpin masyarakat Minangkabau di Palembang.
23. Anak-anak mereka, bagaimanapun juga, umumnya menganggap diri mereka sebagai orang Palembang walaupun mereka sadar benar bahwa mereka keturunan Minangkabau.
24. Dawanis SH, hakim pengadilan tinggi di Palembang.

25. Penduduk asli dari kota-kota di manapun cenderung untuk memegang pekerjaan kasar yang tidak diingini para pendatang yang biasanya mengisi tangga okupasi tingkat menengah. Lihat W.F.Wertheim, "The Trading Minorities in Southeast Asia," dalam *East-West Parallels*, The Hague, W.Van Hoeve, 1964; hlm. 39-84.
26. Termasuk Gubernur Sumatera Selatan, A.K. Gani dan M'Isa yang orang Minangkabau.
27. Lihat *Volkstelling 1930*, Vol.I, hlm. 18.
28. Jumlah orang Minangkabau di Batavia pada hlm. 18 (vol.1) ialah 3.818 orang; tetapi pada hlm. 24 hanya 2.943 (5.028 untuk Jawa Barat termasuk Batavia). Dipertambahkan dengan yang ada di Jawa Tengah (vol. 2, hlm. 22) dan Jawa Timur (vol. 3, hlm. 18), jumlah orang Minangkabau seluruhnya akan menjadi hanya 6.574.
29. Wawancara dengan Prof. Bahder Djohan dan Dr. Ali Akbar di Jakarta, 1970.
30. Perkiraan Castles dengan perkembangan 32,5% untuk angka pertumbuhan alamiah tahun 1930 ternyata jauh ada di bawah rata-rata nasional, yakni 60%, (Lihat Tabel II.6, % perkembangan untuk tahun 1961). Lance Castles, "The Ethnic Profile of Djakarta," *Indonesia*, I, April 1967; hlm. 184.
31. Angka yang berlebih-lebihan ini dari segi Gubernur DKI Jakarta Raya mungkin lebih berarti politis untuk pengendalian arus migrasi dengan mengumumkan bahwa Jakarta adalah kota tertutup untuk pendatang baru.
32. Castles, *op. cit.*, hlm. 186.
33. Lihat artikel khusus tentang orang Minangkabau di Jakarta dalam mingguan *Tempo*, 15 Januari 1972. Cf., *Aneka Minang*, Nos. 13-14, 1973.
34. Wawancara dengan Oemar Bakri Dt. Tan Besar, seorang pengusaha pemilik usaha penerbitan dan percetakan asal Minangkabau, di Bandung.
35. Wawancara-wawancara dengan Rosihan Anwar (Pedoman), Nawawi Alif, Zulharman Said (Kami), Rusli Dahlan (*Aneka Minang*), dan yang lain-lain.
36. Sebaran etnis dari para lulusan Fakultas Kedokteran diperoleh atas bantuan Dr. Syamsir Daily yang mengetahui sebahagian besar dari mereka itu.
37. Lihat *Tempo*, 15 Jan., 1972.
38. Observasi oleh Marshall Green, bekas Duta besar A.S. untuk Indonesia di Jakarta, seperti yang diceritakan Brig.Jen. Pol. Awaluddin Djamin.
39. Postma, P.A., *Efek2 Urbanisasi di Jakarta*, L.P.M., Djakarta, 1968; hlm. 15-22.
40. Sebagai tambahan, setiap perkumpulan bersifat kabupaten atau kenagarian praktis mempunyai perkumpulan pelajar/mahasiswa.
41. Wawancara dengan Ny. Ita Syarif, aktivis IBI, Jakarta.
42. Hendra Esmara, *West Sumatera Facts and Figures*, Tabel XV.14, hlm. 193.
43. *Ibid.*, Tabel XV. 15, hlm. 194.
44. Wawancara dengan Kapten M.Djamil di Bandung. Angka perkiraan ini berasal dari Gubernur Jawa Barat y.l., Jenderal Mashudi.
45. Sebagai contoh, Syafruddin Prawiranegara, pernah jadi Perdana Menteri Pemerintah Darurat R.I. dan Menteri Keuangan, mengaku sebagai keturunan bangsawan Pagarruyung yang melarikan diri ke Banten sewaktu Perang Paderi.

46. Wawancara dengan A. Gaffar Ismail, seorang ulama terkenal keturunan Minangkabau yang bermukim di Pekalongan; dan informasi yang diperoleh dari A.R. St Mansoer, bekas Ketua Umum Muhammadiyah, yang memulai karirnya sebagai pedagang batik di Pekalongan dan sekaligus aktivis Muhammadiyah.
47. Perkiraan diberikan oleh Noviar (bekas mahasiswa yang jadi politikus) dan Sjofjan H. Lamadi (mahasiswa) dalam wawancara di Yogyakarta.
48. Data statistik, termasuk daftar anggota dan brosur disusun oleh Ketua P.W.S.T., A. Manan Khadin, yang membangun sebuah sekolah lanjutan pertama di Solo.
49. Himpunan Sehati sebuah perkumpulan yang telah berdiri sebelum Perang Dunia II. Hasil wawancara dengan pemuka-pemuka masyarakat Minangkabau di Malang.
50. Sumatra Sepakat, sesuai dengan namanya menghimpun semua perantau Sumatera dalam satu organisasi yang didirikan jauh sebelum PD.II. Namun, hanya orang Minangkabau dan Batak Mandahiling saja yang masih tetap aktif. Kini 90% anggotanya adalah orang Minangkabau. Para perantau dari daerah lain pulau Sumatera telah mendirikan organisasi masing-masing.
51. Daftar disediakan oleh Dr. Sabirin, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
52. Kebanyakan adalah bekas perwira Batalyon Pagaruyung yang dikirim dari Sumatera Barat pada tahun-tahun permulaan Revolusi.
53. Wawancara dengan Chadir Anwar dari IKIP Bandung.
54. Perkembangan kedai-kedai Minangkabau dan Cina juga disebabkan perkembangan pasar atas tuntutan pedagang kaki-lima Minangkabau agar mereka memperoleh tempat yang layak untuk berdagang.
55. Keinginan pulang ke kampung yang telah juga berkurang di antara perantau elite malahan akan lebih berkurang lagi di antara mereka yang kawin dengan yang bukan Minangkabau.
56. Wawancara dengan sejumlah mereka yang saya temui di Ujung Pandang, Jakarta dan Bukittinggi. Kebanyakan dari pedagang antar kota ini adalah bekas pedagang kakilima di Jakarta yang terkena pengaruh penglokasiannya pedagang kakilima di Jakarta.
57. Pengamatan pribadi dari seorang pelaut Minangkabau yang pernah mengunjungi sebahagian besar dari pulau-pulau tersebut yang saya jumpai di Ujung Pandang.
58. Counter-check dengan non-Minangkabau sering diadakan. Kenyataannya bahwa sebahagian besar cendekiawan Minangkabau bersympati dengan partai Masjumi atau organisasi Muhammadiyah.
59. Wawancara dengan Amir Ali, Kepala Kantor Wilayah P dan K Lombok, seorang Minangkabau dan pimpinan Muhammadiyah di Lombok.
60. Wawancara dengan Prof. Zainal Abidin dari UNHAS, Ujung Pandang, yang juga menulis sebuah essay tentang 'Lontara' sebagai sumber sejarah.
61. Seorang pemimpin PERMI terkenal di Sumatera Barat. Lihat Deliar Noer, "The Rise and Development of Modernist Muslim Movement", Ph.D diss., Cornell U., 1962; hlm. 77. Juga, H. Bouman, *Enige Beschouwingen over de Ontwikkeling v/h Indon. Nationalisme op Sumatra's West Kust*, Groningen, J.B. Walters, 1949; hlm. 86.
62. Counter-check dengan sejumlah pemimpin Bugis di Ujung Pandang dan Watapone.
63. Seperti dikutip dari de Josselin de Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan*, hlm. 123. cf., P. Schebesta, *Orang Utan*, Leipzig, Ozeaniens, Anthropos, 1933. Pandangan tersebut telah dibantah oleh versi non-migrasi yang up-to-date tentang pra dan proto-sejarah Asia Tenggara.

64. Lihat M.B.Hooker, *Readings in Malay Adat Laws*, Singapore, Singapore U. Press; 1970.
65. J.E.Nathan, *The Census of British Malays*, 1921, London, Waterlow & Sons, 1922; hlm. 72.
66. *Ibid.*, hlm. 76.
67. Shamsul Bahrin, *op. cit.*, hlm. 155.
68. Perkiraan berdasarkan pada jumlah orang Melayu di Negeri Sembilan tahun 1969, mayoritas mereka dianggap Melayu Minangkabau Negeri Sembilan.
69. Daerah-daerah ini dipelajari oleh R.Provencher: *Two Malay Communities in Selangor: an Urban-Rural Comparison, Social Habitats and Interaction*. Berkeley, 1968.
70. David Radcliffe, "The Peopling of Ulu Langat", *Indonesia*, 8 (Oct.), 1969.
71. Shamsul Bahrin, *op. cit.*, p. 155.
72. Wawancara dengan sejumlah pemimpin masyarakat Minangkabau di Singapura.
73. Keterangan diberikan oleh orang Indonesia keturunan Cina yang berdiam di Negeri Belanda bertahun-tahun.

BAB V: POLA KEHIDUPAN DI RANTAU

1. Cf. R. Provencher, *Two Malay Communities in Selangor: An Urban Rural Comparison of Social Habitats and Interaction*, Berkeley, 1968.
2. Survei kwasener kedua kemudian juga diadakan tahun 1973 yang hasilnya memperlihatkan sedikit turunnya ambisi mahasiswa untuk menjadi pegawai. Menurunnya ambisi tersebut mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa sejak beberapa tahun sebelumnya pintu untuk menjadi pegawai sudah mulai tertutup.
3. Sebagai kekecualian perlu disebutkan di sini sejumlah tentara dari Divisi Banteng yang dikirim ke Jawa Barat pada permulaan tahun 1950-an yang kebanyakan juga terdiri dari bintara ke bawah. Tapi Batalion Pagaruyung ini kemudian dibubarkan karena banyak dari mereka yang enggan bertempur dengan tentera Darul Islam, karena pertimbangan-pertimbangan psikologis keagamaan.
4. Lihat, LetKol. Soedarto, "Laporan Tentang penerimaan Tjalon Taruna AKABRI Umum/Darat Didaerah KODAM III/17 Agustus," Adjudan Djenderal Komando Daerah Militer III/17 Agustus, Padang, 1970.
5. Simposium ini luas membicarakan mengenai sikap-sikap mental dari suku Minangkabau dalam menghadapi era pembangunan. Salah satu dari kelemahan suku Minangkabau adalah kurangnya minat dalam bidang kemiliteran yang memerlukan disiplin hierarkis yang kuat.
6. Sebenarnya hanya orang-orang yang benar-benar mengenal masakan Minang saja yang bisa membedakan dari setiap daerah tertentu itu. Umumnya dapat dikatakan bahwa masakan Pariaman dan Singkarak terkenal dengan masakan ikannya.
7. H.D. Evers et al., *Data-data tentang Penduduk Kota Madya Padang, tahun 1970*, U. of Singapore, 1971.
8. Lihat, *The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology*, The Hague, W.van Hoeve, 1958; terutama: "Town Development in the Indies," hlm. 1-77.
9. Lihat, H.D. Evers, "Urban Involution: The Social Development of Southeast Asian Towns," *Working Paper*, No. 2, Dept of Sociology, U. of Singapore, 1972.
10. Kebiasaan ini mengingatkan kita pada pola migrasi dari suku Tamil di Malaysia dan Singapore yang banyak di antaranya meninggalkan anak dan isterinya di India atau Sri Langka

dan mengunjungi keluarganya sekali setahun atau sekali dalam beberapa tahun. Lihat, a.l., Kernel Singh Sandhu, *Indians in Malaya*, Cambridge U. Press, 1969.

11. Hendra Esmara dan Sjahruddin, *Penduduk Sumatera Barat*, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masjarakat, Fak. Ekonomi, U. Andalas, Padang, 1972; Tabel 2, hlm. 13.
12. Lihat, A. Teeuw, *Modern Indonesian Literature*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1967; terutama: "Minangkabau Society and the Indonesian Novel," hlm. 54-78.
13. Contoh terbaik diberikan oleh Hamka dalam novelnya: *Tenggelamnya Kapal van der Wijk*, di mana tokoh utama cerita, Zainuddin, menemukan dirinya sebagai orang asing di kampung ayahnya di Sumatera Barat, yang selama ini dia idam-idamkan untuk melihatnya. Dia akhirnya menyadari bahwa dengan berayakan orang Minangkabau (sedang ibu Bugis) tidaklah menyebabkan dia menjadi orang Minangkabau pula. Di Sumatera Barat rata-rata orang menganggap dia sebagai orang Bugis, karena ibunya orang Bugis.
14. Cf., R. Provencencher, *Two Malay Communities in Selangor*, op. cit., di mana dia mempergunakan pendekatan orientasi dan ekspektasi nilai yang sama di antara orang-orang Melayu dari berbagai latarbelakang etnik di Kampung Baru, Kuala Lumpur.
15. H. Feith, *The Indonesian Elections of 1955*, Modern Indonesia Project, Cornell U., Ithaca, N.Y., 1957; *passim*.
16. Usdek berarti Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Indonesia dan Ekonomi Terpimpin; salah satu slogan yang diciptakan oleh Sukarno dalam era demokrasi terpimpinnya.
17. Lihat, M.O. Parlindungan, *Tuanku Rao*, Djakarta, Tandjung Pengharapan, 1964; terutama Bhg II, Bab 11 dan 12, hlm 172-270.
18. Kehidupan preman dari kedua suku Batak dan Minangkabau ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut, karena ke dua-duanya mengalami pendidikan sosial yang merangsang mereka untuk berpikir dan bersikap bebas.
19. Dalam pikiran generasi tua di Minangkabau ada semacam stereotipe tentang suku Ambon dan Menado ini, karena pengenalan mereka terhadap suku-suku ini hanya terbatas pada kehadiran suku-suku ini sebagai serdadu dan polisi di kota-kota di Sumatera Barat di jaman penjajahan dahulu. Orang-orang dari suku Ambon dan Menado ini digambarkan sebagai bengis, galak, dan 'lebih belanda dari belanda.' Gambaran ini bagaimanapun berubah dengan sendirinya dengan banyaknya dari suku Ambon dan Menado ini yang kemudian menjadi orang pintar-pintar di tingkat nasional.
20. Fenomena yang semua terbatas hanya di Jakarta saja, seperti pembangunan pasar proyek Senen dan Tanah Abang, yang rata-rata jatuh ke tangan Cina, kemudian meluas sampai ke seluruh kota-kota di Indonesia, kecuali barangkali kota-kota di Sumatera Barat. Tapi kekecualian itu hanya dimungkinkan oleh adanya iktikad dari pemerintah setempat untuk mendahulukan kepentingan pengusaha dan pedagang pribumi dari lain-lainnya.
21. Seperti yang diungkapkan oleh E.M. Bruner dalam tulisannya: "The Expression of Ethnicity in Indonesia," *Seadag Papers*, The Asia Society, N.Y., 1972, hlm. 25.
22. *Webster's Dictionary*, 13th International ed., hlm. 530. Cf., Amilijoes Sa'danoer, "Masalah Kedjahanatan di Sumatera Barat Dewasa Ini," Simposium Sosial-Budaya, 27-28 April 1970, Padang.
23. *Parewa*, lebih dari konotasi *pareman* (preman, *frijman*), adalah segelintir orang yang sejak mudanya telah memperlihatkan perilaku-perilaku non-conformis, yang memusatkan kehidupannya di lepau-lepau, bukan di surau, dan yang senang dengan kehidupan berjudi, menyabung ayam, dan bersilat. Seperti diungkapkan oleh Hamka dalam novelnya, *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck*, (Djakarta, Balai Pustaka, 1957; ed. pertama: 1938), mereka

juga mengenal kode etik yang tinggi. Dengan adanya parewa di kampung bersangkutan, keamanan justeru terjamin, karena mereka yang merasa terpanggil untuk mempertahankan kampung dari serangan luar. Pencurian atau apapun yang dilakukannya tidak pernah mereka lakukan di kampung sendiri. Hubungan pertemanannya biasa sangat akrab, yang menganggap teman sebagai saudara sendiri, dan meanggap ibu atau keluarga dari teman sebagai ibu atau keluarganya sendiri pula. Mereka tidak mengganggu anak-anak gadis dikampungnya, malah mereka melindungi anak-anak gadis dan wanita umumnya di kampungnya. Dalam berjudi mereka juga mengenal kode etik, di mana yang kalah diberi bekal untuk pulang oleh yang menang. Parewan pun sopan dan menghargai orang alim. Tak jarang jika mereka pun membantu kegiatan-kegiatan keagamaan sendiri, walaupun hampir tidak ada dari mereka yang sembahyang. Cf., Deliar Noer, "The Rise and Development of the Modernist Muslim Movement in Indonesia during the Dutch Colonial Period (1900-1942)," Ph.D diss., Cornell U., 1963, hlm. 53, fn.

24. Hildred Geertz, "Indonesian Cultures and Communities," dalam Ruth McVey (ed.), *Indonesia*, New Haven, HRAF Press, 1963; R.W. Liddle, *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study*, New Haven, Yale U. Press, 1970; E.M. Bruner, *op. cit.*
25. R.W. Hinddle, *ibid.*, hlm. 227; cf., Bruner, *ibid.*, hlm. 11; H. Geertz, *ibid.*, hlm. 3741.
26. E.M. Bruner, *ibid.*, hlm. 12-13.
27. Salah satu dari pantun atau gurindam yang paling sering disebut waktu melepas seorang anak muda ke rantau adalah pantun berikut:

Kalau jadi 'nak ke lepau
 Yu beli belanak beli
 Ikan panjang beli dahulu
 Kalau jadi 'nak merantau
 Ibu cari dunsanak cari
 Induk semang cari dahulu.
28. Hasil wawancara dengan dr. Syamsir Daili dan Prof. Hanif, U. Andalas, Padang. Juga masalah 'padangitis' ini diungkapkan oleh Professor Hanif dalam pidato pengukuhan di U. Andalas, Padang, 1971.
29. Istutiah Gunawan Mitchell, "Gangguan Djawa dan Latar Belakang Kebudajaannya pada Orang Minangkabau di Djakarta," skripsi sarjana pada Fak. Sastra, U.I., Jakarta, 1969.
30. Lihat kritik dr. Hasan Basri Saanin dalam majalah *Djawa*, No. 197.
31. Interviu dengan dr. Syamsir Daili, U. Andalas, Padang, yang sebelumnya pernah mendapat kuliah dari dr. Sie Pek Giok di Fak. Kedokteran U.I., Jakarta.
32. James S. Plent, seperti yang dikutip dari I.G. Mitchell, *op. cit.*, hlm. 153.
33. I.G. Mithcell, *ibid.*, hlm. 153.
34. Perkiraan ini diberikan oleh ketua organisasi ninik-mamak di Jakarta, dan oleh Mr. St.Mohd. Rasjid, bekas Gubernur Sumatera Tengah. Perlu juga dicatat di sini kasus dari beberapa orang terpandang yang dibesarkan dan berperan di rantau, yang pulang hanya untuk menerima gelar pusaka datuk, dan kembali ke rantau, karena sebagian besar dari anak ke menakan justeru berada di rantau.
35. Hendra Esmara dan Sjahruddin, *Penduduk Sumatera Barat*, *op. cit.*, Tabel 4, hlm. 14.
36. Interviu dengan Kepala Kantor Pos Silungkang, 1970.
37. Dari hasil wawancara dengan banyak perantau yang hidupnya cukup senang di rantau, umumnya mereka mengeluh dengan fasilitas w.c. dan tempat mandi di kampung, karena jarang sekali ada rumah yang mempunyai w.c. dan kamar mandi sendiri di kampung. Untuk turut bersama-sama mandi ke sungai bersama-sama orang kampung lain dirasakan sebagai berat di samping juga tidak cukup bersih.

38. J.T. Siegel, *The Rope of God*, Berkeley, U. of California Press, 1969, hlm. 166.
39. Lihat, Parada Harahap, *Kumpulan Karangan Dr. M. Amir*, Medan, 1949; *passim*.

BAB VI: SEBAB-SEBAB MERANTAU

1. Pada masa inilah rantau Minangkabau di pantai Barat Aceh berkembang.
2. Lihat, H.M. Lange: *Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger ter Westkust van Sumatra (1819-1845)*, s'Hertogenbosch, 1852. Mengenai Perang Paderi, lihat a.l., M. Radjab, *Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1838)*, Djakarta, Perpustakaan Perguruan Kem. P P & K, 1954.
3. B. Schrieke, "The Causes and Effects of Communism on the West Coast of Sumatra," *Indonesian Sociological Studies*, part I, Bandung, Sumur Bandung, 1960; hlm. 97.
4. P.E. de Josselin de Jong, "Minangkabau Masjarakat Matrilineal dan Migrasi," a Research Proposal, April 1972, hlm. 8.
5. Diolah dari angka-angka 1970, *Sumatera Barat dalam Angka-angka, 1970*: Padang, Kantor Sensus & Statistik Sumatera Barat, 1971; Tabel 12 dan 65.
6. Mochtar Naim, "Perkembangan Kota-kota di Sumatera Barat," *Prisma*, No. 3, II, Juni 1973.
7. Dikutip dari Shamsul Bahrin, "Indonesians in Malaya," U. of Sheffield M.A. Thesis, 1964; hlm. 34.
8. Lihat Daftar Bibliografi dari studi ini.
9. Lihat, Zainul Jasni, *Ekonomi Swadaya: Membangun Daerah untuk Kemakmuran Bangsa, dengan Case Study: Sulawesi Selatan*, Tesis Doktor, 1968, U. Hasanuddin, Makassar; hlm. 18.
10. *Ibid.*
11. Mattulada, "Kebudajaan Bugis-Makassar," dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudajaan di Indonesia*, Djakarta, Djambatan, 1971; hlm. 271.
12. *Pola Dasar dan Rentjana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 1969-1973*, Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, 1969; hlm. 9.
13. H. Geertz, "Indonesian Cultures and Communities," dalam R. McVey (ed.), *Indonesia, Southeast Asia Studies*, Yale U., 1963, hlm. 40-42.
14. J.T. Siegel, *The Rope of God*, Berkeley, U. of California Press, 1969; hlm. 54.
15. C. Cunningham, *The Postwar Migration of the Toba Bataks to East Sumatra*, Cultural Report Series, Southeast Asia Studies, Yale U., 1958. Juga, E.M. Bruner. "Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatra," *American Anthropologist*, 63 (3), hlm. 508-521.
16. Lihat, N.S. Kalangi, "Kebudajaan Minahasa," dan Soebyakto, "Kebudajaan Ambon," F.L. Cooley, "Allang: A Village in Ambon Island," dalam Koentjaraningrat (ed.), *op. cit.*, hlm. 129-199; 145-185.
17. B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 105.
18. Seni membikin alat-alat perang nampaknya sudah dikenal sejak lama di Minangkabau seperti yang dapat diketahui dari pengungkapan Argensola dalam tahun 1609, seperti yang dikutip dalam Bab III. Parlindungan (*Tuanku Rao, passim*) juga mengkleim bahwa pasukan berkuda (kavaleri) Paderi adalah yang terbaik di Asia Tenggara di masa itu.
19. Berdasarkan survei lapangan dan intervju di Kotagedang, Juni 1970.
20. Dengan kebutuhan subsistens kita maksudkan di sini adalah pola konsumsi tradisional di pedesaan yang rata-rata secara keseluruhan tidak banyak berbeda di daerah manapun di Indonesia. Keperluan minimal untuk konsumsi beras per kapita di daerah pedesaan adalah 60,7 kg per tahun, sedang di daerah perkotaan 80,7 kg per tahun. Lihat, *Survei Perekonomian D I Jogjakarta 1969-1970*, Fak. Ekonomi, U. Gadjah Mada, 1970, hlm. 17.

21. W. Petersen, "A General Typology of Migration," *American Sociological Review*, vol. 23, No. 3, June 1958; hlm. 260.
22. J.N. Bhatta, *Regarding Internal Migration in Indonesia*, Djakarta, Balai Geografi, 1957; hlm. 11.
23. *Laras* adalah kepala sub distrik yang diangkat oleh Belanda dengan tujuan memperkuat kedudukan pemerintah Belanda dalam mengontrol desa-desa, terutama dalam usaha pemungutan pajak dan rodi. Lihat, Schrieke, *op. cit.*, hlm. 135-143.
24. Interviu dengan Walinagari Kotagedang, Juni 1970.
25. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan disusun oleh Sjahril Rasjid, salah seorang pemuka Kotagedang.
26. Lihat analisa Sensus 1930 mengenai Pendidikan; *Almanak Indonesia 1968*, Tabel VII.5 dan VII.6; H. Geertz, *op. cit.*, hlm. 66; Taufik Abdullah, "Minangkabau 1900-1927, Preliminary Studies in Social Development," Cornell U. M.A. Thesis, 1969, ch. II; Soegarda Purbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Djakarta Gunung Agung; 1970.
27. *Ibid.*
28. T. Abdullah, *Schools and Politics*, *op. cit.*, Ch. II.
29. "Daftar Dokter Fakultas Kedokteran U.I. Djakarta Lulus dari Tahun 1950-1970," stensilan Sekretariat Fakultas, 1971.
30. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa meskipun jumlah yang pandai tulis-baca di Jawa tinggi, dan bahagian terbesar dari intelek Indonesia berasal dari Jawa, namun persentasenya lebih rendah dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Lihat *Almanak Indonesia 1968*, Tabel VII.5 dan 6.
31. Schrieke, *op. cit.*, hlm 132 *sqq*; T. Abdullah, hlm 181 *sqq*.
32. Rappoort van de Commissie van Onderzoek ingesteld bij het Gouvernementsbesluit van 13 Februari 1927, No. 1a, Weltevreden, 1928; blhg 1-4.
33. *Tempo*, 15 Januari 1972; *Aneka Minang*, No. 13 & 14, 1972.
34. Hasil wawancara di U. of Singapore. Cf., Bab III.
35. Lihat. M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau. Sedjarah Ringkas dan Adat-nja*, Padang, Sri Dharma, 1971; dan karangan-karangan beliau lainnya.
36. Tambo pada hakekatnya adalah catatan atau silsilah keluarga, yang galibnya ditulis dengan huruf Arab Melayu, dan disimpan dalam simpanan keluarga. Tambo-tambo yang telah dipusakakan dari generasi -kegenerasi biasa bernilai tinggi, yang tak jarang dianggap keramat. Keluarga yang menyimpannya dianggap keluarga berbangsa karena memiliki silsilah yang mungkin sampai kepada nenek moyang orang Minangkabau. dahulu.
37. Karena ketergantungan genealogis inilah maka tidak pernah terdapat schisma atau keinginan hendak menyisihkan diri dari rantau pesisir terhadap daerah asal di pedalaman. Namun perlu juga diingat akan adanya usaha dari rantau Indrapura di Pesisir Selatan, karena pengaruh Aceh, hendak memisahkan diri dari Minangkabau. Lihat, misalnya, argumentasi yang dikemukakan oleh wakil Indrapura pada Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batu Sangkar, 1970.
38. Penemuan candi Muara Takus dan inskripsi-inskripsi lainnya di pantai Timur membuktikan hal ini. Lihat, M.D. Mansoer, *Sedjarah Minangkabau*, *op. cit.*, 1970; Bab III. Juga terutama, F.M. Schnitger, *The Archaeology of Hindoo Sumatra*, Leiden, E.J. Brill, 1937.
39. H. Geertz, *op. cit.*, hlm. 60.

40. Kathleen Gough & D. Schneider, *Matrilineal Kinship*, Berkeley, 1961; hlm. 548.
41. M. Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang, CMS, 1969; hlm. 49-55.
42. Mengenai analisa mendalam dari sistem kekerabatan ini, lihat, de Josselin de Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan*, *op. cit.*, hlm. 45-68.
43. Sikap-sikap schizophrenik ini telah dibahas sebelumnya oleh Dr. Mohd. Amir. Lihat, Parada Harahap, *Kumpulan Karangan Dr. Mohd. Amir*, Medan, 1949. Juga studi Istutiah G. Mitchell, "Gangguan Djawa dan Latar Belakang Kebudajaannya pada Orang Minangkabau di Jakarta," Skripsi Sardjana Sastra, U.I., 1969.
44. M. Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, *op. cit.*
45. Hamka menyebutkan contoh ini dalam bukunya: *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi* (Djakarta, Fa. Tekad, 1963). Dari pengamatan lapangan, kami pun memperoleh contoh-contoh ini.
46. Lihat, a.l., Jahja, "Hukum Waris dan Tanah dan Praktek-praktek Peradilan," dalam Mochtar Naim (ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, hlm. 86. Schrieke, selanjutnya, malah menambahkan 6 hal lain ke dalam daftar tersebut. Hal-hal tersebut adalah:
- (5) Menebus hutang budi
 - (6) Menebus hutang darah
 - (7) Memperbaiki sawah kaum yang rusak.
 - (8) Menutupi kerugian akibat hilang atau rusaknya perahu (di pesisir)
 - (9) Untuk ongkos melakukan haji ke Mekkah
 - (10) Menebus hutang tanggungan keluarga seluruhnya.
- Lihat, Schrieke, *op. cit.*, hlm. 107.
47. Lihat, Schrieke, *ibid.*, hlm. 108.
48. Salah satu dari tujuan merantau dalam artian tradisional adalah justeru untuk menambah luasnya sawah untuk pengimbang jumlah anggota keluarga yang makin berkembang. Membeli atau memagang sawah adalah cara yang lazim dilakukan oleh karena kegiatan meneruka tidak dimungkinkan lagi.
49. Seperti yang dikutip oleh Schrieke dari seorang pengajur adat ("an indefatigable champion of adat"), Datuk Sangguno Diradjo, dalam bukunya: *Kitab Peratooran*. Lihat, Schrieke, *op. cit.*, hlm. 116.
50. Lihat, Herman Sihombing, "Pembinaan Hukum Waris dan Hukum Tanah di Minangkabau," dalam Mochtar Naim (ed.), *op. cit.*, (hlm. 66).
51. *Ibid.*
52. Kekecualianya adalah "sawah panggadangkan gala" yang biasa (tidak selalu) diberikan kepada datuk penghulu suku untuk dapat melaksanakan tugas kepenghuluannya.
53. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 130.
54. Ilustrasi yang sangat menarik mengenai Kehidupan lelaki dalam hubungannya dengan tidur di surai ini dapat dibaca pada autobiografi Muhamad Radjab, *Semasa Kecil di Kampung*, Jakarta, Balai Pustaka, 1974. (cet. ke 2).
55. Lepau di Minangkabau berfungsi lebih dari sekedar warung kopi saja, karena ia juga berfungsi sebagai markas dari kegiatan-kegiatan preman yang berorientasi dunia kasar. Lepau dalam banyak hal merupakan antipoda dari surau; lepau mewakili kehidupan *mundane*, sedang surau mewakili kehidupan sakral.
56. Usaha-usaha untuk mempersamakan sikap-sikap puritan dan orientasi suku Minangkabau dengan etika keduniaan ekonomi Protestan telah sejak lama dilakukan oleh beberapa penulis Barat, termasuk a.l. H. Benda, Geertz, Schrieke, dsb.

57. Selain dari M. Radjab, *Semasa Kecil di Kampung*, op. cit., juga lihat, N.St Iskandar, *Pengalaman Masa Ketjil*, Jakarta, Balai Pustaka, 1966; Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, 4 jilid, Djakarta, Gapura, 1952/53.
58. Sebagai terlihat dalam *Semasa Kecil di Kampung*, khatam quran merupakan peristiwa besar dalam kehidupan kampung, di mana seluruh kampung ikut terlibat dalam perayaan tersebut. Anak-anak laki-laki dan perempuan yang dikhatham biasanya diarak keliling kampung dengan diiringi musik rebana atau lain-lainnya, sedang mereka memakai pakaian haji dan pakaian-pakaian Timur Tengah lainnya.
59. Mengenai pengertian istilah ini, lihat catatan no. 23, Bab V.
60. Tingginya tingkat perceraian antara lain juga karena faktor ini.
61. Studi kasus dari Amilioes Sa'danoer mengenai aspek sosial-budaya dari program Bimas di Sumatera Barat juga memperkuat kenyataan ini. Walaupun pengelolaan sawah berada di tangan mamak, tapi dia lebih bersifat menyeduai, karena sebahagian dari hasil juga diberikan kepada saudaranya yang perempuan yang berhak atas tanah tersebut. Lihat, Amilioes Sa'danoer, *Socio-cultural Impact of Bimas Agricultural Program in West Sumatra*, Singapore, RI-HED, 1975, Juga hasil wawancara dengan yang bersangkutan.
62. Berdasarkan observasi lapangan dan interview dengan kepala-kepala adat di Balai Selasa dan Batang Kapas, Pesisir Selatan, 1971. Di daerah-daerah tersebut konsep lokalitasnya lebih dekat kepada konsep matriolokal seperti yang ditemukan di pantai barat Tapanuli dan Aceh. Cf., de Josselin de Jong, op. cit., hlm. 120.
63. Kekuasaan paternal ini di masyarakat-masyarakat post-industrial sering berbalik lagi menjadi 'neo-matriarchy', di mana karena kesibukan suami dengan pekerjaan kekuasaan dalam rumah tangga telah terlimpah kembali kepada isteri.
64. Lihat, Mochtar Naim, *Penghulu di Minangkabau (Penghulu as Traditional Elite in Minangkabau): A Statistical Summary*, Dept. of Sociology, U. of Singapore, Working Papers No. 14.
65. Proses semacam itu telah terlihat oleh Westenenk di tahun 1913 ketika dia memanggil kepala-kepala adat dalam sebuah pertemuan untuk membicarakan masuknya pengaruh-pengaruh moderen ke dalam kehidupan adat di Minangkabau dan sikap-sikap yang harus diambil dalam menghadapinya. Dalam kaitan ini, de Jong menceritakan: "On that occasion one of those present, Datue' Nawawi, mentioned the increasing lack of respect for the rule *pai tampe' batanjo, pulang tampe' babarito*. According to this rule the *mama'* has to be consulted in all kinds of actions: before a house is built or a wedding is arranged; before any important financial transaction, etcetera. As the saying has it: "On going he (the *mama'*) must be asked, on returning he must be informed." This then, appears to be seldom done that Nawawi complained of the ignoring of the *mama'* in matters on which he ought to be consulted." Lihat, de Jong, op. cit., hlm. 118. Cf., Schrieke mengenai "Individualism," op. cit., hlm. 114 sqq.
66. Tapi yang lebih penting adalah bahwa menjadi *penghulu* tidak lagi dianggap sebagai sesuatu kebanggaan seperti pada masa dahulu. Dari antara kalangan muda banyak yang berpendapat bahwa menjadi penghulu berarti surut ke belakang. Mereka lalu enggan menjadi penghulu walaupun di antara mereka ada yang menurut garis yang ditentukan seharusnya menjadi penghulu. Bagi sementara yang berada di rantau, keinginan untuk menjadi datuk lebih didorong untuk melekatkan gelar tersebut untuk melawan dunia bangsawan dari suku-suku lainnya. Lihat misalnya, Hamka, "Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya," dalam Mochtar Naim (ed.), op. cit., hlm. 44.
67. T. Abdullah, "Minangkabau 1900–1927," op. cit., hlm. 18.
68. Di samping karya-karya etnologi mengenai suku-suku bangsa di Indonesia yang kebanyakan ditulis oleh ahli-ahli Belanda di jaman sebelum perang, yang kebanyakannya ditulis dalam bahasa Belanda, karya-karya sesudah perang yang dianggap penting termasuk: Koentjara-

- ningrat (ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, op. cit.; Frank M. Lebar (ed.), *Ethnic Groups of Insular Southeast Asia*, vol. I, New Haven, HRAF Press, 1972.
69. J.T Siegel, op. cit., hlm. 54.
70. Seperti yang dikutip dari Siegel, ibid., hlm. 56. Cf., C. Snouck Hurgronje, *The Achenese*, vol. I, 1906, hlm. 361.
71. Tipe lain dari merantau yang dikenal di antara orang Aceh ialah yang dinamakan "meudang," tapi tipe ini khusus dimaksudkan bagi anak muda yang mencari pengetahuan agama yang pergi dari satu *meunasah* (madrasah) ke meunasah lainnya untuk mempersiapkan diri menjadi ulama. Dalam banyak hal, hal ini sama dengan cara kehidupan '*urang siak*' di Minangkabau dan santri di Jawa. Merantau mereka biasanya hanya terbatas di sekitar kampung mereka dan jarang yang keluar dari Aceh.
72. Lihat, C. Cunningham, op. cit., hlm. 47.
73. J.D. Freeman, *Iban Agriculture*, London, 1955.
74. Dalam sebuah Seminar yang diberikannya di ISEAS, Singapore, 1972.
75. W. Petersen, "A General Typology of Migration," *American Sociological Review*, vol. 23, No. 3, June 1958, hlm. 266.
76. Lihat, R.M. Koentjaraningrat, *A Preliminary Description of the Javanese Kinship Systems*, Yale University SEA Studies, Cultural Report Series, 1957, hlm. 2-14. Juga, H. Geertz, op. cit., 1963; hlm. 22-30.
77. C. Geertz, *The Religion of Java*, Glencoe, Free Press, 1966, hlm. 232.
78. A. Ramsay dalam tulisannya mengenai "Indonesians in Malaya" (*JMBRAS*, 29, I, 1956; hlm. 119) mengatakan:
 ". . . their original importation to Singapore was due to a Mr. Abrahams who conducted the largest livery stables in the city. Thus the Baweanese were originally grooms and even now represent a high proportion of the personnel of the Turf Club and training stables. They have spread into, and largely monopolized, employment as private car drivers."
79. J. Fredenbregt, *De Baweaners in hun Moederland en in Singapore*, Dissertasi Doktor, Leiden, 1968, diterbitkan oleh Luctor et Emergo, Leiden, 1968.
80. Ibid., hlm. 96.
81. Ibid., terutama Bab II, hlm. 94-100; juga hlm. 193.
82. Sebagai yang telah dikemukakan sebelumnya, kehadiran sejumlah banyak orang Jawa di berbagai daerah di Indonesia bukanlah terutama karena keinginannya hendak bermigrasi disebabkan oleh tekanan ekonomi di Jawa, tapi lebih disebabkan oleh dorongan pemerintah melalui program transmigrasi. Sedang di tingkat atas, yaitu banyaknya pegawai-pegawai pemerintah di luar Jawa yang berasal dari Jawa adalah juga karena penempatan yang diatur oleh pemerintah.
83. William Petersen, op. cit., hlm. 256-266. Tulisan yang sama juga ditemui di C.J. Jansen (ed.), *Readings in the Sociology of Migration*, Oxford, Pergamon Press, 1970, hlm. 49-68. Cf., W. Petersen, "Migration: Social Aspects," *International Encyclopedia of Social Sciences*, vol. 10, 1968 ed., hlm. 286-292.

BAB VII: EFEK DAN PROSPEK MERANTAU

1. Wawancara dengan seorang pemuka masyarakat di Kumango, Batu Sangkar, Juni 1970.
2. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan di beberapa nagari yang disebut dalam Bab Pengantar. Dalam survei kwestioner mengenai *Penghulu* dan *Ulama* ditemukan bahwa 74% dari mereka telah pernah merantau.
3. Walaupun tidak begitu kentara di antara lulusan universitas, tapi jelas sekali terlihat antara lulusan SLA, termasuk lulusan sekolah-sekolah kejuruan. Banyak dari mereka terpaksa menerima kerja apa adanya, sampaipun menjadi buruh kasar harian dengan gaji minimal di fabrik-fabrik karet, tekstil dan pekerjaan-pekerjaan pembangunan lainnya, di Padang. Sebagai catatan, pada tahun 1970 sejumlah lk 25 lulusan universitas terdaftar di Kantor Gubernur sebagai tenaga harian lepas menunggugiliran untuk diterima jadi pegawai negeri. Sebagaimana di daerah-daerah lainnya, di Sumatera Barat pun rata-rata lulusan Universitas maupun sekolah-sekolah lainnya berorientasi ingin jadi pegawai negeri. Cf., Laporan Tahunan Rektor Univ. Andalas, 1970 sqq.
4. Lihat, Mochtar Naim, "Perkembangan Kota-kota di Sumatera Barat," dalam *Prisma*, No. 3, II, Juni 1973.
5. Tabulasi sementara seperti yang disiarkan di koran-koran nasional di Jakarta, Januari 1972. Data mengenai Sumatera Barat didapatkan dari Kantor Sensus dan Statistik, Padang Desember 1972.
6. Seperti yang dapat disimpulkan dari diskusi-diskusi di Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batu Sangkar, Agustus 1970. Juga didasarkan atas wawancara dengan H.A. Gaffar Ismail, seorang tokoh pergerakan Islam, Pekalongan, November 1970.
7. Lihat topik utama mengenai ini di *Aneka Minang*, No. 16, 1973.
8. Beberapa dari sekolah-sekolah agama puteri bersrama terdapat di Padang Panjang, dan di Parabek dan Bengkawas dekat Bukittinggi. Pelajar-pelajar berdatangan dari berbagai penjuru Sumatera Barat, malah juga dari daerah Indonesia lainnya dan Malaysia.
9. Berdasarkan wawancara dengan yang bersangkutan.
10. Berdasarkan wawancara dengan yang bersangkutan mengenai surveinya di nagari Sungai Puar.
11. Adanya sikap semacam ini di antara perantau Minangkabau dapat disimpulkan dari sumber-sumber tertulis mengenai pergerakan politik di Indonesia sejak awal abad ini.
12. Di samping thesis M.A. dan Ph.D. nya yang sering dikutip disini, lihat juga essainya mengenai "Modernization in the Minangkabau World: West Sumatra in the Early Decades of the Twentieth Century," dalam *Culture and Polities in Indonesia*, Claire Holt, ed., Ithaca, Cornell U. Press, 1972; hlm. 197-245. Essai ini kelihatannya adalah ekstrak dari tesis M.A. nya.
13. Tantangan yang umumnya cukup kuat dalam menolak westernisme (seperti cara berpakaian, hubungan bebas antara pria dan wanita, dsb.) jangan dicampur-adukkan dengan kesediaan mereka menerima modernisme seperti yang terlihat dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan politik. Kasus lainnya yang menarik juga diungkapkan oleh Evers mengenai pemilikan tanah di Minangkabau di mana dalam proses modernisasi dan urbanisasi beberapa pola struktur sosial tradisional dipertahankan atau malah diperkuat. Lihat, H.D. Evers, "Changing Patterns of Minangkabau Urban Landownership," *Bijdragen*, 1975.
14. Anggapan sebagai ini berulang kali dikemukakan oleh Gubernur Sumatera Barat, Harun Zain, dalam menangkis laporan pers mengenai demikian banyaknya perantau Minangkabau di Jakarta. Katanya, "Tuan-tuan tidak bisa mengatakan bahwa mereka merantau ke mari, karena Jakarta dan bahagian-bahagian lain dari Indonesia ini adalah tanah air kita. Tuan-

tuan baru bisa mengatakan mereka pergi merantau jika mereka berpindah ke luar negeri, ke luar Indonesia ini." *Haluan*, Agustus 1973.

15. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 130.

16. Lihat, E.M. Bruner, "The Expression of Ethnicity in Indonesia," *SEADAG Papers*. New York, The Asia Society, 1972; R.W. Liddle, *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study*, New Haven, Yale U. Press, 1970.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, T. "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau," *Indonesia*, 2, October 1966, hlm. 1-24.
- Abdullah, T. "Minangkabau 1900-1927: Preliminary Studies in Social Development," M.A. Thesis, Cornell University, 1969.
- Abdullah, T. "Modernization in the Minangkabau World: West Sumatra in the Early Decades of the Twentieth Century," dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca, N.Y. Cornell University Press, 1972, hlm. 179-245.
- Abdullah, T. *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)*, Monograph Series, Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca, N.Y., 1971.
- Adams, M.J. "Myths and Self-Image Among the Kapunduk People of Sumba," *Indonesia*, No. 10, October 1970.
- Albrecht, Gunter. *Soziologie der geographischen Mobilität*, Stuttgart, 1972.
- Almanak Indonesia 1968*, 2 jilid, Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1969.
- Almanak Sumatra*, Medan, 1970.
- Aneka Minang*, majalah tengah bulanan, Jakarta, semua nomor.
- Area Handbook on Indonesia*, 3 jilid, Southeast Asian Studies, Yale University, HRAF-57, Yale-2, 1956.
- Bagus, I. Gusti Ngurah. "Kebudayaan Bali", dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1971, hlm. 284-304.
- Bahrin, Shamsul. "The Indonesians in Malaya," M.A. Thesis, University of Sheffield, 1964.
- Bangun, Pajung. "Kebudayaan Batak", dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1971, hlm. 96-118.
- Bastin, J.S. *The British in West Sumatra 1685-1825*, Kuala Lumpur, University of Malaya Press, 1965.
- Batuah, A. Dt. & A. Dt. Madjoindo. *Tambo Minangkabau*, Jakarta, 1957.
- Batuah Sango, Dt. *Tambo Alam Minangkabau*. Payakumbuh, Percetakan Lem-baga, 1954.
- Benda, H.J. & R.T. McVey, (Eds.). *The Communist Uprisings of 1926-27 in Indonesia*, Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca, 1970.

- Benedict, P. "Austro-Thai Studies: Austro-Thai and Chinese," dalam *Behaviour Science Notes*, 2, 1967; hlm. 275–336.
- Benyamin, Geoffrey. "Prehistory and Ethnology in Southeast Asia: Some New Ideas," *Working Paper*, No. 25, Dept. of Sociology, U. of Singapore, 1974.
- Benjamin, Geoffrey. "Indigenous Religious Systems of the Malay Peninsula," *Working Paper*, No. 28, Dept. of Sociology, U. of Singapore, 1974.
- Beyer, G.H., Ed. *The Urban Explosion in Latin America*, Ithaca, N.Y., Cornell U. Press, 1967.
- Bhatta, J.N. *Soal2 Transmigrasi di Indonesia (Istimewa Sumatera Selatan); Regarding Internal Migration in Indonesia (with Special Reference to S. Sumatra)*, Jakarta, Balai Geografi, 1957.
- Bogue, D.J. "Internal Migration," dalam *The Study of Population*, ed. by P.M. Hauser and O.D. Duncan, U. of Chicago Press, 1959.
- Bouman, H. *Enige Beschouwingen over de Ontwikkeling van het Indonesische Nationalisme op Sumatra's West Kust*, Groningen, J.B. Wolters, 1949.
- Bruner, E.M. "Batak Ethnic Associations in Three Indonesian Cities", *Southwestern Journal of Anthropology*, Vol. 28, No. 3, 1972.
- Bruner, E.M. "Kin and Non-Kin," dalam A. Southall (ed.), *Urban Anthropology*, London, Oxford University Press, 1972.
- Bruner, E.M. "Medan: The Role of Kinship in an Indonesian City," dalam A. Spoehr (ed.), *Pacific Port Towns and Cities*, Honolulu, 1963; juga dalam W. Mangin (ed.), *Peasants in Cities: Readings in the Anthropology of Urbanization*, Boston, 1970.
- Bruner, E.M. "The Expression of Ethnicity in Indonesia," *SEADAG Papers on Problems of Development in Southeast Asia*, 1972.
- Bruner, E.M. "Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatra," dalam *American Anthropologist*, Vol. 63, 3, hlm. 508–521.
- Castles, Lance. "The Ethnic Profile of Djakarta," *Indonesia*, No. 3, April, 1967.
- The Census of British Malaya. 1921*, London, Waterlow & Sons, 1922.
- Colson, E. "Migration in Africa: Trends and Possibilities," dalam *Population in Africa: Report of a Seminar Held at Boston University*, ed. by. Frank B. Lorimer and Mark Carp, Boston, Boston U. Press, 1960.
- Cortesao, A. (ed.), *The Suma Oriental of Tome Pires*, 2 jilid, London, The Hakluyt Society, 1971.

- Cunningham, C.E. *The Postwar Migration of the Toba-Bataks to East Sumatra*, Cultural Report Series, Southeast Asia Studies, Yale University, New Haven, 1958.
- "Daftar Dokter Fakultas Kedokteran Univ. Indonesia Djakarta Lulus dari Tahun 1950–1970," Fak. Kedokteran, U.I., 1971.
- Dahm, Bernhard. *History of Indonesia in the Twentieth Century*, London, Pall Mall Press, 1971.
- Davis, Kingsly. *World Urbanization 1950–1970*, Institute of International Studies, University of California, Berkeley, 1969.
- De Josselin de Jong, P.E. *Minangkabau and Negeri Sembilan. Socio-Political Structure in Indonesia*, Jakarta, Bhratara, 1960.
- De Josselin de Jong, P.E. "The Dynastic Myth of Negeri Sembilan," Mimeograph, 1971.
- De Josselin de Jong, P.E. "Minangkabau: Masjarakat Matrilineal dan Migrasi," (Research Proposal), Leiden, 1972.
- Dixon, R.B. "Migration," dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences*, vol. IX, 1951 ed.
- Djaja, Tamar. *Pusaka Indonesia, Riwayat Hidup Orang2 Besar Tanah Air*, Jakarta, Bulan-Bintang, 1966.
- Djakarta Dalam Angka*, 1968; Jakarta, Pemda DCI, 1970.
- Djohan, Bahder. "Manusia Minang Sebagai Suatu Fenomena Socio-Biologik," *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerdja Seminar Sedjarah dan Kebudajaan Minangkabau* (Batu Sangkar, 1 s/d 8 Agustus, 1970), Padang 1970.
- Durkheim, E. *Suicide: A Study in Sociology*, Free Press of Glencoe, 1951.
- Dyen, I. *Lexico Statistical Classification of the Austronesian Languages*, New Haven, 1965.
- Eisenstadt, S.N. *The Absorption of Immigrants: A Comparative Study Based Mainly on the Jewish Community in Palestine and the State of Israel*, Free Press, 1955.
- Encyclopaedia van Ned. Indie*, .v. "Minangkabau," hlm. 740.
- Encyclopaedia of the Social Sciences*, vol. IX, 1951 ed.; s.v. "Migration" dan "Mobility."
- Esmara, Hendra. "An Economic Survey of West Sumatra," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 7, No. 1 (March), 1971, hlm. 32–56.

- Esmara Hendra. *West Sumatra Facts and Figures 1971*, Institute for Econ. & Soc. Research, Faculty of Economics, Andalas University, Padang, 1971.
- Esmara, H. & Sjahruddin. *Penduduk Sumatera Barat*, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masjarakat, Fak. Ekon., Univ. Andalas, Padang, 1972.
- Evers, H.D. *Data2 tentang Penduduk Kota Madya Padang Tahun 1970*, University of Singapore, 1971.
- Evers, H.D. "Urban Involution: The Social Development of Southeast Asian Towns", *Working Papers*, No. 2, Department of Sociology, University of Singapore, 1972.
- Evers, H.D. & Sjofjan Thalib. *Penduduk Kota Madya Padang*, Padang, Center for Minangkabau Studies, 1970.
- Evers, Hans-Dieter. "Preliminary Notes on Migration Patterns of a Sumatran Town," *Sumatra Research Bulletin*, vol. II, No. 1, Oct. 1972, hlm. 18-23.
- Evers, Hans-Dieter. "Changing Patterns of Minangkabau Urban Land-ownership," *Working Paper*, No. 22, Dept. of Sociology, U. of Singapore, 1974. Juga pada *Bijdragen*, vol. 131, No. 1, 1975.
- Evers, Hans-Dieter. "Involusi Kota di Asia Tenggara; Kasus Kota Padang," *Prisma*, III, April 1974.
- Fairchild, H.P. *Immigration*, New York, 1933.
- Feith, Herbert. *The Indonesian Elections of 1955*, Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca, N.Y., 1957.
- Fox, Robin, *Kinship and Marriage*, Penguin Books, 1969.
- Freeman, J.D. *Iban Agriculture*, London, 1955.
- Furnival, J.S. *The Netherlands India: A Study in Plural Economy*, New York, 1944.
- Gedenkboek der Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzer, 1873-1908*, Arnhem, 1908.
- Geertz, C. *Agricultural Involution*, Berkeley, 1968.
- Geertz, C. *Peddlers and Princes, Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns*, Chicago, 1963.
- Geertz, H. "Indonesian Cultures and Communities," dalam Ruth McVey (ed.), *Indonesia, Southeast Asia Studies*, Yale University, New Haven, 1963.
- Geertz, H. *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*, Free Press of Glencoe, 1961.

- Gorman, C.F. "Hoabinhian: A Pebble-tool Complex with Early Plant Associations in Southeast Asia," *Science*, 163, 1969; hlm. 671-673.
- Gorman, C.F. "The Hoabinhiean and After: Subsistence Patterns in Southeast Asia during the Late Pleistocene and Early Recent Periods," *World Archaeology*, 2, 1971, pp. 300-320.
- Gough, Kathleen. "Variation in Residence," dalam *Matrilineal Kindship*, ed. by D.M. Schneider nad K. Gough, Berkeley & Los Angeles, U. of California Press, 1961; hlm. 545-576.
- Gowing, P.G. *Mosque and Moro. A Study of Muslims in the Philippines*, Manila, Phil. Federation of Christian Churches, 1964.
- Gunawan, I. & J. Banunaek. "Peranan Faktor Sosial-Budaja dalam Gangguan Djiwa pada Orang Minangkabau," *Djiwa*, I, 2, April 1968, hlm. 21-44.
- Hagerstrand, Torsten, et. al., Eds. *Migration in Sweden: A Symposium*, Lund Studies in Geography, Series B, Human Geography, No. 13, The Royal U.of Lund, Lund, 1957.
- Haluan*, harian Padang.
- Hamilton, C.H. "Some Problems of Method in Internal Migration Research," *Population Index*, 27, 1961, hlm. 297-307.
- Hamka. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Jakarta, Fa. Tekad., 1963.
- Hamka. *Ajahku*, Jakarta, Djajamurni, 1962.
- Hamka. *Dari Perbendaharaan Lama*, Medan, Madju, 1963.
- Hamka. *Kenang-kenangan Hidup*, 4 jilid., Jakarta, Gapura, 1952/1953.
- Hamka. *Merantau ke Deli*, Jakarta, Djajabakti, 1960.
- Hamka. *Sedjarah Islam di Sumatera*, Medan, Pustaka Nasional, 1950.
- Hamka. *Sejarah Ummat Islam*, Kuala Lumpur, Pustaka Antara, 1965.
- Hamka. *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck*, Jakarta, B.P., 1957.
- Harahap, Parada. *Kumpulan Karangan Dr. M. Amir*, Medan, 1949.
- Hardjosudarmo, Soedigdo. *Kebidjaksanaan Transmigrasi dalam Rangka Pembangunan Masjarakat Desa di Indonesia*, Jakarta, Bhratara, 1965.
- Harrison, Tom. *The Malays of South-west Sarawak before Malaysia: A Socio-Ecological Survey*, McMillan, 1970.
- Harsojo. "Kebudajaan Sunda," dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudajaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1971, hlm. 305-326.

- Hassan, Riaz. "Rural-Urban Migration and Urbanization in Southeast Asia," Department of Sociology, University of Singapore, 1971.
- Hauser, Philip M. "World and Asian Urbanization in Relation to Economic Development and Social Change," *Urbanization in Asia and the Far East: Proceedings*, Bangkok, UNESCO, 1956.
- Hauser, P.M. and O.D. Duncan, Eds. *The Study of Population*, Chicago, U. of Chicago Press, 1959.
- Hauser, P.M., Ed. *Urbanization in Latin America*, Paris, UNESCO, 1961.
- Heeren, H.J. *The Urbanization of Indonesia*, Jakarta, 1955; juga dalam *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, November, 1955.
- Himpunan Prasaran dan Kertas Kerdja Seminar Sedjarah dan Kebudajaan Minangkabau, 1 s/d 8 Agustus, di Batu Sangkar*, Padang, 1970.
- Hooker, M.B. *Readings in Malay Adat Laws*. Singapore, Singapore University Press, 1970.
- Idris, Dt. Abdul Samad. *Hubungan Minangkabau dengan Negeri Sembilan dari Segi Sejarah dan Kebudayaan*, Seremban, Pustaka Azas Negeri, 1970.
- Idris, Dt. Abdul Samad. *Negeri Sembilan dan Sejarahnya*, Kuala Lumpur, Utusan Melayu Berhad, 1968.
- The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology*, The Hague, W. Van Hoeve, 1958.
- International Encyclopaedia of Social Sciences*, vol. X, 1968, ed., sv. "Migration."
- Isaac, J. *Economics of Migration*, London, Kegan Paul, 1947.
- Iskandar, N. St. *Pengalaman Masa Ketjil*, Jakarta, 1960.
- Iskandar, Teuku. *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur, D.B.P., 1970.
- Jackson, J.A. (ed.), *Migration*, Cambridge, 1969.
- Jacob, T. "Some Problems Pertaining to the Racial History of the Indonesian Region; A Study of Human Skeletal and Dental Remains from Several Prehistoric Sites in Indonesia and Malaysia." Ph.D. diss., Utrecht, 1967.
- Jahja. "Hukum Waris dan Tanah dan Praktek2 Peradilan," dalam Mochtar Naim (ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, CMS, 1968, hlm. 83–94.
- Jan, G.P. "Nationality and Treatment of Overseas Chinese in Southeast Asia," unpubl. Ph.D. Thesis, N.Y.U., N.Y., 1960.
- Jansen, C.J. (ed). *Readings in the Sociology of Migration*, Oxford, Pergamon Press, 1970.

- Jasni, Zainul. *Ekonomi Swadaya Membangun Daerah untuk Kemakmuran Bangsa, dengan Case Study: Sulawesi Selatan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1968.
- Johns, A. *The Kaba Rantjak Dilabueh: A Specimen of Traditional Literature of Central Sumatra*, Cornell University Southeast Asia Program Data Paper, Ithaca, N.Y., 1958.
- Joustra, M. *Minangkabau, Overzicht van land, Geschiedenis en Volk*, s' Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923.
- Junus, Mahmud. *Sedjarah Islam di Minangkabau (Sumatera Barat)*, Jakarta, Al Hidajah, 1971.
- Junus, Mahmud. *Sedjarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Mahmudijah, 1960.
- Junus, Umar, "Kebudayaan Minangkabau," dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudajaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1971, hlm. 245–263.
- Junus, Umar. "Some Remarks on Minangkabau Social Structure," *BKI*, 120, No. 3 (1964), hlm. 293–326.
- Kahn, Joel S. *Anthropology in the Study of Economic Development*, Fac. of Law and Social Science, U. Andalas, Padang, 1971.
- Kalangi, N.S. "Kebudajaan Minahasa," dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudajaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1971, hlm. 145–167.
- Katirithamby-Wells, J. "Ahmad Shah Ibn Iskandar and the Holy War," *JMBRAS*, Vol. 43, part 1, 1970.
- Kemal, Iskandar. *Beberapa Studi tentang Minangkabau (Kumpulan Karangan)*, Fak. Hukum & Pengetahuan Masjarakat Univ. Andalas, Padang, 1971.
- Kemal, Iskandar. *Sekitar Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya, Tindjauan Tentang Kerapatan Adat*, Padang, 1964.
- Kennedy, Raymond. *Bibliography of Indonesian Peoples and Cultures*, Rev. & edited by Thomas W. Maretzki and H. Th. Fischer, Southeast Asia Studies, Yale University, New Haven, 2nd. rev. ed., 1962.
- Kennedy, Raymond. *Islands and Peoples of the Indies*, Smithsonian Institute, Washington, 1943.

- Keuning, J. *The Toba Batak, Formerly and Now*, Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca, N.Y., 1958.
- Keyfitz, Nathan and Widjojo Nitisastro. *Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta, Pembangunan, 1964.
- Klaveren, J.J. van. *The Dutch Colonial System in the East Indies*, Rotterdam, 1953.
- Kodiran. "Kebudajaan Djawa," dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudajaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1971, hlm. 327-350.
- Koentjaraningrat. "The Javanese of South Central Java", dalam G.P. Murdock (ed.), *Social Structure in Southeast Asia*, Chicago, 1960, hlm. 88-115.
- Koentjaraningrat, (ed.), *Manusia dan Kebudajaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1971.
- "Kota tertutup dibandjiri penduduk," *Ekspres*, I, No. 40, Maret 1971, hlm. 13-19.
- Kötter, H. "Regional Development, West Sumatra: Summary", Regional Planning Project, University of Bonn-Bukit Tinggi, 1972.
- Lange, H.M. *Het Ned. Oost-Indisch Leger ter Westkust van Sumatra (1819-1845)*, s' Hertogenbosch, 1852.
- Laporan Tahunan Gubernur Sumbar 1971/1972*, Padang, 1972.
- Lee, E.S. "A Theory of Migration," *Demography*, 3, 1966, hlm. 47-57.
- Kuper, Hilda. *Urbanization and Migration in West Africa*, Berkeley, U. of California Press, 1965.
- Lebar, F.M., Ed. & Comp. *Ethnic Groups of Insular Southeast Asia; vol. 1: Indonesia, Andaman Islands, and Madagaskar*. New Haven, HRAF Press, 1972.
- Leeuwen, P.J. *De Maleische Alexanderroman*, Meppel, 1937.
- Leur, J.C. van. *Indonesian Trade & Society*, W. van Hoeve, The Hague, 1955.
- Lev, Daniel and H. Feith. "The End of the Indonesian Rebellion," *Pacific Affairs*, 36, No. 1, Spring 1963.
- Liddle, R.W. *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study*, New Haven, Yale University Press, 1970.
- Loeb, E.M. & R. Heine Gelderen. *Sumatra: Its History and People* (Loeb), *The Archaeology and Art of Sumatra* (R. Heine-Gelderen), Vienna, 1935.
- Mabogunje, A.L. *Regional Mobility and Resource Development in West Africa*, Montreal, McGill-Queen's U. Press, 1972.

- Mangalam, J.J. *Human Migration, A Guide to Migration Literature in English, 1955-1962*, Lexington, Univ. of Kentucky, 1968.
- Mangkuto, A. Adnan glr. St. *Masyarakat Adat and Lembaga Minangkabau*, Makassar /n.d./.
- Mansoer, M.D. et. al. *Sedjarah Minangkabau*, Bhratara, Jakarta, 1970.
- Maretin, J.V. "Disappearance of Matriclan Survivals in Minangkabau," *BKI*, 117, No. 1, 1961.
- Marsden, William. *The History of Sumatra*, London, J.M. Geery, 1811.
- Maruhum Batuah, Dt. A.M. & H Dt. Bgd. Tanameh. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta, Pusaka A seli, 1956.
- Mattulada. "Kebudajaan Bugis-Makassar", dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudajaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1971, pp. 264-283.
- Maude, A. "West Sumatra Migration Survey: Statistical Summary No. 1," School of Social Sciences, Flinders University, Adelaide, 1972.
- McGee, T.G. "The Role of Hawkers in Marketing Systems of Selected Asian Cities: A Comparative Research Project," Department of Geography, University of Hong Kong, 1972.
- McNicoll, Geoffrey. "Internal Migration in Indonesia: Descriptive Notes," *Indonesia*, No. 5 (April), 1968.
- McVey, Ruth T. (ed.). *Indonesia*, Southeast Asia Studies, Yale University, New Haven, 1963.
- Meilink-Roelofsz, M.A.P. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1962.
- "Migration," dalam *International Encyclopaedia of Social Sciences*, Vol. 10, 1968 ed. I. "Social Aspects" (W. Petersen); II. "Economic Aspects (Brinley Thomas); hlm. 286-300.
- Milone, P.D. "Contemporary Urbanization in Indonesia," *Asian Survey*, 4.
- Milone, P.D. *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts*, Research Series No. 10, Institute of International Studies, University of California, Berkeley, 1966.
- Mitchell, I.G. "Gangguan Djawa dan Latar Belakang Kebudajaannja pada Orang Minangkabau di Djakarta", Skripsi Sardjana Sastra, Jur. Antropologi, Fak. Sastra, U.I., Jakarta, 1969.
- Mitchell, I.G. "The Socio-cultural Environment and Mental Disturbance," *Indonesia*, No. 7, 1969.

- Moerman, Radiah. "Pembangunan Masjarakat Desa Sulit Air," Skripsi Sardjana, U. Gadjah Mada, 1967.
- Mossman, James. *Rebels in Paradise, Indonesia's Civil War*, London, Jonathan Cape, 1961.
- Moubray, GA. de. *Matriarchy in the Malay Peninsula and Neighbouring Countries*, London, 1931.
- Mrazek, R. "Tan Malaka: A Political Personality's Structure of Experience," *Indonesia*, No. 14 (Oct.), 1972.
- Murdock, G.P. *Social Structure in Southeast Asia*, Chicago, Quadrangle Books, 1960.
- Murdock, G.P. "Genetic Classification of the Austronesian Languages," *Ethnology*, III, 1964.
- Naim, Mochtar, (ed.). *Menggali Hukum Tanah and Hukum Waris Minangkabau*, Padang, CMS, 1968.
- Naim, Mochtar. "Merantau: Causes and Effects of Minangkabau Voluntary Migration," *Occasional Paper* No. 5, ISEAS, Singapore, 1971.
- Naim, Mochtar. "Merantau: Reasons and Patterns of Minangkabau Voluntary Migration: Research Proposal," *Sumatra Research Bulletin*, Centre for Southeast Asian Studies, U. of Hull, England, No. 1, October, 1971.
- Naim, Mochtar. *Merantau dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Daerah di Sumatera Barat*, Padang, CMS, 1972.
- Naim, Mochtar. "Merantau versus Pembangunan Daerah di Indonesia," *Prisma*, No. 4, June 1972.
- Naim, Mochtar. "Perantau Minang di Makassar," in *Haluan*, November 1970, (8 nomor).
- Naim, Mochtar. "Perkembangan Kota-kota di Sumatera Barat," *Prisma*, II, No. 3, Juni 1973.
- Naim, Mochtar. "Penghulu di Minangkabau (Penghulu as Traditional Elite in Minangkabau)," *Working Papers*, No. 14, Dept. of Sociology, University of Singapore, 1972.
- Naim, Mochtar, "Voluntary Migration in Indonesia," *Working Paper*, No. 26, Dept. of Sociology, U. of Singapore, 1974. Paper presented at the World Congress of Sociology, Toronto, August 18-24, 1974.
- Naim, Asma and Mochtar. *Bibliografi Minangkabau: Skripsi, Tesis dan Disertasi (Theses and Dissertations)*, Padang, C.M.S., 1973.
- Naim, Asma and Mochtar. *Bibliografi Minangkabau*, ISEA S & U. of Singapore Press, 1975.

- Nasroen, M.M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta, Pasaman, 1957.
- Nelson, J.M. *Migrants, Urban Poverty and Instability in Developing Nations*, Cambridge, Mass., 1969.
- Niel, R. van. *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, The Hague, W. van Hoeve, 1960.
- Nitisastro, Widjojo. "Migration, Population Growth, and Economic Development in Indonesia; A Study of the Econ. Consequence of Alternative Patterns of Inter-island Migration," Ph.D. diss., University of California, Berkeley, 1961.
- Nitisastro, Widjojo. *Pengaruh Perpindahan Penduduk terhadap Penduduk Djawa Dimasa jang akan Datang*, Jakarta, Lembaga Demografi Fak. Ekonomi, UI, 1970.
- Nitisastro, Widjojo. *Population Trends in Indonesia*, Ithaca, N. Y., Cornell University Press, 1970.
- Nitisastro, Widjojo & Nathan Keyfitz. *Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia, Pembangunan*, Jakarta, 1964.
- Noer, Deliar. "The Rise and Development of the Modernist Movement in Indonesia during the Colonial Dutch Period," Ph.D. Thesis, Cornell University, 1962.
- Parlindungan, M.O. *Pongkinangolongan Sinambela gelar Tuanku Rao. Terror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak, 1816–1833*, Jakarta, Tandjung Pengharapan, 1964.
- Patunru, Abd. Razak Dg. "Sedjarah Ringkas dari Orang2 Melaju di Makassar (Sulawesi Selatan)," Lembaga Kebudajaan Bugis, Makassar, (?).
- Peacock, B. "Early Cultural Development in Southeast Asia with Special Reference to the Malay Peninsula," *Archaeology and Physical Anthropology in Oceania*, 6, 1971; hlm. 107–123.
- Pelzer, K.J. *Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics*, N. Y., 1948.
- Perumusan dan Kesimpulan Seminar Pembangunan Daerah Sumatera Bhg. Tengah*, 12 s/d 18 Des. 1971, Univ. Andalas, Padang, 1971.
- Petersen W. "A General Typology of Migration," *American Sociological Review*, vol. 23, No. 3, June 1958; hlm. 256–266. Juga dalam C.J. Jansen (ed.), *Readings in the Sociology of Migration*, Oxford, Pergamon Press, 1970, hlm. 49–68.
- Petersen W. "Migration: Social Aspects", *International Encycl. of Social Sciences*, vol. 10, 1968 ed., hlm. 286–292.

- Petersen, W. *Planned Migration: The Social Determinants of the Dutch-Canadian Movement*. Berkeley, U. of California Press, 1955.
- Pires, Tome, *Summa Oriental*, tr. and ed. by Armando Cortesao, London, Haklyut Society, 1944.
- Poerbakawatja, Soegarda. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta, Guning A gung, 1970.
- Pola Dasar dan Rentjana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Kalimantan Selatan 1969-1973*, DPRD, Prop. Kalimantan Selatan, Bandjarmasin, 1968.
- Pola Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 1964-1968*, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, 1963.
- Postma, P.A. "Effek2 dari pada Urbanisasi dan Urbanism untuk Kehidupan dan Aktivitet2 Keluarga Kota dibeberapa Daerah Wilayah Kelurahan di Kota Dja-karta Raya," Jakarta, Lembaga Penelitian Masjarakat, 1968.
- Pranoto. *Serba Aspek Pembangunan Ekonomi dan Modernisasi*, Jakarta, Study Group Mahasiswa Tjempaka Putih, 1965.
- Propinsi Sumatera Utara, 1970*, Kantor Sensus dan Statistik, Medan, 1971.
- Provencher, R. *Two Malay Communities in Selangor: An Urban Rural Comparison Social Habitats and Interaction*, Berkeley, 1968.
- Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1966.
- Radcliffe, D. "The Peopling of Ulu Langat", *Indonesia*, 8 (Oct.), 1969.
- Radjab, M. *Perang Paderi*, Jakarta, B.P., 1954.
- Radjab, M. *Semasa Ketjil di Kampung*, Jakarta, 1950.
- Radjab, M. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang, CMS, 1969.
- Radjo Panghoeloe, M. Rasjid Manggis Dt. *Minangkabau. Sedjarah Ringkas dan Adatnja*, Padang, Sri Dharma, 1971.
- Radjo Panghoeloe, M. Rasjid Manggis Dt. *Negeri Sembilan. Hubungannya dengan Minangkabau*, Padang Panjang, Sa'adijah, 1970.
- Ramsay, A. "Indonesians in Malaya." *JMBRAS*, 29, 1956.
- Rantjangan Pendahuluan Rentjana Pembangunan 5 Tahun Daerah Propinsi Sumatera Barat 1969-1973*, Padang, 1968.
- Redmana, Han. R. *Beberapa Persoalan Penduduk di Indonesia*, Jakarta, Leknas, LIPI, 1970.
- Reid, A. *The Contest for North Sumatra, Atjeh, the Netherlands & Britain 1858-1898*, Oxford U.P., 1969.

- Roeder, O.G. *Who's Who in Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 1971.
- Roesly, Marah. *Siti Noerbaja*, Jakarta, B.P., 1965.
- Roff, W.R. "Indonesian and Malay Students in Cairo in the 1920's," *Indonesia*, . . .
- Rosdiwati. "Penduduk dan Pembangunan," Seminar Pembangunan Daerah Sumatera Bhg. Tengah, Padang, Dec. 1971.
- Ryan, E.J. "The Value System of a Chinese Community in Java," unpubl. Ph.D. Thesis, Harvard Univ., Cambridge, Mass., 1961.
- Sa'danoer, A. *Socio-cultural Problems of Agricultural Development in West Sumatra*, Singapore, RIHED, 1974.
- Saleeby, Najeeb. *History of Sulu*, Manila, Bureau of Printing, 1908.
- Sandhu, Kernal Singh, *Indian in Malaya*, Cambridge at the U. Press, 1969.
- Sangguno Diradjo, I. Dt. *Mustiko Adat Alam Minangkabau*, Jakarta, 1955.
- Santoso, Djoko & Ali Wardhana (eds.). "Some Aspects of Spontaneous Transmigration in Indonesia," *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, No. 6, Juni 1957.
- Schneider, D. & K. Gough (eds.). *Matrilineal Kinship*, Berkeley, 1961.
- Schnitger, F.M. *The Archaeology of Hindoo Sumatra*, Leiden, E.J. Brill, 1937.
- Schnitger, F.M. *Forgotten Kingdoms in Sumatra*, Leiden, E.J. Brill, 1964.
- Schrieke, B. *Indonesian Sociological Studies*, Part I: "The Causes and Effects of Communism on the West Coast of Sumatra", The Hague, W. van Hoeve, 1966, hlm. 83–166.
- Sensus Penduduk 1961. R.I. Angka Sementara*, Biro Pusat Statistik, Kabinet Menteri Pertama, 1963.
- Sensus Penduduk 1961 D.C.I. Djakarta Raya (Angka Angka Tetap)*, Biro Pusat Statistik, 1963.
- Sheppard, Mubin. *A Short History of Negeri Sembilan*, Singapore, Eastern University Press, 1965.
- Siegel, J.T. *The Rope of God*, Berkeley, University of California Press, 1969.
- Sihombing, H. "Pembinaan Hukum Waris dan Hukum Tanah di Minangkabau," dalam Mochtar Naim (ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, CMS, 1958.
- Sjafei, Sjafri (et al.). *Monografi Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat*, Fak. Pertanian, U. Andalas, Padang, 1971.

- Sjahruddin. *Penduduk dan Tenaga Kerdja Sumatera Barat*, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masjarakat, Fak. Ekonomi. U. Andalas, Padang 1972.
- Sjamsu, M. Amral. *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1905–1955*, Jakarta, Djambatan, 1960.
- Sjamsuddin, Teuku. "Kebudajaan A tjeh," dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudajaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1971, hlm. 226–244.
- Skinner, G.W. *Report on the Chinese in Southeast Asia*, Southeast Asia Program, Cornell U., Ithaca, N. Y., 1951.
- Snouck Hurgronje, C. *Mekka in the Latter Part of the Nineteenth Century*, London, 1931.
- Soebyakto. "Kebudajaan Ambon," dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudajaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1971, hlm. 168–185.
- Soedarto, Lt. Col. "Laporan Tentang Penerimaan Tjalon Taruna AKABRI Umum/Darat Didaerah KODAM III/17 Agustus," Padang, 1970.
- Solheim, W. "The 'New Look' of Southeast Asian Prehistory", *Journal of the Siam Society*, 60, 1972.
- Solheim, W. "Northern Thailand, Southeast Asia, and World Prehistory," *Asian Perspectives*, 13, 1970; hlm. 145–162.
- Sorokin, P. "Mobility," dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences*, vol. IX, 1951 ed.
- Southall, A., Ed. *Social Change in Modern Africa*, Oxford U. Press, 1961.
- Statistik Indonesia (Statistical Pocket-Book of Indonesia), 1964–1967*, Jakarta, Biro Pusat Statistik, 1968.
- Sudarsono, A. Guntur. "Problema Penduduk dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Daerah Sumatera Barat", Seminar Pembangunan Daerah Sumatera Bhg. Tengah, Padang, Dec. 1971.
- Suharso. "Urbanization and Socio-Environmental Problems in Indonesia with Special References to Djakarta Metropolitan," Mimeograph, Jakarta, 1971.
- Sumatera Barat dalam Angka Tahun 1970*, Kantor Sensus & Statistik Prop. Sumatera Barat, Padang, 1971.
- Sumatera Barat dalam Angka Tahun 1972*, Kantor Gubernur Sumatera Barat, 1973.
- Survey Perekonomian Daerah Istimewa Jogjakarta, 1969–1970*, Fak Ekonomi, U. Gadjah Mada, Jogjakarta, 1970.
- Swellingrebel, A.H. *Bali, Studies in Life, Thought and Ritual*, The Hague, W. van Hoeve, 1960.

- Swift, M.G. *Malay Peasant Society in Jelebu*, London, 1965.
- Swift, M.G. "Minangkabau and Modernization," *Anthropology in Oceania*, 1972, hlm. 255-267.
- Tan Giok-Lan, *The Chinese of Sukabumi: A Study in Social and Cultural Accommodation*, Modern Indonesia Project, Cornell U., Ithaca, N. Y., 1963.
- Tanner, Nancy, "Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia," *Indonesia*, 8 (Oct.), 1969, hlm. 21-67.
- Taver, J.D. "Predicting Migration," *Social Forces*, 39; hlm. 207-14.
- Teeuw, A. *Modern Indonesian Literature*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1967.
- Tempo*, majalah mingguan, Jakarta, terutama 15 Januari 1972.
- Thomas, Brinley. "International Migration," dalam Philip M. Hauser (ed.), *The Study of Population*, Chicago, U. of Chicago Press, 1951.
- Thomas, Brinley. "Migration: Economic Aspects," *International Encycl. of Social Sciences*, Vol. 10, 1968, ed., hlm. 292-300.
- United Nations, Dept. of Social Affairs. *Problems of Migration Statistics, Population Studies*, No. 5, 1959.
- "Urbanisasi Djakarta," *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, VIII, 3, Maret 1955, hlm. 107-151.
- Vlekke, B. *Nusantara: A History of Indonesia*, The Hague, W. van Hoeve, 1959.
- Volkstelling 1930*, Departement van Economische Zaken, Batavia, 1936.
- Vollenhoven, C. van. *Het Adatrecht van Ned. Indie*, 3 jilid, Leiden, 1918-1933.
- Vredenbregt, J. *De Baweaners in hun Moederland en in Singapore*, Ph.D. diss., Leiden, 1968.
- Weinberg, A.A. *Migration and Belonging: A Study of Mental Health and Personal Adjustment in Israel*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1961.
- Wertheim, W.F. *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*, The Hague, W. van Hoeve, 1959.
- Wertheim, W.F. "Sociological Aspects of Inter-island Migration in Indonesia," *Population Studies*, Vol. XII, No. 3, Maret 1959.
- Westenenk, L.C. *De Minangkabausche Nagari*, 2 jilid, terj. Mahjuddin Saleh, Fak. Hukum, U. Andalas, Padang, 1969.
- Wilkinson, R.J. *Papers on Malay Subjects*, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1971.

- Williams, L.E. *The Future of the Overseas Chinese on Southeast Asia*, N.Y., McGraw-Hill Book Co., 1966.
- Willmott, D.E. *The Chinese of Semarang: A Changing Minority Community in Indonesia*, Ithaca, N.Y., Cornell U. Press, 1960.
- Winstedt, R.O. *History of Negeri Sembilan*, *JMBRAS*, Vol. 12, III, Oct.
- Winstedt, R.O. *A History of Selangor*, *JMBRAS*, Vol. 12, III, Oct. 1934.
- Winstedt, R.O. *Kamus Bahasa Melayu*, Singapore, 1960.
- Winstedt, R.O. *The Malay Annals or Sejarah Melayu*, *JMBRAS*, Vol. 16, part III, 1938.
- Winstedt, R.O. *The Malay. A Cultural History*, London, Routledge and Kegan Paul, 1953.
- Windstedt, R.O. & R.J. Wilkinson. *A History of Perak*, *JMBRAS*, Vol. 12, I, June 1934.
- Wirosuhardjo, Kartomo. "Peranan Migrasi dalam Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi", Workshop Masalah Penduduk 22–24 Mei 1964. Lembaga Penelitian Ekon. & Masjir. Fak. Ekon., Univ. Ind., Jakarta 1964.
- Withington, William A. "The Cities of Sumatra," *Tijdschrift voor Econ. en Soc. Geografie*, 11, Nov. 1962.
- Withington, William A. "Migration and Economic Development, Some Recent Spatial Changes in the Population of Rural Sumatra, Indonesia," *Tijdschrift voor Econ. en Soc. Geografie*, May/June, 1967, hlm. 153–163.
- Wolters, O.W. *The Fall of Sriwijaya in Malay History*, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1970.
- Zainuddin, H.M. *Srikandi Atjeh*, Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1966.